PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KESEHATAN
Jalan Pamenang Nomor 1-C, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 683756, Pos-el: dinkes@kedirikab.go.id
Laman: www.dinkes.kedirikab.go.id

Kepada:
Yth. Plt Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri
di –
K E D I R I

SURAT PENGANTAR
Nomor : 000.8.6.3/2858/418.25/2026

No.	Jenis yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2025.	1 (satu) Bendel	Dikirim dengan hormat untuk Menindaklanjuti Surat Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Tahun 2025 Nomor 0008.6.3/5/418.09/2026 tanggal 6 Januari 2026 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Tahun 2025.

Kediri, 4 Februari 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEDIRI

dr. AHMAD KHOTIB, M.Kes
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197003242002121003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DINAS KESEHATAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2025

Disusun oleh:

Tim LKjIP Dinkes

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KESEHATAN



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KESEHATAN
Jalan Pamenang Nomor 1-C Telp. 0354-683756 Fax. 0354-680445
Laman : dinkes.kediri.go.id – Surat elektronik : dinkes@kedirikab.go.id
KEDIRI

BERITA ACARA
NOMOR : 000.8.6.3/ 853 /418.25/2026
TENTANG
HASIL RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2025

Pada hari ini Selasa, 9 Januari 2026 bertempat di Ruang Pertemuan Dhaha Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, disampaikan hasil rapat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut;

Pimpinan Rapat
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

Peserta Rapat
1. Pejabat Struktural di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri
2. Pejabat Fungsional di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri
3. Pejabat Pelaksana di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

Hasil Rapat
1. Data yang disampaikan dalam Laporan Kinerja tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disampaikan;
2. Data yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah direview secara berjenjang oleh masing-masing bidang/seksi dan merupakan perbaikan atas saran dan masukan (sebagaimana terlampir);

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyetujui Hasil Rapat :

1	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri **Yusron S.Pd., M.Si**	1. .....
2	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat **dr. Ika Tjandra Kusuma**	2. .....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan **dr. Rahma Sari Dewi**	3. .....
4	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit **dr. Bambang Triyono Putro**	4. .....
5	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan **drg. Sjaiful Achiruddin**	5. .....
6	Administrator Kesehatan Ahli Muda **Retno Handayani, SKM.**	6. .....
7	Administrator Kesehatan Ahli Muda **Kharisun, SKM.,M.PH**	7. .....
8	Perencana Ahli Muda **Dina Mustikawati, SKM**	8. .....
...		
9	Administrator Kesehatan Ahli Muda **Dwi Agustina, SKM, MM.**	9. .....
10	Administrator Kesehatan Ahli Muda **Retno Nur Azizah, SKM.,M.Kes**	10. .....
11	KaSubag Umum dan Kepegawaian **Rina Faidah Nurani, SKM.,M.Kes**	11. .....

Mengetahui,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kediri

dr. Ahmad Khotib,M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19700324 200212 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia Nya sehingga Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2025 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 ini merupakan rangkuman dari kegiatan kegiatan dari beberapa bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.

Laporan Kinerja Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri berisi tentang informasi mengenai aktivitas dan capaian kinerja Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025. Laporan kinerja ini disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Secara eksternal, Laporan Kinerja merupakan alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif dan sebagai wujud tranparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dalam rangka menuju terwujudnya good governance. Sedangkan secara internal, Laporan Kinerja merupakan salah satu alat evaluasi untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami menyadari bahwa laporan kinerja ini belum menggambarkan kinerja Dinas Kesehatan secara utuh, oleh karena itu masih perlu penyempurnaan di berbagai hal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Akhirnya penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dan manfaat bagi peningkatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kediri .

Kediri, 03 Februari 2026
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kediri

dr. Ahmad Khotib,M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19700324 200212 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021 – 2026.

LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2021-2026 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

REALISASI PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Kategori Kinerja
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan Kesehatan	95%	98,44%	100,45%	Sangat Baik
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama	100%	100%	100%	Baik

Realisasi Anggaran Tahun 2025

Pagu Anggaran (Setelah PAK) (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran
466.994.081.997,00	422.098.658.666,33	90,39%

Data capaian kinerja dan keuangan diatas diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pada tahun ke tahun berikutnya. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat meningkatkan kinerja tersebut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH i
BERITA ACARA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA ..... **Error! Bookmark not defined.**
KATA PENGANTAR iii
IKHTISAR EKSEKUTIF vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL viii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Gambaran Umum Organisasi 1
1.3 Tugas dan Fungsi 2
1.4 Landasan Hukum 3
1.5 Sistematika Pelaporan 4
BAB II PERENCANAAN KINERJA 6
2.1 *Cascading* Kinerja 6
2.2 Rencana Strategis 17
2.3 Perjanjian Kinerja 18
2.4 Rencana Kerja dan Anggaran 19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 25
3.1 Pengukuran Kinerja Organisasi 25
3.1.1 Capaian Kinerja Utama Organisasi 25
3.1.2 Capaian Anggaran Kinerja Utama 30
3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran 31
3.1.4 Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya 32
3.1.5 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah 33
3.1.6 Benchmarking 33
3.1.7 Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja 37
3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi 54
3.2.1 Pelaksanaan Kinerja Organisasi 54
3.2.2 Analisis Keterlibatan Pihak Lain 59
3.2.3 Analisis Faktor Pendukung 62
3.2.4 Analisis Faktor Penghambat 63

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.2.5 Rencana Tindak Lanjut 65
3.2.6 Penghargaan dan Apresiasi Kinerja 66
3.3 Realisasi Kinerja Anggaran 69
BAB IV PENUTUP ..... **Error! Bookmark not defined.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2. a Tujuan dan Sasaran Kinerja Strategis Dinas Kesehatan 17

Tabel 2.2. b Formula Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kinerja Strategis Dinas Kesehatan 18

Tabel 2.3. a Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 18

Tabel 2.3. b Program dan Anggaran Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 19

Tabel 2.4. a Tabel Rencana Kerja dan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 19

Tabel 3.1.1 a Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Perjanjian Kerja..... 26

Tabel 3.1.1 b Perhitungan dan Analisa Data Kinerja 26

Tabel 3.1.1 c Tabel Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang Terakreditasi Minimal Utama 27

Tabel 3.1.2. a Capaian Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2025 30

Tabel 3.1.3. a Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 31

Tabel 3.1.4. a Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Tahun Sebelumnya..... 32

Tabel 3.1.5. a Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah 33

Tabel 3.1.6. a Data Benchmarking Realisasi Kinerja 34

Tabel 3.1.7. a Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja 37

Tabel 3.2.1. a Upaya Tindak Lanjut atas Rencana Tindak Lanjut Tahun sebelumnya; 54

Tabel 3.2.6. a Penghargaan dan Apresiasi Kinerja 66

Tabel 3.3. a Tabel Realisasi Kinerja Anggaran 69

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented governement*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Unit Organisasi pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara mulai eselon II wajib memberikan laporan Akuntabilitas Kinerjanya.

Adapun secara teknis penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

1.2.1 Nama Unit Organisasi : Dinas Kesehatan

1.2.2 Alamat Organisasi : Jalan Pamenang No.1-C Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem

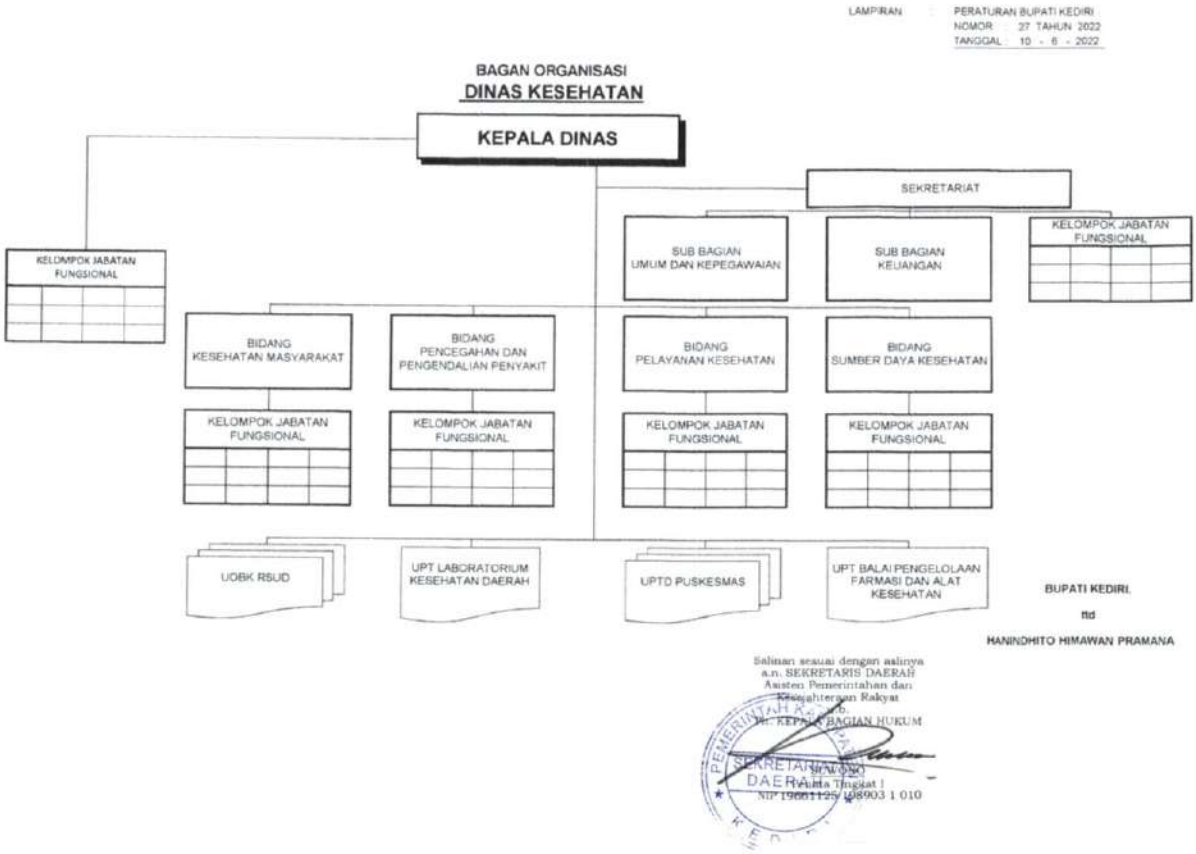
1.2.3 Struktur Organisasi :

A. Kepala Dinas

B. Sekretariat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. Bidang Kesehatan Masyarakat
D. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
E. Bidang Pelayanan Kesehatan
F. Bidang Sumber Daya Kesehatan
G. UOBK RSUD
H. UPT
I. Kelompok Jabatan Fungsional



1.3 Tugas dan Fungsi

1.3.1 Visi

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis – Religius, Serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani".

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.3.2 Misi

Misi 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius.

1.3.3 Tugas

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Kesehatan;

1.3.4 Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran dibidang kesehatan;
3. Pelaksanaan pelayanan dibidang kesehatan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pelayanan dibidang kesehatan;
5. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan dibidang kesehatan;
6. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan dibidang kesehatan;
7. Pembinaan UOBK RSUD dan UPT;
8. Pelaksanaan administrasi di bidang pelayanan kesehatan;
9. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.4 Landasan Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja;
6. Peraturan Bupati Kediri Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri;
7. Keputusan Bupati Kediri Nomor Tahun 188.45/113/418.08/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Kediri;
8. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Nomor : 188/17438/418.25/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026

1.5 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai penjelasan umum tentang profil, tugas, fungsi dan struktur organisasi serta mandat dan peran dari DinasKesehatan serta Permasalahan Strategis

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai hubungan RPJMD dan Renstra, *Cascading* dan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Berisi data-data Lampiran yang diperlukan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.6 Permasalahan Strategis

Permasalahan Strategis telah diidentifikasikan guna mengetahui potensi permasalahan yang penting, mendesak, signifikan dan mendasar untuk segera ditindaklanjuti. Berikut adalah permasalahan strategis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri :

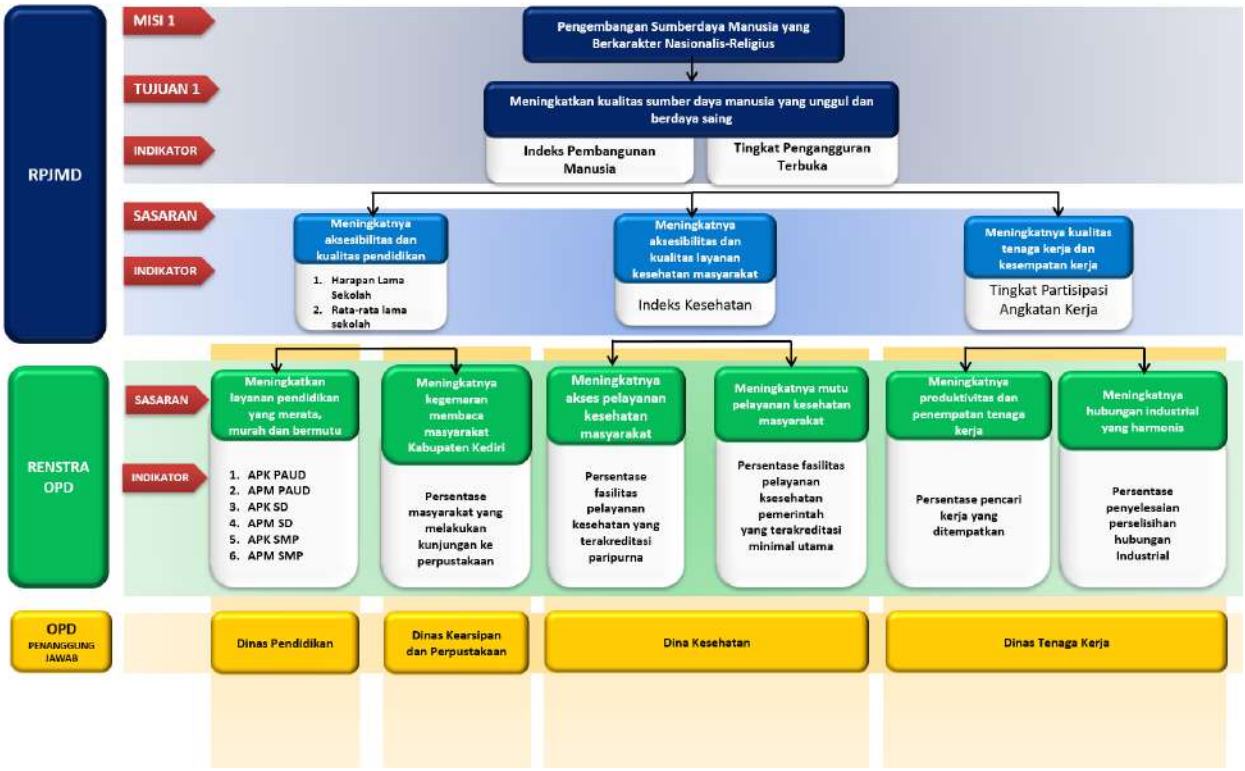
a. Kurang meratanya keterjangkauan layanan kesehatan
b. Penanganan permasalahan wasting dan stunting
c. Pembiayaan kesehatan
d. Optimalisasi pengendalian dan pencegahan pebyakit menular
e. Pemenuhan pemerataan akses dan mutu peleyanan kesehatan dasar dan rujukan, pemenuhan sarana prasarana pelayann kesehatan dan SDM kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 *Cascading* Kinerja

Cascading Kinerja digunakan untuk mengetahui dukungan kinerja dari Perangkat Daerah menuju kinerja Pemerintah Daerah. Peran dan dukungan ini digunakan untuk mengetahui peran dan tanggung-jawab Pemerintah Daerah. Cascading dari Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut;



Cascading Dinas Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025										PENANGGUNG JAWAB
RPJMD	Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis – Religius, Serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani"								Kepala Daerah
	Misi 1	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis - Religius								
	Tujuan 1.1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing								
	Indikator	IPM								
	Sasaran 1.1.2	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat								
	Indikator	Indeks Kesehatan								
RENSTRA	Tujuan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat								Pejabat Eselon II
	Indikator Tujuan	UHH								
	Sasaran	Meningkatkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat ; Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat								
	Indikator Sasaran	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama								
	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Pejabat Eselon II
	Indikator Program	Persentase Kecamatan STBM		Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan		Prosentase pemberian rekomendasi apotek, toko obat, toko alkes dan UMOT		Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu Balita, Poskestren, Poskesdes, SBH, Desa Siaga)		
		Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi				Prosentase produk makanan minuman tertentu yang bersertifikat PIRT				
		Indeks Keluarga Sehat								
		Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) terakreditasi								
		Persentase Nakestrad dan Hattra yang memiliki izin								
		AKI								
		AKB								
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	
RKPD/RENJA	Kegiatan 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	Pemberian izin praktik tenaga kesehatan di kabupaten / kota	Jumlah ijin praktik yang diterbitkan setelah memenuhi persyaratan	Pemberian Izin Apotek,Toko obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro obat tradisional (UMOT)	Jumlah rekomendasi Apotek, TO, Tk Alkes dan Optikal UMOT yang diterbitkan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi kegiatan tim pokjanal tk. Kabupaten, kecamatan dan desa dalam satu tahun	Jumlah sertifikat P-IRT yang diterbitkan
							Persentase Apotek,Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, UMOT yang dibina dan diawasi			

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025										PENANGGUNG JAWAB
RPJMD	Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis – Religius, Serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani"								Kepala Daerah
	Misi 1	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis - Religius								
	Tujuan 1.1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing								
	Indikator	IPM								
	Sasaran 1.1.2	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat								
	Indikator	Indeks Kesehatan								
RENSTRA	Tujuan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat								Pejabat Eselon II
	Indikator Tujuan	UHH								
	Sasaran	Meningkatkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat ; Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat								
	Indikator Sasaran	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama								
	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Pejabat Eselon II
		SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	
	Sub Kegiatan	Pembangunan puskesmas	Jumlah Puskesmas Yang Dibangun	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui faskes dan organisasi profesi	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah rekomendasi Apotek, TO, toko alkes, dan optikal , UMOT yang memenuhi persyaratan	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah lintas sektor/ organisasi masyarakat/ organisasi profesi/ dunia usaha yang bermitra dengan UKBM	
		Pengembangan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM				Jumlah apotek, toko obat, toko alkes, dan optikal, UMOT, yang dibina dan diawasi			
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas							
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan							
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas kesehatan yang terpelihara sesuai standar							

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025										PENANGGUNG JAWAB
RPJMD	Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis – Religius, Serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani"								Kepala Daerah
	Misi 1	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis - Religius								
	Tujuan 1.1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing								
	Indikator	IPM								
	Sasaran 1.1.2	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat								
	Indikator	Indeks Kesehatan								
RENSTRA	Tujuan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat								Pejabat Eselon II
	Indikator Tujuan	UHH								
	Sasaran	Meningkatkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat ; Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat								
	Indikator Sasaran	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama								
	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Pejabat Eselon II
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Persentase Pengadaan obat dengan tingkat aman							
			Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan							
		Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan KesehatanDasar melalui pendekatan keluarga							
		Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makmin ke puskesmas serta fakes lainnya	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke fasilitas kesehatan							
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025										PENANGGUNG JAWAB
RPJMD	Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis – Religius, Serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani"								Kepala Daerah
	Misi 1	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis - Religius								
	Tujuan 1.1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing								
	Indikator	IPM								
	Sasaran 1.1.2	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat								
	Indikator	Indeks Kesehatan								
RENSTRA	Tujuan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat								Pejabat Eselon II
	Indikator Tujuan	UHH								
	Sasaran	Meningkatkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat ; Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat								
	Indikator Sasaran	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama								
	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Pejabat Eselon II
	Kegiatan 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah (Cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap)	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya perencanaan SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Pemerintah	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sertifikat P-IRT yang diterbitkan	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media KIE yang digunakan dalam satu tahun	
			Persentase Puskesmas Dengan Kelulusan Akreditasi Paripurna							
			Persentase tenaga kesehatan tradisional yang dibina							
			Persentase penyelut tradisional yang dibina							
			Persentase desa yang terbentuk Asman TOGA							
			Persentase puskesmas yang melaksanakan pembinaan yankestrad							
			Persentase akses sanitasi layak							
			Jumlah tingkatan tatanan dalam kabupaten sehat							
		SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025										PENANGGUNG JAWAB
RPJMD	Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis – Religius, Serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani"								Kepala Daerah
	Misi 1	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis - Religius								
	Tujuan 1.1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing								
	Indikator	IPM								
	Sasaran 1.1.2	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat								
	Indikator	Indeks Kesehatan								
RENSTRA	Tujuan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat								Pejabat Eselon II
	Indikator Tujuan	UHH								
	Sasaran	Meningkatkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat ; Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat								
	Indikator Sasaran	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama								
	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan danUpaya Kesehatan Masyarakat		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Pejabat Eselon II
	Sub Kegiatan	Pengeloloaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Ibu hamil dilayani sesuai standart (K4)	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya dokumen penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK di Faskes Pemerintahan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah produsen industri rumah tangga yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksinya	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah tema KIE program prioritas yang dipromosikan melalui media	
			Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							
		Pengeloloaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Ibu bersalin dilayani sesuai standart	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan SDMK di Faskes Pemerintahan					
			Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart							
		Pengeloloaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Bayi Baru Lahir dilayani sesuai standart (KN2)							
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							
		Pengeloloaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Balita dilayani sesuai standart							

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025										PENANGGUNG JAWAB
RPJMD	Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis – Religius, Serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani"								Kepala Daerah
	Misi 1	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis - Religius								
	Tujuan 1.1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing								
	Indikator	IPM								
	Sasaran 1.1.2	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat								
	Indikator	Indeks Kesehatan								
RENSTRA	Tujuan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat								Pejabat Eselon II
	Indikator Tujuan	UHH								
	Sasaran	Meningkatkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat ; Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat								
	Indikator Sasaran	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama								
	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan danUpaya Kesehatan Masyarakat		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Pejabat Eselon II
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							
		Pengeloloaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai standart							
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							
		Pengeloloaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif							
			Persentase Desa Yang Melaksanakan Posbindu							
			Persentase Sekolah yang Melaksanakan KTR							
			Persentase Wanita Usia Subur yang melakukan deteksi dini penyakit Kanker payudara dan kanker leher rahim pada usia 30 sd 50 tahun							
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							
		Pengeloloaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Sesuai standart							

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025						PENANGGUNG JAWAB
RPJMD	Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis – Religius, Serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani"				Kepala Daerah
	Misi 1	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis - Religius				
	Tujuan 1.1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing				
	Indikator	IPM				
	Sasaran 1.1.2	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat				
	Indikator	Indeks Kesehatan				
RENSTRA	Tujuan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat				Pejabat Eselon II
	Indikator Tujuan	UHH				
	Sasaran	Meningkatkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat ; Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat				
	Indikator Sasaran	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama				
	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan danUpaya Kesehatan Masyarakat		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pejabat Eselon II
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				
		Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi dilayani sesuai standar				
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				
		Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	Persentase penderita DM dilayani sesuai standar				
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai				
			Persentase penemuan dan penanganan kasus TB				

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025						PENANGGUNG JAWAB
RPJMD	Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis – Religius, Serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani"				Kepala Daerah
	Misi 1	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis - Religius				
	Tujuan 1.1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing				
	Indikator	IPM				
	Sasaran 1.1.2	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat				
	Indikator	Indeks Kesehatan				
RENSTRA	Tujuan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat				Pejabat Eselon II
	Indikator Tujuan	UHH				
	Sasaran	Meningkatkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat ; Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat				
	Indikator Sasaran	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama				
	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan danUpaya Kesehatan Masyarakat		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pejabat Eselon II
			Persentase keberhasilan pengobatan TB				
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar				
			Persentase Orang dengan HIV yang mendapatkan ARV				
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				
		Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB	Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi KLB				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025										PENANGGUNG JAWAB
RPJMD	Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis – Religius, Serta Sejahtera Berbasankan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani"								Kepala Daerah
	Misi 1	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis - Religius								
	Tujuan 1.1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing								
	Indikator	IPM								
	Sasaran 1.1.2	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat								
	Indikator	Indeks Kesehatan								
RENSTRA	Tujuan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat								Pejabat Eselon II
	Indikator Tujuan	UHH								
	Sasaran	Meningkatkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat ; Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat								
	Indikator Sasaran	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama								
	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan/Upaya Kesehatan Masyarakat		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Pejabat Eselon II
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Pemberian Vit A							
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita							
			Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita							
			Prevalensi anemia pada ibu hamil							
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Pos UKK yang terbentuk							
			Persentase jumlah jamaah haji yang diukur kebugaran jasmaninya							
			Persentase Tempat Kerja Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja							
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan olahraga							

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025										PENANGGUNG JAWAB
RPJMD	Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis – Religius, Serta Sejahtera Berbasankan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani"								Kepala Daerah
	Misi 1	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis - Religius								
	Tujuan 1.1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing								
	Indikator	IPM								
	Sasaran 1.1.2	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat								
	Indikator	Indeks Kesehatan								
RENSTRA	Tujuan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat								Pejabat Eselon II
	Indikator Tujuan	UHH								
	Sasaran	Meningkatkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat ; Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat								
	Indikator Sasaran	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama								
	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan/Upaya Kesehatan Masyarakat		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Pejabat Eselon II
			Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja							
			Persentase Kelompok Masyarakat Yang Melaksanakan Aktifitas Fisik							
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan yang Memenuhi Syarat Sesuai Standar							
			Persentase desa ODF							
			Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa kualitas airnya							
			Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis							
			Persentase Tempat-tempat umum yang dilakukan pengawasan sesuai standar							
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah puskesmas yang melakukan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan							

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025												PENANGGUNG JAWAB
RPJMD	Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis – Religius, Serta Sejahtera Berbasiskan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani"										Kepala Daerah
	Misi 1	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis - Religius										
	Tujuan 1.1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing										
	Indikator	IPM										
	Sasaran 1.1.2	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat										
	Indikator	Indeks Kesehatan										
RENSTRA	Tujuan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat										Pejabat Eselon II
	Indikator Tujuan	UHH										
	Sasaran	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat ; Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat										
	Indikator Sasaran	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama										
	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan danUpaya Kesehatan Masyarakat		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				Pejabat Eselon II
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah tenaga kesehatan tradisional yang dibina									
			Jumlah penyehat tradisional yang dibina									
			Jumlah desa yang terbentuk Asman TOGA									
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan pembinaan yankestrad									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya									
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Presentase KLB yang ditanggulangi ≤ 24 jam									
			Penemuan Kasus AFP									
			Penemuan Kasus Suspect Campak									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase ODGJ ditangani sesuai standart									
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase penderita HT ditangani sesuai standart									
			Persentase Penderita DM ditangani Sesuai standart									

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025												PENANGGUNG JAWAB
RPJMD	Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis – Religius, Serta Sejahtera Berbasiskan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani"										Kepala Daerah
	Misi 1	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis - Religius										
	Tujuan 1.1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing										
	Indikator	IPM										
	Sasaran 1.1.2	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat										
	Indikator	Indeks Kesehatan										
RENSTRA	Tujuan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat										Pejabat Eselon II
	Indikator Tujuan	UHH										
	Sasaran	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat ; Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat										
	Indikator Sasaran	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama										
	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan danUpaya Kesehatan Masyarakat		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				Pejabat Eselon II
			Persentase Wnl usia 15 - 59 tahun mendapatkan screening sesuai standart									
			Persentase desa yang melaksanakan Posbindu									
			Persentase sekolah yang melaksanakan KTR									
			Persentase Wanita Usia Subur yang melakukan deteksi dini penyakit Kanker payudara dan kanker leher rahim pada usia 30 sd 50 tahun									
			Persentase penemuan kusta pada anak									
			Persentase cacat pada kasus kusta baru									
			Persentase penderita kusta RFT-MB									
			Persentase penderita kusta RFT-PB									
			Persentase cakupan tatalaksana pneumonia balita									
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana Diare sesuai standart									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025										PENANGGUNG JAWAB
RPJMD	Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis – Religius, Serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani"								Kepala Daerah
	Misi 1	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis - Religius								
	Tujuan 1.1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing								
	Indikator	IPM								
	Sasaran 1.1.2	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat								
	Indikator	Indeks Kesehatan								
RENSTRA	Tujuan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat								Pejabat Eselon II
	Indikator Tujuan	UHH								
	Sasaran	Meningkatkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat ; Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat								
	Indikator Sasaran	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama								
	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan danUpaya Kesehatan Masyarakat		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Pejabat Eselon II
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan advokasi dan / sosialisasi Pengendalian PISP							
			Persentase Puskesmas yang mempunyai Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA)							
			Persentase Kasus Diare pada semua umur ditangani sesuai standart							
			Persentase Kasus Diare pada Balita ditangani sesuai standart							
			Persentase Bumil dilakukan (DDHB) Deteksi Dini Hepatitis B							
			Persentase bayi lahir dari Ibu reaktif HBsAg mendapat HBIg < 24 jam							
			Persentase bayi usia 9-12 bulan yang mendapat HBIg di test HBsAg hasilnya Non Reaktif							
			Persentase kasus DBD ditangani sesuai standart							
			Persentase Angka Bebas Jentik (ABJ)							

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025										PENANGGUNG JAWAB
RPJMD	Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis – Religius, Serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani"								Kepala Daerah
	Misi 1	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis - Religius								
	Tujuan 1.1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing								
	Indikator	IPM								
	Sasaran 1.1.2	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat								
	Indikator	Indeks Kesehatan								
RENSTRA	Tujuan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat								Pejabat Eselon II
	Indikator Tujuan	UHH								
	Sasaran	Meningkatkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat ; Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat								
	Indikator Sasaran	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama								
	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan danUpaya Kesehatan Masyarakat		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Pejabat Eselon II
			Persentase anak usia 1-12 Tahun mendapatkan obat Cacing							
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk dalam data base yang memiliki jaminan kesehatan							
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Presentase pengambilan dan pengiriman spesimen ≤ 24 jam ke laboratorium pemeriksa							
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan							
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kecamatan sehat							
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat							
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya							

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025										PENANGGUNG JAWAB
RPJMD	Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis – Religius, Serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani"								Kepala Daerah
	Misi 1	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis - Religius								
	Tujuan 1.1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan bersaya saing								
	Indikator	IPM								
	Sasaran 1.1.2	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat								
	Indikator	Indeks Kesehatan								
RENSTRA	Tujuan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat								Pejabat Eselon II
	Indikator Tujuan	UHH								
	Sasaran	Meningkatkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat ; Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat								
	Indikator Sasaran	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama								
	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan danUpaya Kesehatan Masyarakat		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Pejabat Eselon II
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan							
			Presentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap							
			Persentase anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan Campak dan Rubella							
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							
		Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Presentase pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah							
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah							

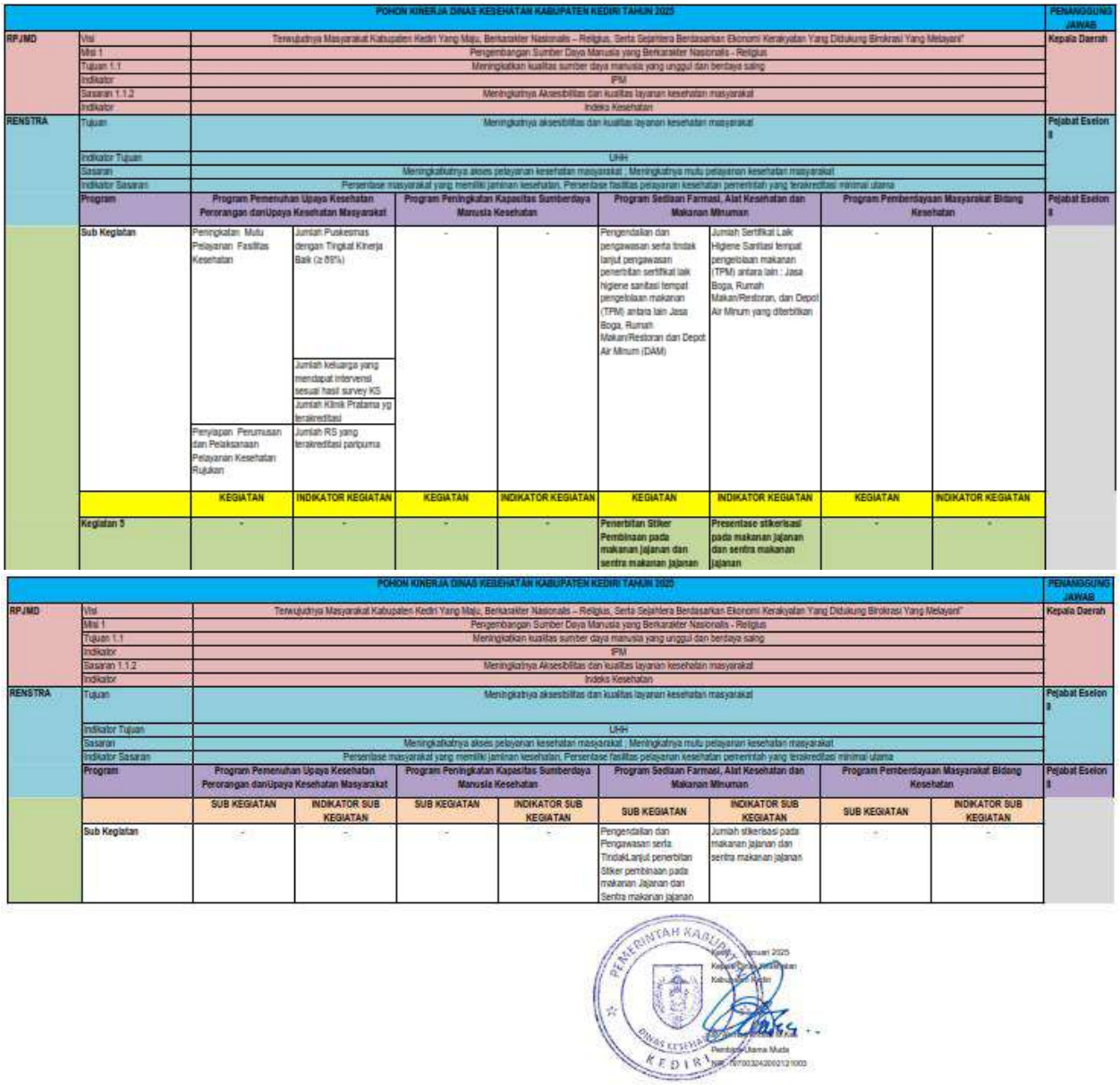
POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025										PENANGGUNG JAWAB
RPJMD	Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis – Religius, Serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani"								Kepala Daerah
	Misi 1	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis - Religius								
	Tujuan 1.1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan bersaya saing								
	Indikator	IPM								
	Sasaran 1.1.2	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat								
	Indikator	Indeks Kesehatan								
RENSTRA	Tujuan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat								Pejabat Eselon II
	Indikator Tujuan	UHH								
	Sasaran	Meningkatkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat ; Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat								
	Indikator Sasaran	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama								
	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan danUpaya Kesehatan Masyarakat		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Pejabat Eselon II
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah dokumen pengelolaan pelayanan malaria							
		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak							
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	
	Kegiatan 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Tingkat ketersediaan sistem informasi kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Terlatih/ana	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Prosentase pemeriksaan produksi makanan minuman industri rumah tangga	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi kesehatan masyarakat skala desa	
									Cakupan promosi kesehatan tingkat desa	
									Cakupan kelompok kesehatan masyarakat yang dibina	
									Persentase Polyandu Purnama Mandiri (PURI)	
									Persentase poskesdes purnama mandiri (PURI)	
									persentase poskestren purnama mandiri (PURI)	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025										PENANGGUNG JAWAB
RPJMD	Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis – Religius, Serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani"								Kepala Daerah
	Misi 1	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis - Religius								
	Tujuan 1.1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing								
	Indikator	IPM								
	Sasaran 1.1.2	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat								
	Indikator	Indeks Kesehatan								
RENSTRA	Tujuan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat								Pejabat Eselon II
	Indikator Tujuan	UHH								
	Sasaran	Meningkatkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat ; Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat								
	Indikator Sasaran	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama								
	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Pejabat Eselon II
									persentase saka Bhakti Husada (SBH) purnama Mandiri (PURI)	
									persentase desa-kelurahan siaga aktif	
		SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	
	Sub Kegiatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah LAN yang terpelihara dan puskesmas yang menggunakan simpus dan e-SPM	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti perkembangan kompetensinya setiap tahun	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase produsen industri rumah tangga yang dibina dan diawasi	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	frekuensi bimbingan teknis dan supervisi UKBM yang dilakukan selama satu tahun	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	
	Kegiatan 4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan	-	-	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain : Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum	Presentase TPM yang ber SLHS	-	-	
			Persentase Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥ 76%)							
			Persentase keluarga yang mendapat intervensi							
			Persentase Klinik Pratama yg terakreditasi							
			Persentase RS yang terakreditasi paripurna							

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025										PENANGGUNG JAWAB
RPJMD	Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis – Religius, Serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani"								Kepala Daerah
	Misi 1	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis - Religius								
	Tujuan 1.1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing								
	Indikator	IPM								
	Sasaran 1.1.2	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat								
	Indikator	Indeks Kesehatan								
RENSTRA	Tujuan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat								Pejabat Eselon II
	Indikator Tujuan	UHH								
	Sasaran	Meningkatkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat ; Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat								
	Indikator Sasaran	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama								
	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Pejabat Eselon II
			Persentase Klinik Utama yang terakreditasi							
			Persentase lab Madya yang terakreditasi							
		SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025									PENANGGUNG JAWAB
RPJMD	Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis – Religius, Serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani"							Kepala Daerah
	Misi 1	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis - Religius							
	Tujuan 1.1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing							
	Indikator	IPM							
	Sasaran 1.1.2	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat							
	Indikator	Indeks Kesehatan							
RENSTRA	Tujuan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat							Pejabat Eselon II
	Indikator Tujuan	UHH							
	Sasaran	Meningkatkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat ; Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat							
	Indikator Sasaran	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama							
	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan danUpaya Kesehatan Masyarakat		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Pejabat Eselon II
	Sub Kegiatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥ 85%)	-	-	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain : Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum yang diterbitkan	-	-	
			Jumlah keluarga yang mendapat intervensi sesuai hasil survey KS							
			Jumlah Klinik Pratama yg terakreditasi							
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah RS yang terakreditasi paripurna							
		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	
	Kegiatan 5	-	-	-	-	Penerbitan Stiker Pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Presentase stikerisasi pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	-	-	

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025									PENANGGUNG JAWAB
RPJMD	Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis – Religius, Serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani"							Kepala Daerah
	Misi 1	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis - Religius							
	Tujuan 1.1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing							
	Indikator	IPM							
	Sasaran 1.1.2	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat							
	Indikator	Indeks Kesehatan							
RENSTRA	Tujuan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat							Pejabat Eselon II
	Indikator Tujuan	UHH							
	Sasaran	Meningkatkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat ; Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat							
	Indikator Sasaran	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama							
	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan danUpaya Kesehatan Masyarakat		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Pejabat Eselon II
		SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	
	Sub Kegiatan	-	-	-	-	Pengendalian dan Pengawasan serta TindakLanjut penerbitan Stiker pembinaan pada makanan Jajanan dan Sentra makanan jajanan	Jumlah stikerisasi pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	-	-	

Gambar 2.2.1.a Cascading Kinerja Dinas Kesehatan

Dari Cascading diatas ditampilkan bahwa Dinas Kesehatan mendapatkan mandat dari Bupati Kediri untuk mengawal Misi 1 Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis dan Religius dengan Tujuan Meningkatkan. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing dan Sasaran RPJMD Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat dengan indikator Indeks Kesehatan (Umur harapan Hidup).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.2 Rencana Strategis

Rencana Strategis OPD disusun setelah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan disebutkan dalam mendukung pencapaian Misi ke 1 Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius ditetapkan tujuan Dinas Kesehatan yakni Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing dengan sasaran:

a. Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat
b. Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Dijelaskan dalam matriks perencanaan kinerja strategis dinas Kesehatan sebagai berikut;

Tabel 2.2. a Tujuan dan Sasaran Kinerja Strategis Dinas Kesehatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing	Umur Harapan Hidup	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan	72%	74%	95%	98%	98%
		Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang Terakreditasi Minimal Utama	62%	64%	100%	100%	100%

Metode Pengukuran dan Perhitungan Indikator dijelaskan dalam matriks berikut;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2.2. b Formula Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kinerja Strategis Dinas Kesehatan

Indikator Sasaran	Formula	Sumber Data (Perangkat Verifikasi)
Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan	Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan ---------- X 100% Jumlah Penduduk di Kabupaten Kediri	Bidang Pelayanan Kesehatan
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang Terakreditasi Minimal Utama	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Yang Terakreditasi Minimal Utama ---------- X 100% Jumlah Total Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah	Bidang Pelayanan Kesehatan

2.3 Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2025, Kepala Dinas Kesehatan telah menyepakati Sasaran, Indikator dan Target kinerja dengan Bupati Kediri. Terdapat beberapa penyesuaian dalam penyusunan Perjanjian Kinerja ini, terutama sesuai dengan arahan dan rekomendasi dari Kementerian PANRB untuk mengganti target apabila realisasi tahun sebelumnya telah melampaui target tahun berikutnya dalam Renstra menjadi lebih realistis yakni dengan meningkatkan (lebih tinggi) atau mempertahankan (sama) dengan realisasi tahun sebelumnya. Selain hal tersebut, terdapat perubahan Perjanjian Kinerja sebagai penyelarasan ulang atas Perubahan Anggaran Kerja (PAK), Pergantian atau mutasi Pejabat, Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran, serta hal-hal lain yang diatur dalam PermenPANRB 53 Tahun 2014. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. a Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatnya akses pelayanan	Persentase Masyarakat yang	98%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	kesehatan masyarakat	Memiliki Jaminan Kesehatan	
2	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang Terakreditasi Minimal Utama	100%

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka ditetapkanlah Program dan Anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.3. b Program dan Anggaran Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	158.549.904.438
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	179.787.877.019
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.547.611.000
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	606.520.060
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.000.219.200

2.4 Rencana Kerja dan Anggaran

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2025, ditetapkanlah RKA setelah PAK Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.4. a Tabel Rencana Kerja dan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**158.549.904.438**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***105.037.700***

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.076.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48.961.700
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***156.146.114.866***
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	154.019.215.020
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.094.689.846
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	917.840.000
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	56.160.000
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	58.210.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	***346.903.100***
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.696.500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.970.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.518.300
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.176.100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.290.200
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.252.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***1.065.648.300***
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	574.195.300
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	370.453.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***886.200.472***

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	24.800.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	394.873.700
Pemeliharaan Mebel	10.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	174.710.200
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	281.816.572
Peningkatan Pelayanan BLUD	***125.501.950.280***
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dan BOK Puskesmas	125.501.950.280
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**179.787.877.019**
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	***31.317.031.509***
Pembangunan Puskesmas	12.597.960.000
Pengembangan Puskesmas	2.053.999.468
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	864.427.050
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	529.427.939
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	231.855.800
Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai/BMHP, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	14.822.161.252
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	217.200.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**147.685.033.650**
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	104.524.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	56.335.750
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	46.663.500
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	73.363.500
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	66.568.500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	203.328.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	67.209.500
Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	76.492.000
Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	56.310.500
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	133.440.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	310.346.800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	128.525.000
Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB	51.852.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan Atau Berpotensi Bencana	49.525.000
Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat	472.038.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	138.330.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	126.245.100
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	621.895.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tardisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	71.145.400
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	226.441.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	406.548.200
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	143.288.152.000
Pengambilan dan Pengiriman spesimen penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	74.743.500
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	38.200.000
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	123.316.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	92.880.000
Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	37.247.000
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	370.193.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	16.532.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	156.642.000
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	***296.920.760***
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	296.920.760
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***488.891.100***
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	452.019.600
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	36.871.500
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**1.547.611.000**
Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di kabupaten / kota	33.174.800
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	33.174.800
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	***140.416.400***
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	9.799.600
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	130.616.800
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***1.374.019.800***
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.374.019.800
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**606.520.060**
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, UMOT	***195.203.000***
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	195.203.000
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum	***45.980.000***
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air	45.980.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Minum	
Penerbitan Stiker Pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	***19.550.000***
Pengendalian dan Pengawasan serta TindakLanjut penerbitan Stiker pembinaan pada makanan Jajanan dan Sentra makanan jajanan	19.550.000
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	***345.787.060***
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	345.787.060
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**1.000.219.200**
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***793.625.800***
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	793.625.800
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***38.697.400***
Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	38.697.400
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***167.896.000***
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	167.896.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi disampaikan dengan Capaian Kinerja Utama, Capaian Anggaran, Efisiensi Sumber Daya, Perbandingan Realisasi Tahun Sebelumnya, Perbandingan Target RPJMD, dan *(Benchmarking)*;

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Di dalam prosesnya pengukuran dilakukan pada aspek kegiatan, program dan sasaran. Pada prinsipnya pengukuran dilakukan untuk melihat atau mengevaluasi sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan sesuai dengan arah yang diinginkan dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Piranti pengukurannya berupa Pengukuran Kinerja.

3.1.1 Capaian Kinerja Utama Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana Kinerja pada level kinerja utama. Capaian Kinerja utama tersebut mengambil pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 untuk disampaikan pencapaiannya. Sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kinerja yakni Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung-jawab kami. Dalam hal ini, penyampaian capaian kinerja organisasi disampaikan sebagai berikut;

1. Persentase Capaian Positif : Realisasi/Target x 100%
2. Persentase Capaian Negatif : Target-(Realisasi-Target)/Target x 100%

Dalam menentukan Kategori Kinerja diukur dengan skala sebagai berikut:

1. Kategori Sangat Baik apabila Capaian sama atau diatas (≥) 100%
2. Kategori Baik apabila Capaian lebih dari 80% dan kurang dari 100%
3. Kategori Cukup Baik apabila Capaian lebih dari 60% dan kurang dari 80%
4. Kategori Kurang Baik apabila Capaian kurang dari 60%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Adapun capaian kinerja organisasi disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3.1.1 a Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Perjanjian Kerja

Sasaran	Indikator	Target Kinerja			Kategori Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan	98%	98,44%	100,45%	Sangat Baik
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang Terakreditasi Minimal Utama	100%	100%	100%	Baik

Dari data diatas, sebanyak **1 (satu) indikator** kinerja utama masuk dalam kategori kinerja **Sangat Baik** dan sebanyak **1 (satu) indikator** kinerja masuk dalam kategori kinerja **Baik.**

Keandalan Perhitungan dan Analisa Data Kinerja akan disampaikan sebagai berikut:

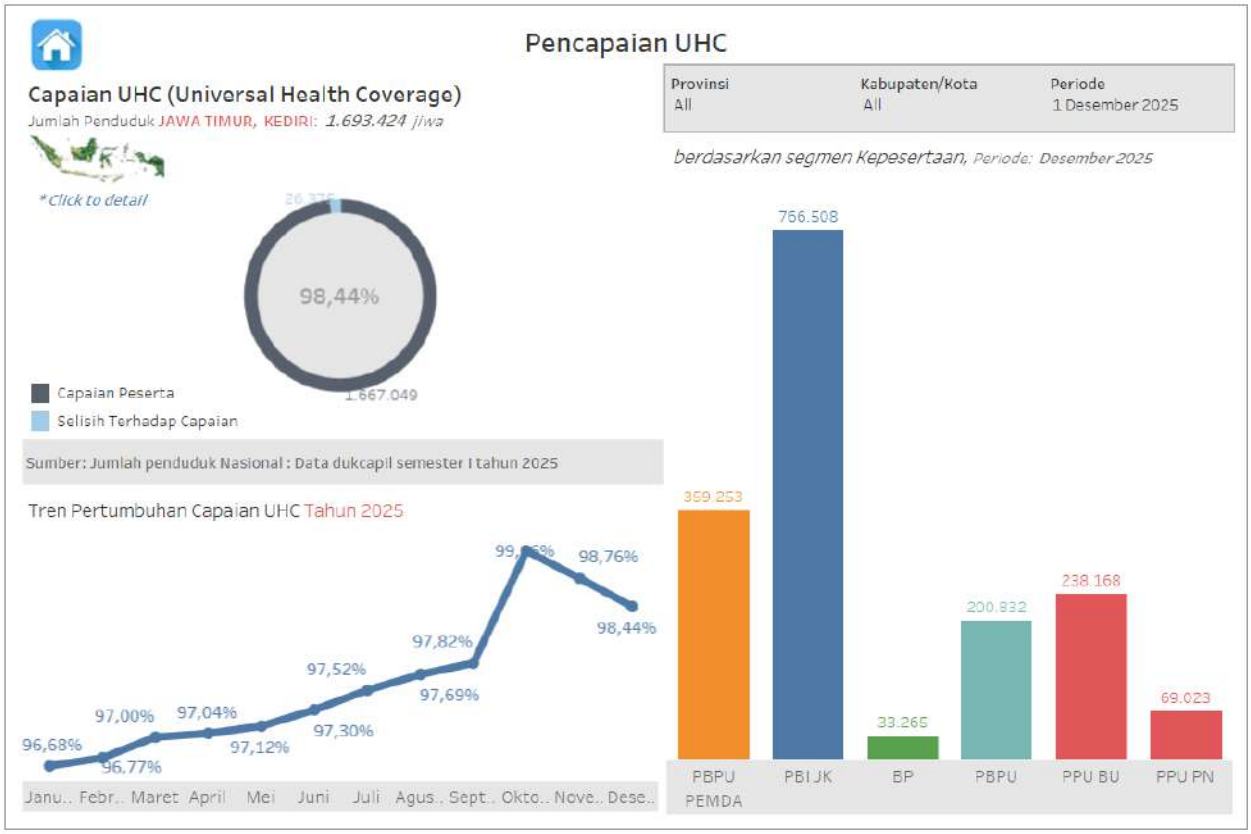
Tabel 3.1.1 b Perhitungan dan Analisa Data Kinerja

Indikator	Formula	Operasionalisasi	Hasil Perhitungan	Dokumen Dasar Perhitungan
Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan	Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan ---------- X 100% Jumlah Penduduk di Kabupaten Kediri	1.667.049 X 100% 1.693.424	98,44%	Dashboard BPJS
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang Terakreditasi Minimal Utama	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Yang Terakreditasi Minimal Utama ---------- X 100% Jumlah Total Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah	39 X 100% 39	100%	Laporan Tahunan Bidang Pelayanan Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Data mentah/dasar Perhitungan adalah sebagai berikut;

1. Indikator 1 (Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan)



Sumber data : Dashboard JKN BPJS Cabang Kediri

2. Indikator 2 (Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang Terakreditasi Minimal Utama)

Tabel 3.1.1 c Tabel Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang Terakreditasi Minimal Utama

No	Kode	Nama Faskes Pemerintah	Jenis	Lembaga Akreditasi	Nomer Sertifikat Akreditasi	Capaian akreditasi	Tanggal kadaluarsa Akreditasi	Tahap Akreditasi
1	3506014	RS Umum Daerah Kabupaten Kediri	RSU	Lembaga Akredltasl Rumah Saldt Damar Husada Paripurna ILARS DHP)	00086/U/X11/2022	Paripurna	01-12-2026	Sertifikasi Manual
2	3506066	RS Umum Daerah Simpang lima Gumul Kediri C	RSU	Lembaga Komisl Akreditasl Rumah Sakit (KARS)	KARS-SERT/402/XI/2022	Paripurna	14-11-2026	Sertifikasi Manual
3	35060200007	Puskesmas Pelas	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara	YM.02.01/D/11258/2023	Paripurna	05 September 2028	Sertifikat Manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Kode	Nama Faskes Pemerintah	Jenis	Lembaga Akreditasi	Nomer Sertifikat Akreditasi	Capaian akreditasi	Tanggal kadaluarsa Akreditasi	Tahap Akreditasi
				Akreditasi Lipa Mitra Nusa				
4	35060200016	Puskesmas Adan-Adan	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Lipa Mitra Nusa	YM.02.01/D/2649/2024	Paripurna	25 November 2028	Sertifikat Manual
5	35060200024	Puskesmas Badas	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer	YM.02.01/D/1036/2024	Paripurna	24 November 2028	Sertifikat Manual
6	35060200031	Puskesmas Bangsongan	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Lipa Mitra Nusa	YM.02.01/D/18304/2023	Paripurna	31 Oktober 2028	Sertifikat Manual
7	35060200021	Puskesmas Bendo	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia	YM.02.01/D/19723/2024	Paripurna	31 Januari 2029	Sertifikat Manual
8	35060200009	Puskesmas Blabak	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Penyelenggara Akreditasi Pelayanan Kesehatan Paripurna	YM.02.01/D/13181/2023	Paripurna	31 Oktober 2028	Sertifikat Manual
9	35060200033	Puskesmas Gampeng	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer	YM.02.01/D/1162/2024	Paripurna	25 November 2028	Sertifikat Manual
10	35060200036	Puskesmas Grogol	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer	YM.02.01/D/4144/2024	Paripurna	17 November 2028	Sertifikat Manual
11	35060200015	Puskesmas Gurah	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Lipa Mitra Nusa	YM.02.01/D/14690/2023	Paripurna	12 Oktober 2028	Sertifikat Manual
12	35060200020	Puskesmas Kandangan	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia	YM.02.01/D/19730/2024	Paripurna	13 Februari 2029	Sertifikat Manual
13	35060200032	Puskesmas KayenKidul	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Lipa Mitra Nusa	YM.02.01/D/14795/2023	Paripurna	21 Oktober 2028	Sertifikat Manual
14	"	Puskesmas Keling	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer	YM.02.01/D/3476/2024	Paripurna	16 Desember 2028	Sertifikat Manual
15	35060200018	Puskesmas Kepung	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer	YM.02.01/D/4281/2024	Paripurna	28 Oktober 2028	Sertifikat Manual
16	"	Puskesmas Kras	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer	YM.02.01/D/9533/2023	Paripurna	08 Agustus 2028	Sertifikat Manual
17	35060200025	Puskesmas Kunjang	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer	YM.02.01/D/3409/2024	Paripurna	09 Desember 2028	Sertifikat Manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Kode	Nama Faskes Pemerintah	Jenis	Lembaga Akreditasi	Nomer Sertifikat Akreditasi	Capaian akreditasi	Tanggal kadaluarsa Akreditasi	Tahap Akreditasi
18	35060200001	Puskesmas Mojo	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Lipa Mitra Nusa	YM.02.01/D/14895/2023	Paripurna	14 Oktober 2028	Sertifikat Manual
19	35060200002	Puskesmas Ngadi	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer	YM.02.01/D/8807/2023	Paripurna	27 Juli 2028	Sertifikat Manual
20	"	Puskesmas Ngadiluwih	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer	YM.02.01/D/16893/2023	Paripurna	26 Oktober 2028	Sertifikat Manual
21	35060200012	Puskesmas Ngancar	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer	YM.02.01/D/15326/2023	Paripurna	31 Oktober 2028	Sertifikat Manual
22	35060200034	Puskesmas Ngasem	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer	YM.02.01/D/12519/2023	Paripurna	21 September 2028	Sertifikat Manual
23	35060200030	Puskesmas Pagu	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Lipa Mitra Nusa	YM.02.01/D/12813/2023	Paripurna	05 Oktober 2028	Sertifikat Manual
24	35060200023	Puskesmas Pare	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Lipa Mitra Nusa	YM.02.01/D/512/2024	Paripurna	25 November 2028	Sertifikat Manual
25	35060200013	Puskesmas Plosoklaten	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Lipa Mitra Nusa	YM.02.01/D/2427/2024	Paripurna	09 Desember 2028	Sertifikat Manual
26	35060200014	Puskesmas Pranggang	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Lipa Mitra Nusa	YM.02.01/D/9330/2023	Paripurna	05 Agustus 2028	Sertifikat Manual
27	35060200026	Puskesmas Puhjarak	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Lipa Mitra Nusa	YM.02.01/D/9589/2023	Paripurna	05 Agustus 2028	Sertifikat Manual
28	35060200017	Puskesmas Puncu	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Lipa Mitra Nusa	YM.02.01/D/11935/2023	Paripurna	23 September 2028	Sertifikat Manual
29	"	Puskesmas Purwoasri	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Lipa Mitra Nusa	YM.02.01/D/2435/2024	Paripurna	09 Desember 2028	Sertifikat Manual
30	"	Puskesmas Sambi	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Lipa Mitra Nusa	YM.02.01/D/2607/2024	Paripurna	28 November 2028	Sertifikat Manual
31	35060200003	Puskesmas Semen	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer	YM.02.01/D/19721/2024	Paripurna	27 Oktober 2028	Sertifikat Manual
32	35060200022	Puskesmas Sidorejo	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Akreditasi	YM.02.01/D/19519/2024	Paripurna	30 November 2028	Sertifikat Manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Kode	Nama Faskes Pemerintah	Jenis	Lembaga Akreditasi	Nomer Sertifikat Akreditasi	Capaian akreditasi	Tanggal kadaluarsa Akreditasi	Tahap Akreditasi
				Fasilitas Kesehatan Primer				
33	5060200011	Puskesmas Silir	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Lipa Mitra Nusa	YM.02.01/D/2434/2024	Paripurna	09 Desember 2028	Sertifikat Manual
34	35060200028	Puskesmas Sumberjo	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Lipa Mitra Nusa	YM.02.01/D/19444/2023	Paripurna	18 November 2028	Sertifikat Manual
35	35060200029	Puskesmas Tanon	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer	YM.02.01/D/35514/2024	Paripurna	02 Februari 2029	Sertifikat Manual
36	"	Puskesmas Tarokan	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Lipa Mitra Nusa	YM.02.01/D/19180/2023	Paripurna	18 November 2028	Sertifikat Manual
37	35060200035	Puskesmas Tiron	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer	YM.02.01/D/1967/2024	Paripurna	02 Desember 2028	Sertifikat Manual
38	35060200010	Puskesmas Wates	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Lipa Mitra Nusa	YM.02.01/D/17085/2023	Paripurna	26 Oktober 2028	Sertifikat Manual
39	35060200005	Puskesmas Wonorejo	Pusat Kesehatan Masyarakat	Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Lipa Mitra Nusa	YM.02.01/D/12554/2023	Paripurna	30 September 2028	Sertifikat Manual

Sumber data : Laporan Bidang Pelayanan Kesehatan

3.1.2 Capaian Anggaran Kinerja Utama

Capaian Anggaran Organisasi disampaikan untuk mengetahui besaran anggaran yang digunakan dalam pencapaian kinerja tersebut. Capaian anggaran dihitung menggunakan cara realisasi dibagi dengan pagu dikalikan 100%. Adapun hasil capaian anggaran Organisasi adalah sebagai berikut;

Tabel 3.1.2. a Capaian Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran			Zona Penyerapan Anggaran
		Pagu	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan	143.288.152.000	142.594.197.200	99,52%	Zona Hijau

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang Terakreditasi Minimal Utama	39.654.075.279	29.754.175.868	75,03%	Zona Merah

Dari data diatas, ke- **2 (dua)** indikator masuk dalam **Zona Hijau** penyerapan anggaran.

Penyampaian zona penerapan anggaran tersebut dijadikan rujukan dalam menghubungkan hubungan antara ketercapaian kinerja dan capaian anggaran. Secara teknis hubungan ketercapaian kinerja dan anggaran tersebut disampaikan dalam bagian berikutnya yakni perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya.

3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran

Untuk melihat efisiensi anggaran, maka digunakanlah rumus capaian kinerja dikurangi dengan capaian anggaran. Apabila hasilnya menunjukkan angka lebih dari 0 maka dapat dikatakan efisien, namun apabila di bawah 0 maka dapat dikatakan tidak efisien. Namun demikian, capaian kinerja haruslah sama atau diatas 100%, karena dengan demikian capaiannya akan sudah efektif. Apabila capaian kinerja belum efektif (belum 100%), maka dapat disebutkan penggunaan sumber daya menjadi tidak efisien.

Tabel 3.1.3. a Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator	Target Kinerja			Kategori Kinerja
		Capaian Kinerja*	Capaian Anggaran**	Efisiensi****	
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan	100,45%	99,52%	0,93%	Efisien
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100,00%	75,03%	24,97%	Efisien

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Pemerintah yang Terakreditasi Minimal Utama				

Dari data diatas, **semua indikator** kinerja masuk dalam kategori kinerja **Efisien**. Data efisiensi kinerja ini akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kinerja tahun berikutnya, dalam upayanya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Untuk perhitungan Program dan Kegiatan tidak Masuk dalam perhitungan sub-bab ini, karena akan dibahas pada sub-bab 3.1.7.

3.1.4 Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Dalam melihat konsistensi peningkatan dari tahun ke tahun, ditampilkan realisasi kinerja dari dua tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun digunakan untuk mengetahui fluktuasi peningkatan apakah meningkat secara konsisten, bertahan, fluktuatif atau menurun secara konsisten. Dari perbandingan realisasi tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi bersama, terutama perbaikan-perbaikan kinerja.

Tabel 3.1.4. a Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator	Realisasi Kinerja			Keterangan
		2022	2023	2024	
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan	78,74%	96%	96,91%	Konsisten Meningkat
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang Terakreditasi Minimal Utama	58,97%	92,31%	100%	Konsisten Meningkat

Dari data di atas, sebanyak **2 (dua) indikator** kinerja dengan keterangan **Konsisten Meningkat.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.1.5 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah

Dalam mengupayakan pencapaian target jangka menengah Perangkat Daerah, maka perlu diperbandingkan realisasi tahun ini dengan target Renstra/RPJMD untuk mengetahui rentang jarak antara realisasi tahun ini dengan target jangka menengah. Penyusunan ini erat kaitannya dengan tindak lanjut dan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan untuk mengupayakan tercapainya target jangka menengah.

Tabel 3.1.5. a Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran	Indikator	Realisasi Kinerja			Keterangan
		Realisasi	Target RPJMD	Capaian	
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan	98,44%	78%	126,21%	Melebihi Target
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang Terakreditasi Minimal Utama	100%	80%	125%	Melebihi Target

Dari data diatas, terdapat **2 (dua) indikator** yang **melebihi target** jangka menengah. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar penetapan target perencanaan tahun berikutnya.

3.1.6 Benchmarking

Dalam mengupayakan pencapaian target jangka menengah Perangkat Daerah, maka perlu diperbandingkan realisasi tahun ini dengan target Renstra/RPJMD untuk mengetahui rentang jarak antara realisasi tahun ini dengan target jangka menengah. Penyusunan ini erat kaitannya dengan tindak lanjut dan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan untuk mengupayakan tercapainya target jangka menengah.

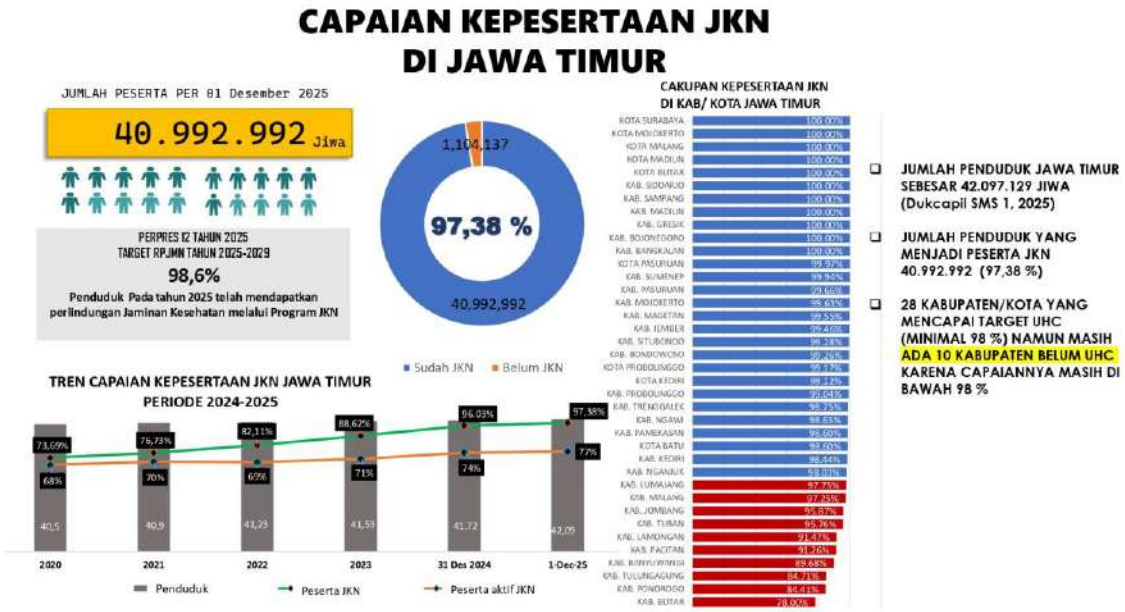
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3.1.6. a Data Benchmarking Realisasi Kinerja

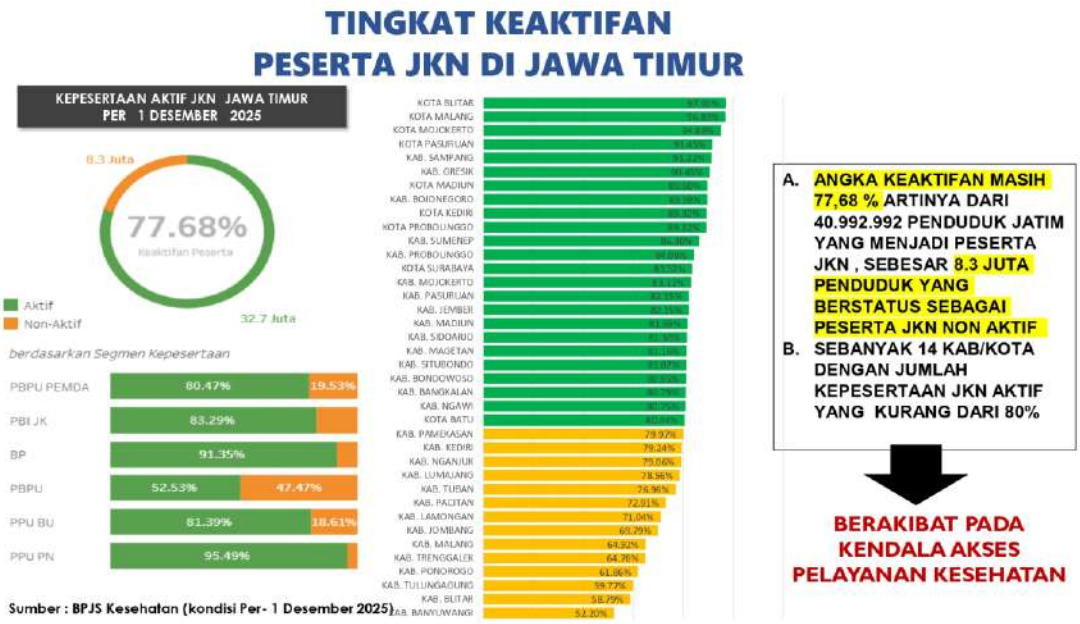
Indikator	Kabupaten Kediri	Nasional	Provinsi	Kab/Kota Lain (Kabupaten Nganjuk)	Keterangan
Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan	98,44%	98,62%	97,38%	98,03%	Sumber data : Dashboard JKN Prov Jatim
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang Terakreditasi Minimal Utama	100%	-	-	-	-

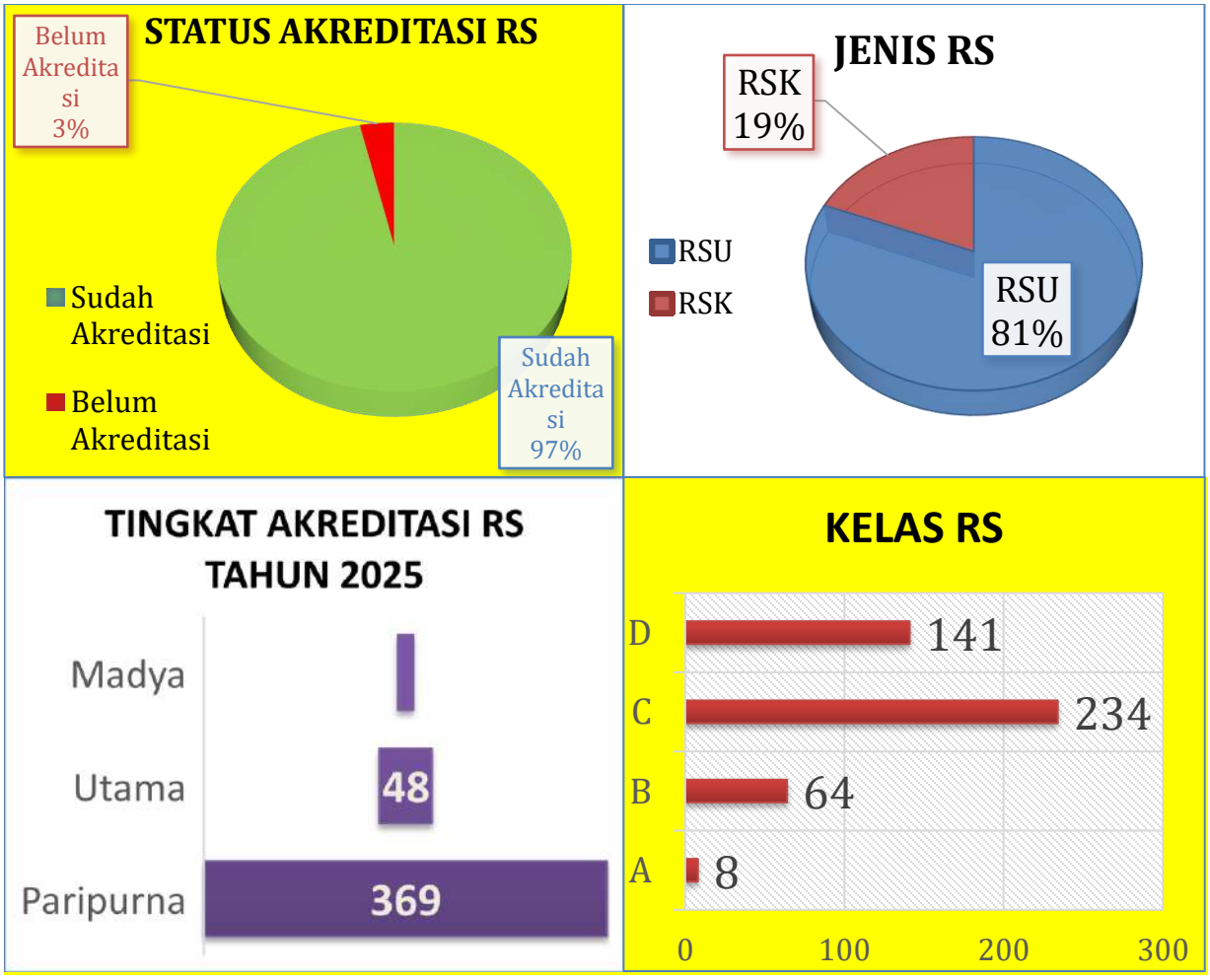
Dari hasil data diatas, didapati hal sebagai berikut;

1. Terdapat **1 indikator** yang lebih tinggi dari capaian provinsi, namun masih lebih rendah dari capaian nasional
2. Terdapat **1 indikator** yang tidak ditemukan *benchmarking.*

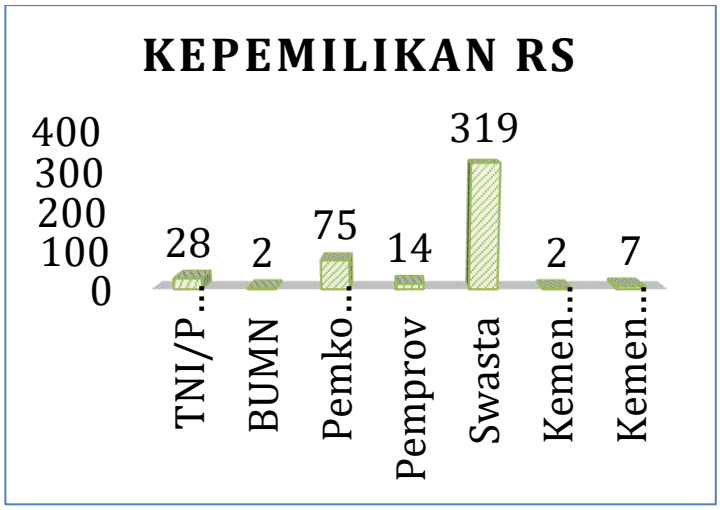


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.1.7 Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja

Untuk mengetahui Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja diperoleh dengan cara sebagai berikut;

1. Kategori Kinerja ditentukan sesuai dengan perhitungan pada sub-bab sebelumnya;
2. Dukungan Terhadap Kinerja ditentukan dengan kategori dukungan sebagai berikut;
   a. Kategori Sangat Mendukung apabila Capaian sama atau diatas (≥) 100%
   b. Kategori Mendukung apabila Capaian lebih dari 80% dan kurang dari 100%
   c. Kategori Cukup Mendukung apabila Capaian lebih dari 60% dan kurang dari 80%
   d. Kategori Kurang Mendukung apabila Capaian kurang dari 60%.

Tabel 3.1.7. a Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			Kategori Dukungan
		Target	Realisasi	Capaian	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100%**	**100%**	**100,00%**	Sangat mendukung
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**100%**	**100%**	**100,00%**	Sangat mendukung
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Renstra, Renja)	2	2	100,00%	Sangat mendukung
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun dalam 1 tahun	4	4	100,00%	Sangat mendukung
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***100%***	***100%***	***100,00%***	Sangat mendukung
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercukupinya gaji dan tunjangan ASN	1856	1928	103,88	Sangat mendukung
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan administrasi (penerima honor)	3	3	100,0%	Sangat mendukung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			Kategori Dukungan
		Target	Realisasi	Capaian	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan dalam 1 tahun	3	3	100,00%	Sangat mendukung
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan yang disusun dalam 1 tahun	40	40	100,00%	Sangat mendukung
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun dalam 1 tahun	111	111	100,00%	Sangat mendukung
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase sarana penunjang pegawai yang tersedia***	**100%**	**100,00%**	**100,00%**	Sangat mendukung
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan/ dibeli	0	0	0,00%	Kurang Mendukung
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100,00%**	**100,00%**	Sangat mendukung
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi pemeliharaan jaringan listrik dalam 1 tahun (kali)	2	2	100,00%	Sangat mendukung
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dalam 1 tahun	3	3	100,00%	Sangat mendukung
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi pembelian peralatan rumah tangga dalam 1 tahun (kali)	11	7	63,64%	Cukup mendukung
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis barang / bahan yang tersedia /di adakan dalam 1 tahun	14	14	100,00%	Sangat Mendukung
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan	7	5	71,43%	Cukup mendukung
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu dalam 1 tahun	12	12	100,00%	Sangat Mendukung
Penyediaan Jasa	**Cakupan pelaksanaan**	**100%**	**100%**	**100,00%**	Sangat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			Kategori Dukungan
		Target	Realisasi	Capaian	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				mendukung
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi kegiatan pelayanan surat menyurat dalam 1 tahun (kali)	12	0	0,00%	Kurang mendukung
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekruensi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam 1 tahun (kali)	12	3	25,00%	Kurang mendukung
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi pemeliharaan alat kantor dalam 1 tahun (kali)	6	2	33,33%	Kurang mendukung
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi kegiatan pelayanan umum kantor dalam 1 tahun (kali)	12	6	50,00%	Kurang mendukung
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Cakupan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***100%***	***100%***	***100,00%***	Sangat Mendukung
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Seluruh kendaraan operasional terbayarkan pajaknya dalam 1 tahun	10	10	100,00%	Sangat Mendukung
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Seluruh kendaraan operasional mendapatkan pemeliharaan dan siap dipakai dalam 1 tahun	10	10	100,00%	Sangat Mendukung
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Seluruh alat kantor yang tidak dalam kondisi rusak berat berada dalam kondisi baik dan siap dipakai dalam 1 tahun (kali)	10	10	100,00%	Sangat Mendukung
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/ rehabilitasi	1	1	100,00%	Sangat Mendukung
Peningkatan Pelayanan BLUD	***Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan***	**100%**	**100%**	**100,00%**	Sangat Mendukung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			Kategori Dukungan
		Target	Realisasi	Capaian	
	penunjang pelayanan BLUD				
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dan BOK Puskesmas	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan BLUD dan BOK	37	37	100,00%	Sangat Mendukung
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase Kecamatan STBM**	**8%**	**3%**	**37,50%**	Kurang Mendukung
	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi	**92%**	**90,7%**	**98,59%**	Mendukung
	Indeks Keluarga Sehat	**0**	**0,00**	**0,00%**	Kurang mendukung
	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) terakreditasi	**93,75%**	**100,0%**	**106,67%**	Sangat Mendukung
	Persentase Nakestrad dan Hattra yang memiliki izin	**23%**	**62,9%**	**237,48%**	Sangat Mendukung
	AKI	**79,23**	**72,61**	**108,36%**	Sangat Mendukung
	AKB	**6,70**	**4,03**	**139,85%**	Sangat mendukung
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan**	**100%**	**100%**	**100,00%**	Sangat Mendukung
Pembangunan puskesmas	Jumlah Puskesmas Yang Dibangun	3	3	100,00%	Sangat Mendukung
Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	1	4	400,00%	Sangat Mendukung
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	2	4	200,00%	Sangat Mendukung
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang	8	8	100,00%	Sangat Mendukung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			Kategori Dukungan
		Target	Realisasi	Capaian	
Fasilitas Pelayanan Kesehatan	disediakan				
Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai/BMHP, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	Persentase Pengadaan obat dengan tingkat aman	95%	98,61%	103,80%	Sangat Mendukung
	Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	86%	119%	138,37%	Sangat mendukung
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas kesehatan yang terpelihara sesuai standar	150	305	203,33%	Sangat Mendukung
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh TenagaKesehatan Puskesmas	0	0	0	Kurang Mendukung
Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makmin ke puskesmas serta faskes lainnya	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke fasilitas kesehatan	37	37	100,00%	Sangat Mendukung
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah (Cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap)**	**100%**	**100%**	**100,00%**	Sangat Mendukung
	Persentase Puskesmas Dengan Kelulusan Akreditasi Minimal Utama	**100%**	**100%**	**100,00%**	Sangat Mendukung
	Persentase tenaga kesehatan tradisional yang dibina	**100%**	**100%**	**100,00%**	Sangat Mendukung
	Persentase penyehat tradisional yang dibina	**33%**	**63,30%**	**191,82%**	Sangat Mendukung
	Persentase desa yang terbentuk Asman TOGA	**28%**	**29,30%**	**104,64%**	Sangat Mendukung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			Kategori Dukungan
		Target	Realisasi	Capaian	
	Persentase puskesmas yang melaksanakan pembinaan yankestrad	**100%**	**100%**	**100,00%**	Sangat Mendukung
	Persentase akses sanitasi layak	**90%**	**97,34%**	**108,16%**	Sangat Mendukung
	Jumlah tingkatan tatanan dalam kabupaten sehat	**9**	**9**	**100,00%**	Sangat Mendukung
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan ibu hamil dilayani sesuai standart (K4)	100%	95,85%	95,85%	Mendukung
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16746	15376	91,82%	Mendukung
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan ibu bersalin dilayani sesuai standar	100%	94,13%	94,13%	Mendukung
	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16043	15101	94,13%	Mendukung
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Bayi Baru Lahir dilayani sesuai standart (KN2)	100%	92,93%	92,93%	Mendukung
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16077	14940	92,93%	Mendukung
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Balita dilayani sesuai standart	100%	93,13%	93,13%	Mendukung
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	94002	87546	93,13%	Mendukung
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai standar	100%	99,06%	99,06%	Mendukung
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	210992	209000	99,06%	Mendukung
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	93,10%	93,10%	Mendukung
	Persentase Desa Yang	100%	100%	100,00%	Sangat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			Kategori Dukungan
		Target	Realisasi	Capaian	
	Melaksanakan Posbindu				Mendukung
	Persentase Sekolah yang Melaksanakan KTR	100%	78,3%	78,3%	Mendukung
	Persentase Wanita Usia Subur yang melakukan deteksi dini penyakit Kanker payudara dan kanker leher rahim pada usia 30 sd 50 tahun	60%	35,5%	59,17%	Kurang Mendukung
	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1081201	1006990	93,14%	Mendukung
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Sesuai standar	100%	100%	100,00%	Sangat Mendukung
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	223.156	223.156	100,00%	Sangat Mendukung
Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi dilayani sesuai standar	100%	93,56%	93,56%	Mendukung
	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	107661	100727	93,56%	Mendukung
Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	Persentase penderita DM dilayani sesuai standar	100%	95,77%	95,77%	Mendukung
	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36336	34799	95,77%	Mendukung
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	101,93%	101,93%	Sangat Mendukung
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	3531	3599	101,93%	Sangat Mendukung
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	101,05%	101,05%	Sangat Mendukung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			Kategori Dukungan
		Target	Realisasi	Capaian	
	Persentase penemuan dan penanganan kasus TB	65%	74,91%	115,25%	Sangat Mendukung
	Persentase keberhasilan pengobatan TB	90%	88%	97,78%	Mendukung
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	18451	18645	101,05%	Sangat Mendukung
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	111%	111,00%	Sangat Mendukung
	Persentase Orang dengan HIV yang mendapatkan ARV	90%	72,80%	80,89%	Cukup Mendukung
	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	31570	31361	99,34%	Mendukung
Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB	Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi KLB	100%	100%	100,00%	Sangat Mendukung
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12	12	100,00%	Sangat Mendukung
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan Atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana	12	12	100,00%	Sangat Mendukung
Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat	Cakupan Pemberian Vit A	91%	93,38%	102,62%	Sangat Mendukung
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	18,80%	8,04%	157,23%	Sangat Mendukung
	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	9%	4,78%	146,89%	Sangat Mendukung
	Prevalensi anemia pada ibu hamil	26%	10,29%	160,42%	Sangat Mendukung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			Kategori Dukungan
		Target	Realisasi	Capaian	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	20	20	100,00%	Sangat Mendukung
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Pos UKK yang terbentuk	52	54	103,85%	Sangat Mendukung
	Persentase jumlah jamaah haji yang diukur kebugaran jasmaninya	100%	100%	100,00%	Sangat Mendukung
	Persentase Tempat Kerja Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja	10%	10,00%	100,00%	Sangat Mendukung
	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan olahraga	37	37	100,00%	Sangat Mendukung
	Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja	37	37	100,00%	Sangat Mendukung
	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Melaksanakan Aktifitas Fisik	30%	80%	266,67%	Sangat Mendukung
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1	100,00%	Sangat Mendukung
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Tempat Pengelolaan pangan yang memenuhi syarat sesuai standar	78%	89,87%	115,22%	Sangat Mendukung
	Persentase desa ODF	100%	100,00%	100,00%	Sangat Mendukung
	Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa kualitas airnya	87%	91,2%	104,83%	Sangat Mendukung
	Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis	100%	100,00%	100,00%	Sangat Mendukung
	Persentase Tempat-tempat umum yang dilakukan pengawasan sesuai standar	90,00%	90,00%	100,00%	Sangat Mendukung
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	1	1	100,00%	Sangat Mendukung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			Kategori Dukungan
		Target	Realisasi	Capaian	
	Kesehatan Lingkungan				
Pengelolaan Pelayanan Promsosi Kesehatan	Jumlah puskesmas yang melakukan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	3	3	100,00%	Sangat Mendukung
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tardisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah tenaga kesehatan tradisional yang dibina	6	7	116,67%	Sangat Mendukung
	Jumlah penyehat tradisional yang dibina	474	636	134,18%	Sangat Mendukung
	Jumlah desa yang terbentuk Asman TOGA	82	101	123,17%	Sangat Mendukung
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pembinaan yankestrad	37	37	100,00%	Sangat Mendukung
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	1	100,00%	Sangat Mendukung
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Presentase KLB yang ditanggulangi ≤ 24 jam	100%	100,00%	100,00%	Sangat Mendukung
	Penemuan kasus Non AFP	14	25	178,57%	Sangat Mendukung
	Penemuan kasus suspect campak	64	138	215,63%	Sangat Mendukung
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12	12	100,00%	Sangat Mendukung
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase ODGJ ditangani sesuai standart	-	-	-	-
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8	8	100,00%	Sangat Mendukung
	Persentase Penemuan Kusta Pada Anak	< 5	5	100,00%	Sangat Mendukung
	Persentase Cacat Pada Kasus Kusta Baru	< 5	5	100,00%	Sangat Mendukung
	Persentase Penderita Kusta	100%	95,50%	95,50%	Mendukung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			Kategori Dukungan
		Target	Realisasi	Capaian	
	RFT-MB				
	Persentase Penderita Kusta RDT-PB	100%	100,00%	100,00%	Sangat Mendukung
	Persentase Cakupan Tatalaksana Pneumonia Balita	60%	48,03	80,05%	Cukup Mendukung
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana Diare sesuai standar	80%	78,38%	97,98%	Mendukung
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan advokasi dan / sosialisasi Pengendalian PISP	75%	75.00%	100,00%	Sangat Mendukung
	Persentase Puskesmas yang mempunyai Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA)	90%	90,00%	100,00%	Sangat Mendukung
	Persentase Kasus Diare pada semua umur ditangani sesuai standar	80%	63,13%	78,91%	Cukup Mendukung
	Persentase Kasus Diare pada Balita ditangani sesuai standar	80%	65,62%	82,03%	Cukup Mendukung
	Persentase Bumil dilakukan (DDHB) Deteksi Dini Hepatitis B	100%	48%	55,00%	Kurang Mendukung
	Persentase bayi lahir dari Ibu reaktif HBsAg mendapat HBIg < 24 jam	100%	100,00%	100,00%	Sangat Mendukung
	Persentase bayi usia 9-12 bulan yang mendapat HBIg di test HBsAg hasilnya Non Reaktif	100%	100,00%	100,00%	Sangat Mendukung
	Persentase kasus DBD ditangani sesuai standar	100%	100,00%	100,00%	Sangat Mendukung
	Persentase Angka Bebas Jentik (ABJ)	80%	83,00%	103,75%	Sangat Mendukung
	Persentase anak usia 1-12 Tahun mendapatkan obat Cacing	100%	99%	99,00%	Mendukung
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk dalam data base yang memiliki	98,00%	98,44%	100,45%	Sangat Mendukung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			Kategori Dukungan
		Target	Realisasi	Capaian	
	jaminan kesehatan				
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4	4	100,00%	Sangat Mendukung
Pengambilan dan Pengiriman spesimen penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Presentase pengambilan dan pengiriman spesimen ≤ 24 jam ke laboratorium pemeriksa	100%	100%	100,00%	Sangat Mendukung
	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	2	2	100,00%	Sangat Mendukung
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kecamatan sehat	26	26	100,00%	Sangat Mendukung
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	1	100,00%	Sangat Mendukung
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	37	37	100,00%	Sangat Mendukung
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	341	96	28,15	Kurang Mendukung
	Presentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	95%	111,68%	117,56%	Sangat Mendukung
	Persentase anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan Campak dan Rubella	95%	114,53%	120,56%	Sangat Mendukung
	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12	12	100%	Sangat Mendukung
Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Presentase pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	100,0%	100,00%	100,00%	Sangat Mendukung
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12	12	100,0%	Sangat Mendukung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			Kategori Dukungan
		Target	Realisasi	Capaian	
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	1	100,00%	Sangat Mendukung
Pengelolaan Pelayanan Malaria	Jumlah dokumen pengelolaan pelayanan malaria	1	1	100,00%	Sangat Mendukung
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12	12	100,00%	Sangat Mendukung
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	***Tingkat ketersediaan sistem informasi kesehatan***	37	37	100,00%	Sangat Mendukung
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah LAN yang terpelihara dan puskesmas yang menggunakan simpus dan e-SPM	38	38	100,00%	Sangat Mendukung
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	1	100,00%	Sangat Mendukung
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Persentase Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan***	**100%**	**100%**	**100,00%**	Sangat Mendukung
	Persentase Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥ 89%)	**100,0%**	**0%**	**0,00%**	Kurang Mendukung
	Jumlah keluarga yang mendapat intervensi sesuai hasil survey KS	**-**	**-**	**-**	-
	Persentase Klinik Pratama yg terakreditasi	**92%**	**90,7**	**98,59%**	Mendukung
	Persentase RS yang terakreditasi paripurna	**90,9%**	**90,9%**	**100,00%**	Sangat Mendukung
	Persentase Klinik Utama yang terakreditasi	**80%**	**100%**	**125,00%**	Sangat Mendukung
	Persentase lab Madya yang terakreditasi	**-**	**-**	**-**	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			Kategori Dukungan
		Target	Realisasi	Capaian	
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥ 89%)	37	0	0	Kurang Mendukung
	Jumlah keluarga yang mendapat intervensi sesuai hasil survey KS	-	-	-	-
	Jumlah Klinik Pratama yg terakreditasi	58	51	87,93%	Cukup Mendukung
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	100	139	139,00	
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	3	3	100,00	Sangat Mendukung
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan**	**100%**	**100%**	**100,00%**	Sangat Mendukung
Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di kabupaten / kota	**Jumlah ijin praktik yang diterbitkan setelah memenuhi persyaratan**	**1200**	**1450**	**120,83%**	Sangat Mendukung
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui faskes dan organisasi profesi	1	1	100,00%	Sangat Mendukung
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Tersedianya perencanaan SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Pemerintah**	100%	100%	100,00%	Sangat Mendukung
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya dokumen penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK di Faskes Pemerintahan	1	0	0,00	Kurang Mendukung
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan SDMK di Faskes	1	1	100,00%	Sangat Mendukung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			Kategori Dukungan
		Target	Realisasi	Capaian	
	Pemerintahan				
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Persentase ASN Yang Dikembangkan Kompetensinya***	100%	99,52%	99,52%	Mendukung
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi setiap tahun	60	209	348,33%	Sangat Mendukung
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**Prosentase Pemberian Rekomendasi Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan UMOT**	75%	76,25%	101,67%	Sangat Mendukung
	Prosentase Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Bersertifikat	100%	100%	100,00%	Sangat Mendukung
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, UMOT	**Jumlah rekomendasi Apotek, TO, Tk Alkes dan Optikal UMOT yang diterbitkan**	20	61	305,00%	Sangat Mendukung
	Persentase Apotek,Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, UMOT yang dibina dan diawasi	35%	68,23%	194,94%	Cukup Mendukung
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah rekomendasi Apotek, TO, toko alkes, dan optikal , UMOT yang memenuhi persyaratan	20	61	305,00%	Sangat Mendukung
	Jumlah apotek, TO, toko alkes, dan optikal , UMOT yang dibina dan diawasi	53	228	430,19%	Sangat Mendukung
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain : Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum	**Presentase TPM yang ber SLHS**	**80%**	**1,19%**	**1,49%**	Kurang Mendukung
Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain :	1	1	100,00%	Sangat Mendukung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			Kategori Dukungan
		Target	Realisasi	Capaian	
penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum yang diterbitkan				
Penerbitan Stiker Pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Persentase Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				
Pengendalian dan Pengawasan serta TindakLanjut penerbitan Stiker pembinaan pada makanan Jajanan dan Sentra makanan jajanan	Jumlah stikerisasi pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	200	197	98,50%	Mendukung
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Prosentase pemeriksaan produksi makanan minuman industri rumah tangga**	4,28%	9,28%	216,82%	Sangat Mendukung
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase produsen industri rumah tangga yang dibina dan diawasi	100%	83,33%	83,33%	Cukup Mendukung
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)	69%	95,75%	138,77%	Sangat Mendukung
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Frekuensi kegiatan tim pokjanal tk. Kabupaten, kecamatan dan desa dalam satu tahun**	2	2	100,00%	Sangat Mendukung
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah lintas sektor/ organisasi masyarakat/ organisasi profesi/ dunia usaha yang bermitra dengan UKBM	2	2	100,00%	Sangat Mendukung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			Kategori Dukungan
		Target	Realisasi	Capaian	
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah media KIE yang digunakan dalam satu tahun**	1	1	100,00%	Sangat Mendukung
Peningkatan upaya promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Jumlah tema KIE program prioritas yang dipromosikan melalui media	3	3	100,00%	Sangat Mendukung
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tingkat partisipasi kesehatan masyarakat skala desa**	**100%**	**100%**	**100,00%**	Sangat Mendukung
	Cakupan promosi kesehatan tingkat desa	**100%**	**100,00%**	**100,00%**	Sangat Mendukung
	Cakupan kelompok kesehatan masyarakat yang dibina	**100%**	**100,00%**	**100,00%**	Sangat Mendukung
	Persentase Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	**89%**	**95,75%**	**107,58%**	Sangat Mendukung
	Persentase poskesdes purnama mandiri (PURI)	**21%**	**0%**	**0%**	Kurang Mendukung
	Persentase poskestren purnama mandiri (PURI)	**65%**	**35,14%**	**54,06%**	Kurang Mendukung
	Persentase saka Bhakti Husada (SBH) purnama Mandiri (PURI)	**32%**	**32%**	**100,00%**	Sangat Mendukung
	Persentase desa-kelurahan siaga aktif	**21%**	**43,6%**	**207,62%**	Sangat Mendukung
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Frekuensi bimbingan teknis dan supervisi UKBM yang dilakukan selama satu tahun	4	4	100,00%	Sangat Mendukung

Data diatas, akan dijadikan rujukan dalam pelaksanaan kinerja tahun berikutnya untuk mengetahui Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan yang sangat menunjang, menunjang, cukup menunjang, dan kurang menunjang untuk dioptimalkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi

3.2.1 Pelaksanaan Kinerja Organisasi

Pelaksanaan Kinerja Organisasi disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dilaksanakan dengan narasi-narasi atas apa yang dilaksanakan selama satu tahun ini. Berikut adalah upaya-upaya pelaksanaan kinerja organisasi seperti berikut;

1. Upaya Tindak Lanjut atas Rencana Tindak Lanjut tahun sebelumnya

Tabel 3.2.1. a Upaya Tindak Lanjut atas Rencana Tindak Lanjut Tahun sebelumnya;

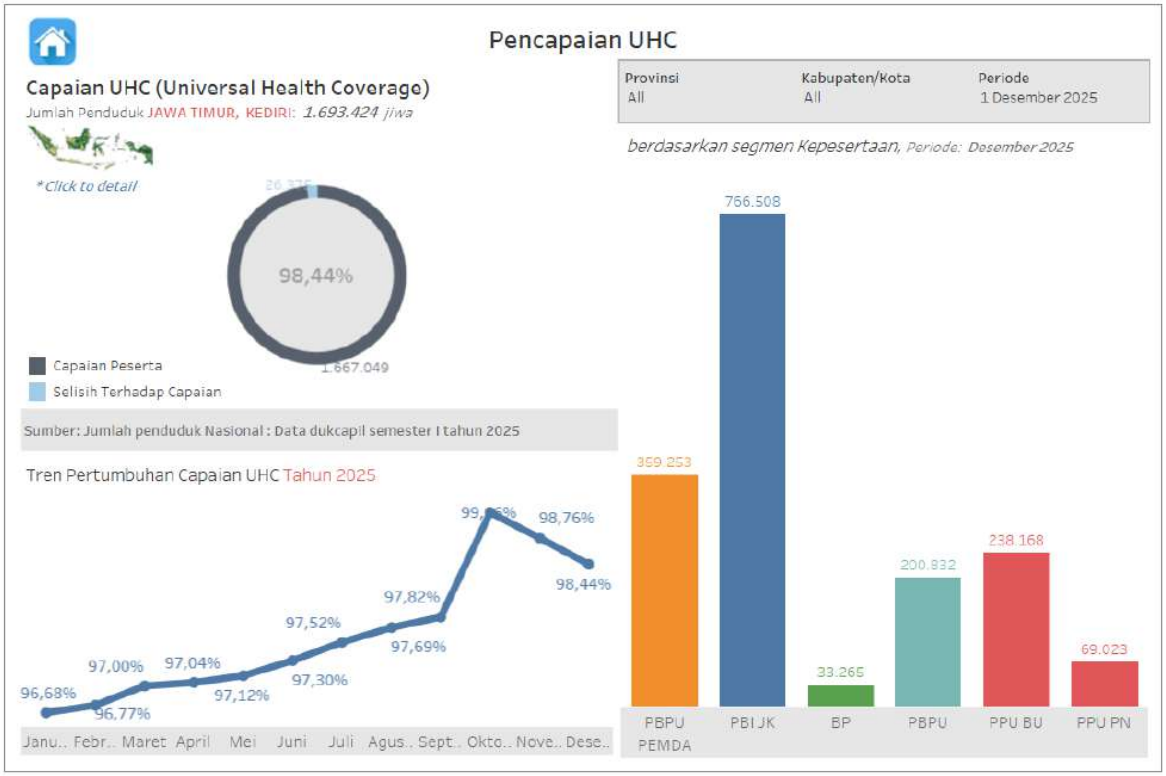
Rencana Tindak Lanjut Tahun sebelumnya	Upaya yang telah dilaksanakan
Dokumen laporan kinerja yang telah direviu secara berjenjang agar dikirimkan ke bagian organisasi tepat waktu di dukung dengan bukti reviu berupa notulen, berita acara atau dokumen sejenis.	Diselesaikan tepat waktu, terlampir
Informasi dalam LKjIP Dinas Kesehatan agar digunakan sebagai bagian dari perubahan Budaya Kinerja Organisasi	Telah disusun Rencana Aksi Internalisasi Budaya Kerja berakhlak Dinas Kesehatan Tahun 2026

2. Pelaksanaan Kinerja Organisasi

a. Sasaran Strategis 1 : Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan

Desember 2025 sesuai data dari Dashbord BPJS capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Kediri sebesar 98,44% dimana dari total penduduk Kabupaten Kediri 1.693.424 jiwa capain peserta UHC sebanyak 1.667.049 jiwa, dengan segmen kepesertaan PBJK sebanyak 766.508 jiwa, PBID 359.253, BP sebanyak 33.265 jiwa, PBPU sebanyak 200.832 jiwa, PPU BU sebanyak 238.168 jiwa dan PPU PN sebanyak 69.023 Jiwa.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 143.288.152.000,00

b. Sasaran Strategis 2 : Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama

Fasilitas Kesehatan Pemerintah yang ada di Kabupaten Kediri sebanyak 39 Faskes yang terdiri atas 37 Puskesmas dan 2 RSUD (RSUD Kabupaten Kediri dan RSUD Simpang Lima Gumul). Sampai dengan akhir tahun 2025 semua faskes pemerintah telah terakreditasi dengan status Paripurna seperti dijelaskan dalam tabel di pembahasan sebelumnya.

Dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan ini didukung oleh Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan beserta semua kegiatan dan sub kegiatan di dalamnya di luar sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan dengan total alokasi anggaran Rp. 39.654.075.279,00

Upaya peningkatan mutu fasilitas kesehatan pemerintah terutama fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dilaksanakan tahun 2025 antara lain :

b.1. Pemenuhan sarana dan prasarana, mutu layanan sesuai standar, dan tenaga kesehatan yang sesuai standar :

- Belanja jasa kalibrasi untuk peralatan di Puskesmas dan UPT Labkesda
- Mengikuti pemantapan mutu eksternal (PME) untuk pemeriksaan laboratorium di UPT Labkesda yang diselenggarakan oleh BBLABKESMAS Surabaya.
- Pengadaan BMHP dan raegen untuk alat automatic analizer,hematologi analizer,urine analizer
- Rehabilitasi dan pembangunan gedung Puskesmas Pagu
- Pembangunan Gedung Puskesmas Ngadi dan Pranggang (relokasi)
- Pembangunan pagar dan pavingisasi Puskesmas Adan-Adan, pembangunan ruang pertemuan Puskesmas Silir
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Pembantu Langenharjo, Pagung, sidomulyo dan Jabon
- Pengadaan genset untuk Puskesmas Adan-Adan dan Tarokan
- Pemenuhan BMHP TB berupa cartidride TCM sebanyak 11.150 pieces untuk s 8 Faskes yang ada mesin TCM (RSKK, RS SLG, Pkm Mojo, Tiron, Ngadiluwih, wates, Tanon, Keling).
- Pengadaan RDT HIV-Sifilis untuk ibu hamil sebanyak 434 box
- Swab, vacuneedle, plesterin, handgloves, tuberkulin, alcohol swab, dan pot sputum
- Pengadaan alat fotometer sejumlah 8 (delapan) unit sebagai alat penunjang indikator deteksi dini stroke, yang dialokasikan untuk Puskesmas Kandangan,pare, bendo, Adan-Adan, Plosoklaten, Keling, Ngadiluwih, Purwoasri.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Pengadaan BMHP Reagen Strip Gula Darah (Strip Gula Darah, Alkohol Swab, Blood Lancet) sebagai penunjang tercapainya indikator SPM usia produktif 15 – 59 tahun, yang dialokasikan pada 37 Puskesmas. SPM Diabetes Mellitus untuk Usia mulai dari 15 tahun ke atas x prevalensi DM berdasarkan diagnosa dokter (2,7%).
- Pengadaan BMHP Reagen profil Lipid dan penunjangnya (Reagen HDL, Reagen Cholesterol Total, Reagen Trygliserida, Bahan Kontrol, Alkohol swab, Jarum Vacutainer, Tabung Vacutainer, Plester, Yellow Tip) sebagai BMHP penunjang tercapainya indikator deteksi dini Penyakit stroke bagi penderita Hipertensi dan Diabetes Mellitus mulai usia 40 tahun keatas yang dialokasikan pada 31 Puskesmas yang memiliki alat Fotometer.
- Pengadaan BMHP Kertas EKG dan Gel EKG (Kertas EKG dan Gel EKG) sebagai BMHP penunjang tercapainya indikator deteksi dini penyakit Jantung bagi penderita Hipertensi dan Diabetes Mellitus usia mulai dari 40 tahun keatas, yang dialokasikan pada 20 puskesmas yang memiliki alat EKG masih berfungsi baik.
- Pengadaan BMHP HPV DNA (Collecting Kit, Reagen PCR, Reagen Ekstraksi, Yellow Tip, Blue Tip, White Tip) sebagai penunjang tercapainya deteksi dini kanker servik (mulut rahim), yang dialokasikan untuk sasaran Wanita Usia Subur 30 sampai 69 tahun pada 37 puskesmas.
- Pemenuhan alat kesehatan Puskesmas, pustu dan posyandu dari hibah Kemenkes RI melalui proyek SOPHI (*Strengthening of Primary Health Care in Indonesia*).
- Pemenuhan alat kesehatan di labkesmas dari hibah Kemenkes RI melalui proyek InPULS *(Indonesia Public Health Laboratory System Strengthening)*
- Peningkatan mutu pelayanan di fasyankes secara internal melalui pengukuran dan pelaporan indikator mutu (INM).
- Peningkatan mutu pelayanan di fasyankes secara eksternal melalui akreditasi yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara akreditasi independen yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- *Universal Health Coverage* (UHC) untuk menjamin masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu baik di FKTP maupun FKRTL tanpa ada kendala biaya.

b.2 Meningkatkan Mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai standard :

- Memfasilitasi peningkatan kompetensi (melalui Pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi lainnya) bagi SDMK di lingkungan Dinas Kesehatan
- Meningkatkan Mutu sumber daya manusia kesehatan melalui Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi Bagi Bidan dan Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan memberangkatkan 5 dokter dan 27 bidan ke Latkesmas Murnajati Kampus Surabaya
- Meningkatkan Mutu sumber daya manusia kesehatan melalui Pelatihan Pelayanan ANC dan Penggunaan USG Dasar Obstetri Terbatas melalui Blended Learning dengan memberangkatkan 36 dokter dan OJT di RS SLG dan RSKK
- Meningkatkan Mutu sumber daya manusia kesehatan melalui Pelatihan Konseling Menyusui (End User) dengan memberangkatkan 6 dokter, 11 nutrisionis dan 23 bidan di UPT Latkesmas Murnajati Kampus Malang
- Training of Trainer (TOT) Deteksi Dini Penyakit Gigi dan Mulut Angkatan III dengan memberangkatkan 1 dokter gigi Puskesmas Wates dan 1 orang pemegang program Kesehatan Gigi dan Mulut Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri ke Hotel Avenzel Jl. Raya Kranggan No.69 Jatisampurna Cibubur Kota Bekasi, Jabar yang didanai oleh Project SOPHI/DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Tahun 2025
- Pelatihan Deteksi Dini Penyakit Gigi dan Mulut Bagi Dokter Gigi dan Terapis Gigi dan Mulut Angkatan 1 dengan memberangkatkan 5 dokter gigi Puskesmas dan 5 Terapis Gigi dan Mulut Puskesmas di UPT Latkesmas Murnajati Kampus Malang yang didanai oleh DPA UPT Latkesmas Murnajati kerjasama dengan SOPHI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Seminar Manajemen Mutu dalam Perspektif Puskesmas ILP dan PMK 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas yang diikuti oleh 15 Puskesmas dan pemegang program Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri yang diselenggarakan oleh UPT Latkesmas Murnajati Malang.
- *In House Training* (IHT) Peningkatan Kapasitas Manajerial Bagi Kepala Puskesmas dan Pejabat Administrator/ Pengawas/ Ketua Tim Kerja Dinas Kesehatan yang diikuti oleh 67 peserta.
- Melaksanakan kredensial tenaga medis dan tenaga kesehatan di Puskesmas.
- Pengelolaan data tenaga medis dan tenaga kesehatan di wilayah kabupaten kediri melalui SISDMK.
- Monitoring dan evaluasi SISDMK, binwas SDMK dan sosialisasi aplikasi Kesatu untuk perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasyankes.
- Penerbitan SIP/SIK secara elektronik melalui aplikasi Kesatu yang terintegrasi dengan MPP (Mall Pelayanan Publik).

3.2.2 Analisis Keterlibatan Pihak Lain

Pihak yang terlibat dalam menunjang pencapaian kinerja dapat dipetakan sebagai berikut;

Sasaran : Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat

Indikator : Persentase Masyarakat Yang Memiliki Jaminan Kesehatan

1. **Pihak Internal Pemerintah Kabupaten Kediri**
   a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri memastikan perencanaan pengganggaran untuk pembayaran iuran dan bantuan iuran penduduk yang didaftarkan Pemda.
   b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri mendukung kelancaran pembayaran iuran kepesertaan PPU Penyelenggara Negara serta menjaga kesinambungan pendanaan program JKN.
   c. Dinas Sosial Kabupaten Kediri berperan dalam proses verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas memverifikasi data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)
e. Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri berperan dalam memastikan peserta didik dan pendidik merupakan peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional.
f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Kediri mendorong desa untuk melakukan verifikasi dan validasi data penduduk yang diusulkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mendorong penggunaan dana desa untuk optimalisasi program JKN bagi aparat desa dan keluarganya.
g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan mendukung program JKN dalam proses perijinan melalui sistem OSS dengan cara menjadikan kepesertaan JKN aktif menjadi salah satu syarat pengurusan perijinan.
h. Kantor Kementerian Agama Kediri memastikan peserta didik dan pendidik di lingkungan Kemenag sebagai peserta aktif program JKN dan mensyaratkan calon Jemaah umrah dan haji menjadi peserta aktif program JKN
i. Kepolisian Resort Kediri memastikan regulasi pemohon Surat Ijin Mengemudi (SIM) adalah peserta aktif Program JKN serta mendukung penindakan hukum bagi pemberi kerja yang belum patuh membayarkan iuran program JKN bagi pekerjanya.
j. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pemberi kerja dalam program JKN
k. Puskesmas mendukung dalam pemberian pelayanan kesehatan dasar/tingkat pertama yang bermutu.
l. Rumah Sakit mendukung dalam pemberian pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut yang bermutu.

2. Pihak Instansi Vertikal

a. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat memperoleh layanan kesehatan yang layak, terjangkau, dan berkualitas melalui penyusunan kebijakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kesehatan, menyediakan regulasi dan standarisasi pelayanan kesehatan, pembinaan serta pengawasan.

b. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melakukan pembinaan dan pengawasan serta memastikan bahwa Program JKN berjalan dengan baik.

3. Stakeholder, Pihak swasta dan Masyarakat

a. DPRD Kabupaten Kediri mendukung pelaksanaan program JKN mulai dari penyusunan regulasi, pengalokasian anggaran, pematauan dan evaluasi serta sosialisasi dan edukasi.

b. BPJS Kesehatan bertugas menyelenggarakan program JKN dengan memastikan peserta JKN mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas.

c. Organisasi Masyarakat mendukung keberhasilan program JKN, baik dalam hal sosialisasi, pelaksanaan, maupun pemantauan, untuk memastikan bahwa program ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat

Sasaran : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat

Indikator : Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal UTAMA

1. Pihak Internal Pemerintah Kabupaten Kediri

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri memastikan perencanaan pengganggaran kegiatan yang mendukung pemenuhan pelayanan Kesehatan yang bermutu dan sesuai standar.

b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri mendukung kelancaran kegiatan dalam hal penyediaan pendanaan.

c. Rumah Sakit mulai dari pemimpin/direktur sampai dengan seluruh staf berkomitmen untuk menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjut sesuai dengan standar, lebih mengutamakan kesehatan, keselamatan, keamanan dan kepuasan pasien keluarga pasien serta karyawan.

d. Puskesmas mulai dari pemimpin sampai dengan seluruh staf berkomitmen untuk menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dengan standar, lebih mengutamakan kesehatan, keselamatan, keamanan dan kepuasan pasien keluarga pasien serta karyawan

2. Pihak Instansi Vertikal

a. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat memperoleh layanan kesehatan yang layak, terjangkau, dan berkualitas melalui penyusunan kebijakan kesehatan, menyediakan regulasi dan standarisasi pelayanan kesehatan, pembinaan serta pengawasan.

b. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melakukan pembinaan dan pengawasan serta memastikan bahwa kegiatan akreditasi di FKTP dan FKRTL berjalan dengan baik

3. Stakeholder, Pihak swasta dan Masyarakat

a. DPRD Kabupaten Kediri mendukung pelaksanaan kegiatan akreditasi fasyankes mulai dari penyusunan regulasi, pengalokasian anggaran, pemataauan dan evaluasi serta sosialisasi dan edukasi

b. ASKLIN berperan dalam kegiatan akreditasi dalam hal penyusunan standar pelayanan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap FKTP yang tergabung dalam keanggotaan ASKLIN.

c. PERSI berperan dalam kegiatan akreditasi dalam hal penyusunan standar pelayanan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap FKRTL yang tergabung dalam keanggotaan PERSI.

d. Lembaga Penyelenggara Akreditasi (LPA) Fasyankes berperan dalam memberikan penilaian dan pengakuan serta rekomendasi terhadap kualitas dan kinerja fasyankes yang sesuai standar baik fasyankes tingkat pertama maupun tingkat lanjut.

3.2.3 Analisis Faktor Pendukung

Berikut adalah beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja;

1. Sasaran 1 : Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Kebijakan dan regulasi Pemerintah Kabupaten Kediri yang mendukung penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau, merata, dan berkualitas melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai dari perencanaan, pemenuhan anggaran, pelaksanaan hingga pengawasan.
b. Infrastruktur kesehatan pemberi layanan Kesehatan yang sesuai standar serta terjangkau baik fasyankes tingkat pertama maupun tingkat lanjut di Kabupaten Kediri.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat

a. Sumber daya manusia kesehatan di Kabupaten Kediri yang meskipun belum sesuai dengan rencana kebutuhan akan tetapi secara bertahap dipenuhi jumlah, jenis serta kualitas/kompetensinya agar bisa mendukung pelayanan profesional berkualitas.
b. Infrastruktur kesehatan baik sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar secara bertahap dipenuhi ketersediaanya baik di puskesmas maupun rumah sakit menggunakan sumber dana APBD, APBN maupun BLUD agar mendukung pelayanan.
c. Sistem informasi kesehatan terintegrasi yang bertujuan memastikan bahwa semua data kesehatan dapat diakses dan dikelola dengan mudah, cepat, dan akurat oleh berbagai pihak yang terlibat, seperti tenaga medis, pasien, penyedia layanan kesehatan, dan pengelola sistem kesehatan. Saat ini semua puskesmas dan rumah sakit telah mengimplementasikan Rekam Medis Elektronik.
d. Komitmen semua pihak baik pemerintah maupun swasta sangat diperlukan guna keberhasilan dan keberlanjutan program JKN di Kabupaten Kediri.

3.2.4 Analisis Faktor Penghambat

Berikut adalah beberapa hal yang menghambat pencapaian kinerja;

1. Sasaran 1 : Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat

a. Rujukan pasien dari wilayah barat sungai masih banyak yang masuk ke rumah sakit di luar wilayah Kabupaten Kediri, hal ini karena aksesnya yang lebih dekat dan lebih mudah dijangkau

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Semakin banyaknya sektor swasta yang berminat untuk mengembangkan bisnis di bidang pelayanan kesehatan rujukan (pendirian klinik utama dan rumah sakit baru
c. Masalah komunikasi dan informasi (SISRUTE) Sistem Rujukan Terintegrasi yang belum dimanfaatkan maksimal. Pasien dirujuk tanpa kepastian (kamar penuh) sehingga terjadi penolakan pasien
d. Masih ada pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh JKN yang memerlukan perhatian dari Pemerintah Daerah, contohnya sakit akibat kecelakaan kerja, sakit akibat adanya tindakan kekerasan/penganiayaan dan sakit akibat adanya bencana/kejadian luar biasa/wabah
e. Belum optimalnya capaian segmen kepesertaan non PBI (Penerima Bantuan Iuran) misalnya segmen PBPU mandiri, PPU Badan Usaha, PPU Penyelenggara Negara dan segmen Bukan Pekerja (BP).
f. Tingkat ketidak aktifan peserta yang masih cukup tinggi disebabkan antara lain karena : banyak peserta segmen PBPU mandiri yang menunggak, adanya PHK peserta PPU Badan Usaha serta data kependudukan yang tidak valid.
g. Belum optimalnya capaian segmen kepesertaan non PBI (Penerima Bantuan Iuran) misalnya segmen PBPU mandiri, PPU Badan Usaha, PPU Penyelenggara Negara dan segmen Bukan Pekerja (BP).
h. Tingkat ketidak aktifan peserta yang masih cukup tinggi disebabkan antara lain karena : banyak peserta segmen PBPU mandiri yang menunggak, adanya PHK peserta PPU Badan Usaha serta data kependudukan yang tidak valid.
i. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan *updating* data kependudukan seperti data kelahiran baru, kematian, pindah domisili datang dan keluar wilayah Kabupaten Kediri menyebabkan tingginya angka penonaktifan kepesertaan JKN

2. Sasaran 2 : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat

a. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu masih belum terintegrasi dengan Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah.
b. Kegiatan pengembangan kompetensi SDM masih sangat diperlukan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Perubahan regulasi terhadap standar pemenuhan kebutuhan SDMK di Puskesmas dan RS menyebabkan adanya penyesuaian perhitungan di aplikasi perencanaan kebutuhan sehingga aplikasi perencanaan kebutuhan Kementerian Kesehatan belum dibuka di Tahun 2025.
d. Belum optimalnya pencatatan dan pelaporan kegiatan pengembangan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan di Fasyankes milik Pemerintah
e. Pengeluaran atau pembiayaan kesehatan yang masih berfokus pada upaya kuratif.
f. Belum optimalnya cakupan upaya pelayanan promotif dan preventif yang komprehensif

3.2.5 Rencana Tindak Lanjut

Berikut adalah beberapa hal yang akan ditindaklanjuti dalam kinerja;

1. **Sasaran 1 : Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat**
   a. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya hidup sehat dan memiliki jamninan kesehatan secara mandiri, agar beban pembiayaan kesehatan tidak terlalu besar dan beban pemerintah untuk pembayaran iuran peserta Penerima Bantuan Iuran dapat ditekan.
   b. Peran pihak swasta/perusahaan/badan usaha lebih ditingkatkan serta penegakan hukum dengan pemberian sanksi kepada Perusahaan/badan usaha yang tidak patuh mendaftarkan pekerjanya dapat dijalankan dengan semestinya.
   c. Pemenuhan kebutuhan dokter dan tenaga paramedis melalui jalur pengusulan CASN, PPPK dan kontrak BLUD.
   d. Bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa serta Dinas Sosial untuk melakukan pemadanan data secara berkala atas peserta program JKN.

2. **Sasaran : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat**
   a. Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar secara bertahap menggunakan sumber anggaran APBD, APBN dan BLUD.
   b. Penggalangan komitmen internasl di puskesmas dan rumah sakit untuk tetap menjaga mutu pelayanan yang sesuai standar akreditasi harus selalu dilakukan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri secara berkala dilakukan.

3.2.6 Penghargaan dan Apresiasi Kinerja

Berikut adalah beberapa penghargaan dan apresiasi kinerja yang didapatkan pada tahun 2025 dan beberapa tahun sebelumnya;

Tabel 3.2.6. a Penghargaan dan Apresiasi Kinerja

No.	Nama Penghargaan	Tahun Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala (Internasional/ Nasional/ Provinsi)	Keterangan
1	SWASTI SABA PADAPA	2025 (28 November 2025)	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Nasional	Keberhasilan dalam Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025
2	Penggerakan Kelas Ibu Hamil	2025 (03 Desember 2025)	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Republik Indonesia	Provinsi	Juara III Penggerakan Kelas Ibu Hamil
3	Sertifikat Penghargaan Atas keberhasilan mencapai target *Non-Polio* AFP (NPAFP) Rate ≥3 per 100.000 penduduk <15 tahun dan *Discarded* (bukan campak-bukan rubella) Rate ≥2 per 100.000 penduduk pada Tahun 2024	2025 (28 April 2025)	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Nasional	
4	Piagam Penghargaan Sebagai Pemerintah Daerah dengan **Kategori Pratama** dalam	2026 (27 Januari 2026)	Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Nasional	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Nama Penghargaan	Tahun Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala (Internasional/ Nasional/ Provinsi)	Keterangan
	Pencapaian *Universal Health Coverage (UHC)*				

PRESTASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025



Tanda Penghargaan "SWASTI SABA PADAPA" dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, atas Keberhasilan dalam Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

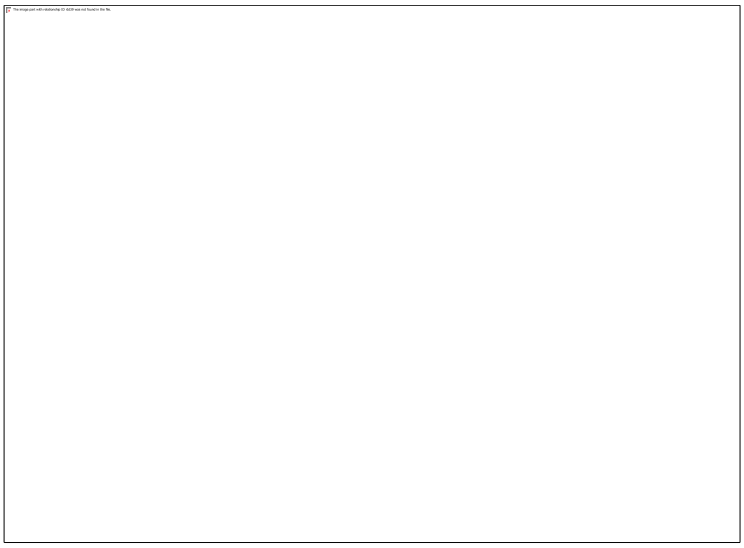


Piagam Penghargaan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri sebagai Juara 3 Penggerakan Kelas Ibu Hamil Tahun 2025



Sertifikat Penghargaan dari Kementerian Kesehatan kepada Kabupaten Kediri atas keberhasilan mencapai target *Non-Polio* AFP (NPAFP) Rate ≥3 per 100.000 penduduk <15 tahun dan *Discarded* (bukan campak-bukan rubella) Rate ≥2 per 100.000 penduduk pada Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Piagam Penghargaan diberikan kepada Kabupaten Kediri sebagai Pemerintah Daerah dengan "Kategori Pratama" dalam Pencapaian *Universal Health Coverage (UHC)* pada Tahun 2026

3.3 Realisasi Kinerja Anggaran

Realisasi Kinerja Anggaran pada tahun 2025 adalah sebagai berikut;

Tabel 3.3. a Tabel Realisasi Kinerja Anggaran

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**158.549.904.438**	**142.718.412.323**	**90,01%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***105.037.700***	90.938.000	86,58%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Renstra, Renja)	56.076.000	42.252.000	75,35%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun dalam 1 tahun	48.961.700	48.686.000	99,44%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***156.146.114.866***	**140.883.052.915**	**90,23%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercukupinya gaji dan tunjangan ASN	154.019.215.020	138.985.954.845	90,24%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan administrasi (penerima honor)	1.094.689.846	1.020.674.420	93,24%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan dalam 1 tahun	917.840.000	792.443.650	86,34%
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan yang disusun dalam 1 tahun	56.160.000	49.511.000	88,16%
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun dalam 1 tahun	58.210.000	34.469.000	59,21%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase sarana penunjang pegawai yang tersedia***	**-**	**-**	**-**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan/ dibeli	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***346.903.100***	**297.220.979**	**85,68%**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi pemeliharaan jaringan listrik dalam 1 tahun (kali)	45.696.500	34.335.200	75,14%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		69.970.000	63.132.014	90,23%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi pembelian peralatan rumah tangga dalam 1 tahun (kali)	25.518.300	20.665.600	80,98%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis barang / bahan yang tersedia /di adakan dalam 1 tahun	121.176.100	114.734.815	94,68%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan	50.290.200	33.602.100	66,82%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu dalam 1 tahun	34.252.000	30.751.250	89,78%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***1.065.648.300***	**813.356.827**	**76,33%**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi kegiatan pelayanan surat menyurat dalam 1 tahun (kali)	1.000.000	131.500	13,15%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekruensi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam 1 tahun (kali)	574.195.300	413.339.631	71,99%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi pemeliharaan alat kantor dalam 1 tahun (kali)	120.000.000	81.069.050	67,56%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi kegiatan pelayanan umum kantor dalam 1 tahun (kali)	370.453.000	318.816.646	86,06%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Cakupan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***886.200.472***	**633.843.602**	**71,52%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Seluruh kendaraan operasional terbayarkan pajaknya dalam 1 tahun	24.800.000	16.037.800	64,67%
Penyediaan Jasa	Seluruh kendaraan	394.873.700	186.470.800	47,22%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	operasional mendapatkan pemeliharaan dan siap dipakai dalam 1 tahun			
Pemeliharaan Mebel		10.000.000	-	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Seluruh alat kantor yang tidak dalam kondisi rusak berat berada dalam kondisi baik dan siap dipakai dalam 1 tahun (kali)	174.710.200	151.901.071	86,94%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/ rehabilitasi	281.816.572	279.433.931	99,15%
Peningkatan Pelayanan BLUD	***Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan BLUD***	***125.501.950.280***	**107.031.873.275 ,33**	**82,2%**
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dan BOK Puskesmas	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan BLUD dan BOK	125.501.950.280	107.031.873.275 ,33	82,2%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase Kecamatan STBM**	**179.787.877.019**	**169.962.708.456**	**94,54%**
	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi			
	Indeks Keluarga Sehat			
	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) terakreditasi			
	Persentase Nakestrad dan Hattra yang memiliki izin			
	AKI			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
	AKB			
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan**	**31.317.031.509**	**23.152.323.946**	**73,93%**
Pembangunan puskesmas	Jumlah Puskesmas Yang Dibangun	12.597.960.000	6.057.629.957	48,08%
Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	2.053.999.468	1.583.373.302	77,09%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	864.427.050	839.125.593	97,07%
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang disediakan	529.427.939	392.499.998	74,14%
Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai/BMHP, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	Persentase Pengadaan obat dengan tingkat aman Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	14.822.161.252	13.941.044.091	94,06%
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas kesehatan yang terpelihara sesuai standar	231.855.800	213.414.555	92,05%
Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makmin	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan	217.200.000	125.236.450	57,66%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
ke puskesmas serta faskes lainnya	Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke fasilitas kesehatan			
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah (Cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap)**	147.685.033.650	146.221.734.934	99,01%
	Persentase Puskesmas Dengan Kelulusan Akreditasi Minimal Utama			
	Persentase tenaga kesehatan tradisional yang dibina			
	Persentase penyehat tradisional yang dibina			
	Persentase desa yang terbentuk Asman TOGA			
	Persentase puskesmas yang melaksanakan pembinaan yankestrad			
	Persentase akses sanitasi layak			
	Jumlah tingkatan tatanan dalam kabupaten sehat			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan ibu hamil dilayani sesuai standart (K4)	104.524.600	102.592.600	98,15%
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan ibu bersalin dilayani sesuai standar	56.335.750	53.616.400	95,17%
	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Bayi Baru Lahir dilayani sesuai standar (KN2)	46.663.500	41.961.000	89,92%
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Balita dilayani sesuai standart	73.363.500	61.281.500	83,53%
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai standart	66.568.500	65.610.000	98,56%
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	203.328.400	198.966.500	97,85%
	Persentase Desa Yang Melaksanakan Posbindu			
	Persentase Sekolah yang Melaksanakan KTR			
	Persentase Wanita Usia Subur yang melakukan deteksi dini penyakit Kanker payudara dan kanker leher rahim pada usia 30 sd 50 tahun			
	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
Pengelolaan	Cakupan Pelayanan	67.209.500	58.810.000	87,50%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kesehatan pada Usia Lanjut Sesuai standart			
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi dilayani sesuai standar	76.492.000	58.861.825	76,95%
	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	Persentase penderita DM dilayani sesuai standar	56.310.500	44.381.000	78,81%
	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	133.440.200	102.071.500	76,49%
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	310.346.800	266.387.800	85,84%
	Persentase penemuan dan penanganan kasus TB			
	Persentase keberhasilan pengobatan TB			
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
	Pelayanan Sesuai Standar			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	128.525.000	118.561.700	92,25%
	Persentase Orang dengan HIV yang mendapatkan ARV			
	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB	Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi KLB	51.852.000	48.164.000	92,89%
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan Atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana	49.525.000	41.176.000	83,14%
Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat	Cakupan Pemberian Vit A	472.038.000	437.799.562	92,75%
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			
	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita			
	Prevalensi anemia pada ibu hamil			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
	Kesehatan Gizi Masyarakat			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Pos UKK yang terbentuk	138.330.000	96.759.450	69,95%
	Persentase jumlah jamaah haji yang diukur kebugaran jasmaninya			
	Persentase Tempat Kerja Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja			
	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan olahraga			
	Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja			
	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Melaksanakan Aktifitas Fisik			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Tempat Pengelolaan pangan yang memenuhi syarat sesuai standar	126.245.100	97.903.091	77,55%
	Persentase desa ODF			
	Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa kualitas airnya			
	Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis			
	Persentase Tempat-tempat umum yang dilakukan pengawasan sesuai standar			
	Jumlah Dokumen Hasil			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah puskesmas yang melakukan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	621.895.200	491.485.192	79,03%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tardisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah tenaga kesehatan tradisional yang dibina	71.145.400	50.891.025	71,53%
	Jumlah penyehat tradisional yang dibina			
	Jumlah desa yang terbentuk Asman TOGA			
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pembinaan yankestrad			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Presentase KLB yang ditanggulangi ≤ 24 jam	226.441.000	190.690.136	84,21%
	Penemuan kasus Non AFP			
	Penemuan kasus suspect campak			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	406.548.200	305.411.830	75,12%
	Persentase penderita HT ditangani sesuai standar			
	Persentase Penderita DM ditangani Sesuai standart			
	Persentase WNI usia 15 -			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
	59 tahun mendapatkan screening sesuai standart			
	Persentase Penemuan Kusta Pada Anak			
	Persentase Cacat Pada Kasus Kusta Baru			
	Persentase Penderita Kusta RFT-MB			
	Persentase Penderita Kusta RDT-PB			
	Persentase Cakupan Tatalaksana Pneumonia Balita			
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana Diare sesuai standart			
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan advokasi dan / sosialisasi Pengendalian PISP			
	Persentase Puskesmas yang mempunyai Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA)			
	Persentase Kasus Diare pada semua umur ditangani sesuai standart			
	Persentase Kasus Diare pada Balita ditangani sesuai standart			
	Persentase Bumil dilakukan (DDHB) Deteksi Dini Hepatitis B			
	Persentase bayi lahir dari Ibu reaktif HBsAg mendapat HBIg < 24 jam			
	Persentase bayi usia 9-12 bulan yang mendapat HBIg di test HBsAg			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
	hasilnya Non Reaktif			
	Persentase kasus DBD ditangani sesuai standart			
	Persentase Angka Bebas Jentik (ABJ)			
	Persentase anak usia 1-12 Tahun mendapatkan obat Cacing			
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk dalam data base yang memiliki jaminan kesehatan	143.288.152.000	142.594.197.200	99,52%
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			
Pengambilan dan Pengiriman spesimen penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Presentase pengambilan dan pengiriman spesimen ≤ 24 jam ke laboratorium pemeriksa	74.743.500	72.293.700	96,72%
	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kecamatan sehat	38.200.000	36.916,000	96,64%
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	123.316.000	47,412,000	38,45%
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	92.880.000	82.939.700	89,30%
	Presentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
	Persentase anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan Campak dan Rubella			
	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Presentase pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	37.247.000	29.570.898	79,39%
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	370.193.000	338.193.625	91,36%
Pengelolaan Pelayanan Malaria	Jumlah dokumen pengelolaan pelayanan malaria	16.532.000	15.499.700	93,76%
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	156.642.000	71.330.000	45,54%
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	***Tingkat ketersediaan sistem informasi kesehatan***	***296.920.760***	**219.721.060**	**74,00%**
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah LAN yang terpelihara dan puskesmas yang menggunakan simpus dan e-SPM	296.920.760	219.721.060	74,00%
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Persentase Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan***	***488.891.100***	368.928.516	75,46%
	Persentase Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥ 89%)			
	Jumlah keluarga yang mendapat intervensi sesuai hasil survey KS			
	Persentase Klinik Pratama yg terakreditasi			
	Persentase RS yang terakreditasi paripurna			
	Persentase Klinik Utama yang terakreditasi			
	Persentase lab Madya yang terakreditasi			
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥ 89%)	452.019.600	341.789.988	75,61%
	Jumlah keluarga yang mendapat intervensi sesuai hasil survey KS			
	Persentase Klinik Pratama yg terakreditasi			
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah RS yang terakreditasi paripurna	36.871.500	27.138.528	73,60%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan**	**1.547.611.000**	**1.215.694.653**	**78,55%**
Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di kabupaten / kota	**Jumlah ijin praktik yang diterbitkan setelah memenuhi persyaratan**	**33.174.800**	**4.224.000**	**12,73%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui faskes dan organisasi profesi	33.174.800	4.224.000	12,73%
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Tersedianya perencanaan SDM Kesehatan di Fasiliatas Kesehatan Pemerintah**	**140.416.400**	**110.224.650**	**78,50%**
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya dokumen penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK di Faskes Pemerintahan	9.799.600	1.288.000	13,14%
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan SDMK di Faskes Pemerintahan	130.616.800	108.936.650	83,40%
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Persentase ASN Yang Dikembangkan Kompetensinya***	***1.374.019.800***	1.101.246.003	80,15%
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi setiap tahun	1.374.019.800	1.101.246.003	80,15%
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**Prosentase Pemberian Rekomendasi Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan UMOT**	**606.520.060**	464.324.474	76,56%
	Prosentase Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Bersertifikat			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, UMOT	**Jumlah rekomendasi Apotek, TO, Tk Alkes dan Optikal UMOT yang diterbitkan**	***195.203.000***	***152.613.800***	***78,18%***
	Persentase Apotek,Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, UMOT yang dibina dan diawasi			
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah rekomendasi Apotek, TO, toko alkes, dan optikal, UMOT yang memenuhi persyaratan	195.203.000	152.613.800	78,18%
	Jumlah apotek, TO, toko alkes, dan optikal, UMOT yang dibina dan diawasi			
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain : Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum	**Presentase TPM yang ber SLHS**	***45.980.000***	**40.635.900**	**88,38%**
Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain : Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum yang diterbitkan	45.980.000	40.635.900	88,38%
Penerbitan Stiker Pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan		***19.550.000***	**18.650.000**	**95,40%**
Pengendalian dan Pengawasan serta TindakLanjut	Jumlah stikerisasi pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	19.550.000	18.650.000	95,40%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
penerbitan Stiker pembinaan pada makanan Jajanan dan Sentra makanan jajanan				
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Prosentase pemeriksaan produksi makanan minuman industri rumah tangga**	**345.787.060**	**252.424.774**	**73,00%**
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase produsen industri rumah tangga yang dibina dan diawasi	345.787.060	252.424.774	73,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)**	**1.000.219.200**	**705.645.485**	**70,55%**
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Frekuensi kegiatan tim pokjanal tk. Kabupaten, kecamatan dan desa dalam satu tahun**	**793.625.800**	**598.814.485**	**75,45%**
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah lintas sektor/ organisasi masyarakat/ organisasi profesi/ dunia usaha yang bermitra dengan UKBM	793.625.800	598.814.485	**75,45**%
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah media KIE yang digunakan dalam satu tahun**	**38.697.400**	**36.231.000**	**93,63%**
Peningkatan upaya	Jumlah tema KIE program	38.697.400	36.231.000	**93,63**%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	prioritas yang dipromosikan melalui media			
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tingkat partisipasi kesehatan masyarakat skala desa**	**167.896.000**	**70.600.000**	**42,05%**
	Cakupan promosi kesehatan tingkat desa			
	Cakupan kelompok kesehatan masyarakat yang dibina			
	Persentase Posyandu Purnama Mandiri (PURI)			
	Persentase poskesdes purnama mandiri (PURI)			
	Persentase poskestren purnama mandiri (PURI)			
	Persentase saka Bhakti Husada (SBH) purnama Mandiri (PURI)			
	Persentase desa-kelurahan siaga aktif			
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Frekuensi bimbingan teknis dan supervisi UKBM yang dilakukan selama satu tahun	167.896.000	70.600.000	42,05%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV
PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kediri Tahun 2021-2026, maka Dinas Kesehatan telah menetapkan 2 Sasaran Strategis dan 2 Indikator Kinerja Utama yang dijabarkan dalam 5 Program.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut dapat dicapai dengan interprestasi memuaskan. Sesuai dengan skala nilai peringkat kerja, semua kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri memperoleh predikat Baik. Hal tersebut menunjukkan pencapaian/ realisasi kinerja telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja,

Selanjutnya, pada prinsipnya permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dapat dicarikan solusinya dengan baik. Namun demikian, langkah – langkah korektif dan antisipatif tetap dilakukan terhadap kemungkinan – kemungkinan masalah/ hambatan yang timbul sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik ke depannya. Dengan demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai secara efektif, efisien dan akuntabel

Kediri, 03 Februari 2026
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kediri

dr. Ahmad Khotib, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19790226b 200312 2 004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEDIRI

RENCANA AKSI
INTERNALISASI BUDAYA KERJA BERAKHLAK



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2025

Jalan Pamenang Nomor 1-C, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 683766, Pos-el dinkes@kedirikab.go.id
Laman www.dinkes.kediriKab.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA AKSI
INTERNALISASI BUDAYA KERJA BERAKHLAK
DINAS KESEHATAN



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Aksi Internalisasi budaya kerja dengan *core value* ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dan *employer branding* ASN Bangga Melayanai Bangsa pada Dinas kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2026 dapat disusun.

Rencana aksi ini disusun sebagai wujud komitmen Dinas kesehatan dalam menginternalisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKLHLAK dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Rencana aksi ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam peningkatan kualitas pelayanan punlik serta memperkuat budaya kerja profesional dan berintegritas

Kami menyadari bahwa keberhasilan implementasi budaya kerja dengan core value BerAKHLAK ini membutuhkan dukungan dan sinergi dari seluruh pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan rencana aksi ini.

Semoga rencana aksi ini dapat diimplementasikan dengan baik untuk memacu peningkatan kinerja Dinas kesehatan di masa yang akan datang, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Kediri, 20 Januari 2026
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kediri

dr. Ahmad Khotib, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP 197003242002121003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah telah menetapkan Nilai Dasar ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sebagai panduan perilaku wajib bagi seluruh Aparatur Sipil Negara. Implementasi nilai BerAKHLAK tidak cukup hanya melalui sosialisasi formal, melainkan harus diwujudkan menjadi kebiasaan harian dan perubahan perilaku. Untuk memastikan internalisasi kualitatif tersebut berjalan efektif dan terukur, maka disusunlah Rencana Aksi Budaya Kerja BerAKHLAK ini.

Rencana Aksi Internalisasi Budaya Kerja difokuskan pada aspek perubahan perilaku dan cara kerja internal ASN dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak menyusun aktivitas baru terkait program atau kegiatan di luar Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan praktis untuk menjalankan program-program internalisasi yang sederhana dan mudah apabila diterapkan sehari-hari. Diharapkan menjadi lebih efektif dalam mengimplementasikan budaya kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Aksi ini adalah digunakan untuk menginternalisasi Budaya Kerja BerAKLHLAK yang akan dilaporkan setiap Semester di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Bupati Kediri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri;
4. Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values (Nilai Dasar) ASN BerAKHLAK dan Employer Branding "Bangga Melayani Bangsa".

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II
GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dinas Kesehatan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan

b. Fungsi

1) perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
2) penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang kesehatan;
3) pelaksanaan pelayanan di bidang kesehatan;
4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pelayanan di bidang kesehatan;
5) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan di bidang kesehatan;
6) pembinaan penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan;
7) pembinaan UOBK RSUD dan UPT;
8) pelaksanaan administrasi di bidang pelayanan kesehatan;
9) penyusunan dan perumusan raporan kineg'a secara periodik kepada Bupati; dan
10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

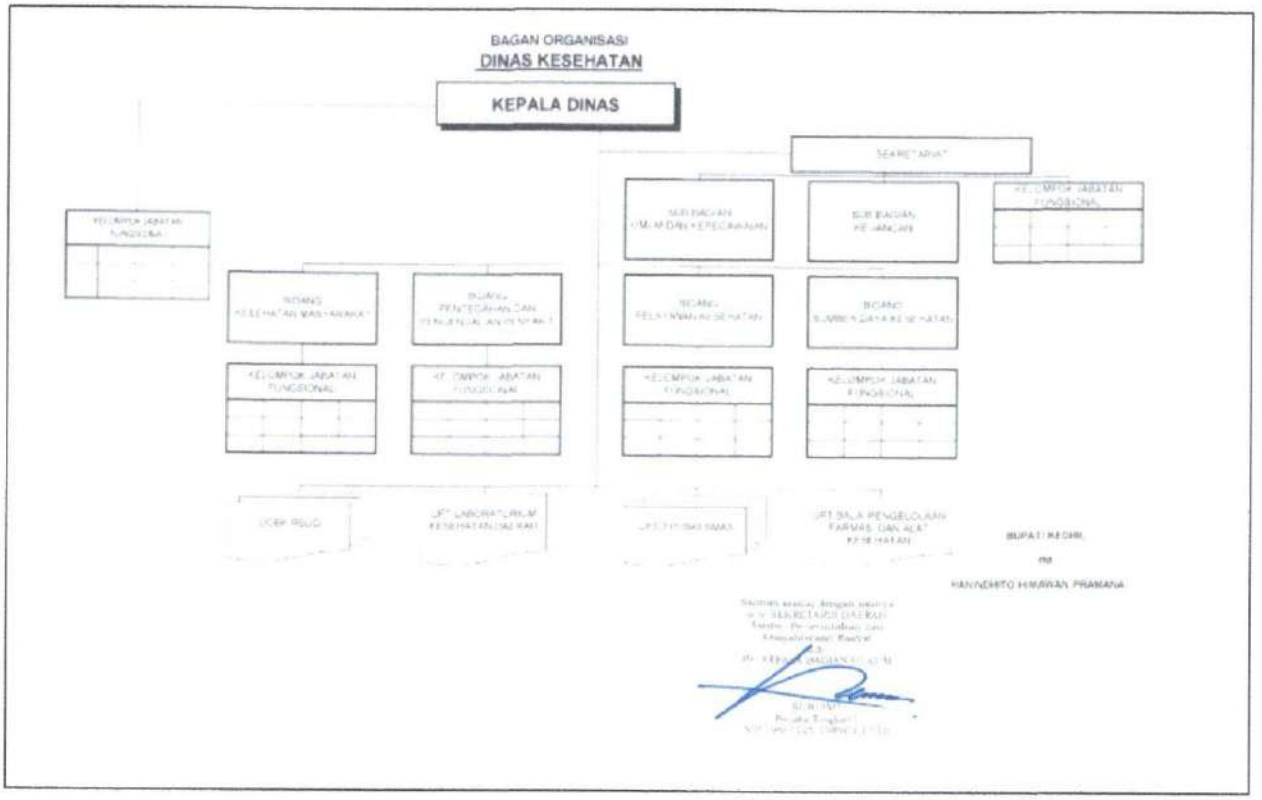
2.2 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 27 Tahun 2022, pejabat yang berada di Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Kesehatan
b. Sekretaris Dinas Kesehatan
c. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
d. Kepala Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit;
e. Kepala Bidang pelayanan Kesehatan;
f. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan;
g. Direktur UOBK RSUD;
h. Kepala UPT; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan Struktur Organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 27 Tahun 2022



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.3 Demografi Organisasi

Berikut disampaikan tabulasi demografi pegawai pada OPD Induk Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah ASN OPD Induk Dinas Kesehatan Per Januari 2026 berdasarkan Jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	56	40,6
2.	Perempuan	82	59,4
	Total	138	100

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa dari 138 pegawai ASN, jumlah pegawai perempuan lebih banyak dibandingkan dengan pegawai laki-laki yaitu sebesar 59,4%.

Tabel 2.2 Jumlah ASN OPD Induk Dinas Kesehatan Per Januari 2026 berdasarkan Kelompok Usia

No.	Usia (tahun)	Jumlah	Persentase (%)
1.	≤ 29	13	9,4
2.	30-45	70	50,7
3.	≥ 46	55	39,9
	Total	138	100

Berdasarkan Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa dari 138 pegawai ASN yang ada di Dinas Kesehatan, sebagian besar terdapat pada rentang usia 30-45 tahun yang termasuk dalam kategori generasi Y atau milenial.

Tabel 2.3 Jumlah ASN OPD Induk Dinas Kesehatan Per Januari 2026 berdasarkan Kelompok Pendidikan

No.	Usia (tahun)	Jumlah	Persentase (%)
1.	S-2	23	16,7
2.	S-1	68	49,2
3.	D-IV	5	3,6
4.	D-III	19	13,8
5.	D-I	1	0,7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6.	SLTA/sederajat	21	15,2
7.	SD/sederajat	1	0,7
	Total	138	100

Tabel 2.3 menunjukkan jumlah pegawai ASN pada Dinas Kesehatan berdasarkan Pendidikan, sebagian besar telah menempuh jenjang Sarja Strata-1 (S1) yaitu sebanyak 49,2%. Masih terdapat ASN yang memiliki jenjang pendidikan SD yaitu sebanyak 1 orang atau 0,7%.

Tabel 2.4 Jumlah ASN OPD Induk Dinas Kesehatan Per Januari 2026 berdasarkan Jabatan

No.	Usia (tahun)	Jumlah	Persentase (%)
1.	Pejabat Tinggi Pratama	1	0,7
2.	Pejabat Administrator	5	3,6
3.	Pejabat Pengawas	3	2,2
4.	JF Ahli Madya	0	0,0
5.	JF Ahli Muda	14	10,1
6.	JF Ahli Pertama	9	6,5
7.	JF Penyelia	4	2,9
8.	JF Mahir	0	0,0
9.	JF Terampil	2	1,4
10.	Pelaksana	100	72,5
	Total	138	100

Berdasarkan Tabel 2.4 dapat dilihat Jumlah Pegawai ASN pada Dinas Kesehatan berdasarkan Jabatan. Formasi jabatan struktural terdiri dari 1 formasi jabatan tinggi pratama, 5 formasi jabatan Administrator dan 4 jabatan pengawas. Masih terdapat 1 jabatan struktural yang belum terisi, dan dijabat oleh Pelaksana Tugas yaitu UPT Laboratorium Kesehatan Daerah. Terdapat 29 ASN dalam Jabatan Fungsional yang tersebar dalam jabatan fungsional jenjang keterampilan dan jenjang keahlian. Sedangkan Asn pelaksana berjumlah 100 pegawai atau sebesar 72,5%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III
RENCANA AKSI BUDAYA KERJA

3.1 Rencana Aksi Internalisasi Budaya Kerja

Rencana aksi ini disusun dengan kolom Nilai Dasar, Rencana Aksi Internalisasi Budaya Kerja, Indikator Keberhasilan, dan Target Pelaksanaan. Rencana Aksi Internalisasi Budaya Kerja disusun selaras dengan Program/Kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut:

Nilai Dasar	Rencana Aksi Internalisasi Budaya Kerja	Teknis Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	PIC
Berorientasi Pelayanan	Senyum untuk Semua	Setiap ASN wajib menyapa rekan kerja dan masyarakat dengan ramah setiap berpapasan mengucap salam "pagi"/"siang"/"sore" (menyesuaikan waktu) dan tersenyum tulus (senyum sebelas). Jika salah satu pegawai menemukan rekan kerja yang tidak tersenyum ketika bertatap muka harus melapor melalaui tautan *Google form* https://s.id/renaksidinkes2026. Bukti aksi berupa rekap dari *Google form*	Setiap hari	Kasubbag, Ketua Tim Kerja
Akuntabel	Janji Kerja Minggu Ini	Di awal jam kerja, ASN menuliskan 1 pekerjaan utama setiap Hari Senin di WA grup/*spreadsheet* masing-masing tim kerja; pada Hari Jumat dicek secara sederhana. Bukti aksi berupa *Screenshot* WA Grup Hari Senin dan Jumat	Setiap hari senin dan dievaluasi hari Jumat	Kasubbag, Ketua Tim Kerja
	Kerja Jujur, Lapor Apa Adanya	Hasil/Progres Janji Kerja Minggu ini ditulis singkat di WA Grup/*spreadsheet* masing2 timker) pada Hari	Mingguan	Kasubbag, Ketua Tim Kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nilai Dasar	Rencana Aksi Internalisasi Budaya Kerja	Teknis Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	PIC
		Jumat: tulis kendala jika belum selesai/ tidak berprogres (tanpa adanya hukuman) kemudian dievaluasi bersama pada minggu berikutnya. (setiap senin pagi setelah apel, masing2 subbag/timker mengagendakan *early meeting* minimal 30 menit). Bukti Aksi berupa *Screenshot WA Grup/spreadsheet* Laporan hasil/progras janji kerja		
Kompeten	Ngopi Ilmu 15 Menit	- *Sharing knowledge* antar ASN - Pembelajaran mandiri *(microlearning)* - Setiap minggu 1 ASN berbagi tips kerja, kasus lapangan, atau info kesehatan terbaru secara singkat dan santai (dapat disampaikan secara langsung saat evaluasi mingguan atau melalui WA grup/*spreadsheet*). Masing-masing ketua tim kerja/Kasubbag membagi jadwal anggota tim. Bukti aksi berupa foto kegiatan *early meeting*	Setiap Hari Senin pada saat *Early meeting*	Kepala Bidang
	Boleh Tidak Tahu, Wajib Mau Belajar	ASN yang belum paham tugas wajib bertanya & belajar dari rekan kerja maupun atasan, bukan diam atau menunda. Masing2 Kasubbag/Katimker melakukan inventarisir di akhir Bulan, untuk memastikan karyawan yang tidak pernah bertanya baik kepada	Setiap hari	Kasubbag, Ketua Tim Kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nilai Dasar	Rencana Aksi Internalisasi Budaya Kerja	Teknis Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	PIC
		rekan kerja maupun pimpinan memang karena sudah paham. Masing2 pegawai baik pimpinan maupun rekan kerja memasukkan daftar rekan yang bertanya/belajar pada tautan *Google form* https://s.id/renaksidinkes2026. Bukti aksi berupa rekap dari *Google form*		
Harmonis	Mewujudkan lingkungan kerja yang saling menghargai	- Kegiatan kebersamaan (apel setiap senin pagi, olahraga di hari jumat, peringatan hari besar) - Penyelesaian konflik secara musyawarah	Mingguan & semester	Kepala Dinas/sekretaris/Kepala Bidang
	Salam Tanpa Sekat	Membiasakan saling menyapa lintas jabatan, tidak memanggil berdasarkan jabatan saja, dan membangun komunikasi santun. Teknis dan Bukti Aksi sama dengan renaksi "senyum untuk semua"	Setiap hari	Kasubbag, Ketua Tim Kerja
	Stop Bisik-bisik, Mulai Bicara Baik-baik	Masalah disampaikan langsung dan santun ke yang bersangkutan, bukan lewat gosip/WA belakang. Setiap pegawai saling mengingatkan dan menolak jika ada rekan kerja yang bermaksud memulai membicarakan orang lain di belakang	Setiap saat	Kasubbag, Ketua Tim Kerja
Loyal	Saya ASN, Saya Siap Melayani	Setiap apel, 1 ASN menyampaikan pengalaman melayani masyarakat dan komitmen sebagai ASN. Dijadwal bergantian setiap bidang, masing-masing pegawai	Setiap Hari Senin pada saat apel	Kasubbag, Ketua Tim Kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nilai Dasar	Rencana Aksi Internalisasi Budaya Kerja	Teknis Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	PIC
		melakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun		
	Reward ASN	- Reward bagi ASN yang inovatif dan membawa kebermanfaatan bagi masyarakat reward berupa penilan SKP diatas ekspektasi, predikat sangat baik Bukti Aksi berupa, *Screenshot* Nilai SKP - Reward bagi ASN yang ramah, rajin dan rapi dengan atribut pakain dinas lengkap sesuai peraturan setiap hari, meja bersih sebelum pulang reward berupa pemasangan foto di ruang pelayanan Bukti Aksi berupa, Foto pegawai yang telah terpaang di ruang pelayanan	Setiap Semester	Kepala Bidang
Adaptif	Berani Coba Cara Baru	ASN diberi ruang mencoba cara baru (misal Google Form, WA layanan, poster digital, dll) tanpa takut disalahkan selama bertujuan melayani. Masing-masing ASN harus melakukan penyesuaian terhadap hal baru minimal 1 kali dalam 1 tahun. Pimpinan memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada bawahan untuk melakuakan inovasi, dan segera melakukan evaluasi dan perbaikan jika terdapat kegagalan bukan memarahi dan	Tahunan	Kepala Bidang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nilai Dasar	Rencana Aksi Internalisasi Budaya Kerja	Teknis Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	PIC
		mematikan ide. Setiap ASN mengisikan aksi kebaruan (berdasarkan kemampuan masing-masing) pada tautan *google form* https://s.id/renaksidinkes2026. Bukti aksi berupa rekap *google form*		
Kolaboratif	Satu Meja, Satu Solusi	Masalah pelayanan dibahas singkat lintas bidang (tanpa birokrasi panjang) untuk cari solusi bersama, Rapat rutin struktural dan ketua tim kerja, minimal 1x dalam 1 bulan. Rapat rutin Dinkes dengan Kepala Puskesmas, minimal 1x dalam 1 bulan. Bukti aksi berupa foto dan daftar hadir kegiatan	Rapat internal Dinkes Jumat pertama/bulan Rapat dengan Kepala Puskesmas setiap Rabu terakhir/bulan dapat berubah menyesuaikan agenda pimpinan	Kepala Dinas
	Keluhan Masyarakat adalah Urusan Bersama	Keluhan warga tidak boleh dilempar antar bidang, aduan masyarakat di kelola dan ditindaklanjuti oleh tim aduan yang telah ditunjuk oleh kepala dinas kesehatan, berkoordinasi dengan bidang terkait untuk mengawal sampai selesai. Bukti aksi laporan penyelesaian aduan	Setiap saat	Kasubbag, Ketua Tim Kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Budaya Kerja ASN BerAKHLAK ini disusun sebagai panduan operasional dalam upaya penguatan nilai dasar ASN di Lingkup (Perangkat Daerah). Dokumen ini akan dimonitoring dan dievaluasi pelaksanaannya setiap semester/triwulan sebagai upaya mengawal Budaya Kerja BerAKHLAK sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dapat berjalan dengan baik.

Keberhasilan internalisasi budaya kerja BerAKHLAK sangat bergantung pada partisipasi aktif dan keteladanan dari seluruh jajaran, mulai dari pimpinan tertinggi hingga staf pelaksana. Diharapkan program-program sederhana yang tercantum dalam Rencana Aksi ini dapat dilaksanakan secara konsisten, sehingga nilai-nilai BerAKHLAK menjadi kebiasaan harian yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kediri

dr. Ahmad Khotib, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP 197003242002121003

"Budaya kerja bukan soal spanduk, tapi soal kebiasaan yang berulang."

"Kami ingin ASN yang berani jujur, bukan hanya terlihat sibuk."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KESEHATAN
Jalan Pamenang Nomor 1-C, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 683756, Pos-el: dinkes@kedirikab.go.id
Laman: www.dinkes.kedirikab.go.id

Kepada:
Yth. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
di –

K E D I R I

SURAT PENGANTAR

Nomor : 400.13.4.1/1696/418.25/2026

No.	Jenis yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Rekomendasi Dewan atas LKPJ Tahun 2025 Bidang Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pelayanan Kesehatan	1 (satu) Bendel	Dikirim dengan hormat untuk Menindaklanjuti Surat Permintaan Rekomendasi Dewan atas LKPJ Tahun 2025 Nomor 100.1.6/9/418.03/2026 tanggal 14 Januari 2026 Perihal Tindaklanjut Rekomendasi Dewan atas LKPJ Tahun 2025

Kediri, 21 Januari 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEDIRI

dr. AHMAD KHOTIB, M.Kes
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197003242002121003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

INTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KESEHATAN
Jalan Pamenang Nomor 1-C, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 683756, Pos-el: dinkes@kedirikab.go.id
Laman: www.dinkes.kedirikab.go.id

Tindaklanjut Rekomendasi Dewan atas LKPJ Tahun 2025 Bidang Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pelayanan Kesehatan

No	Rekomendasi	OPD	Tindak Lanjut
2	c. **Bidang Kesejahteraan Masyarakat** 2) Dalam Pelayanan Kesehatan a) Rujukan pasien dari wilayah barat sungai masih banyak yang masuk ke rumah sakit di luar wilayah Kabupaten Kediri, hal ini karena aksesnya yang lebih dekat dan lebih mudah dijangkau;		2a. Penyelenggaraan rujukan pelayanan kesehatan telah diatur dalam Permenkes Nomor 16 tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa sistem rujukan dilakukan berdasarkan kebutuhan medis pasien dan kemampuan pelayanan pada setiap fasyankes. Namun dikecualikan bagi pasien dalam kondisi gawat darurat dan adanya KLB, wabah dan bencana. Selain berdasar kebutuhan medis, rujukan juga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			mempertimbangkan aksesibilitas berupa jarak dan waktu tempuh paling singkat dari fasyankes perujuk ke fasyankes penerima rujukan dengan tetap mengutamakan keselamatan pasien. Sistem rujukan pasien terutama peserta BPJS Kab Kediri diatur dengan mapping RS rujukan yang telah disepakati antara Dinas Kesehatan, asosiasi FKTP, Organisasi Profesi dan BPJS Kesehatan. Namun dalam rangka optimalisasi program JKN terutama bagi peserta PBID di Kabupaten Kediri maka tujuan RS rujukan diutamakan ke RSU milik Pemda (sesuai dengan Perbup Nomor 62 Tahun 2023 dan Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Nomor 400.7.3/11122/418.25/2024 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari segmen Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Daerah (PBID).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Rekomendasi	OPD	Tindak Lanjut
	b) Pemberdayaan Posyandu di desa-desa agar tumbuh dengan baik dan perlu penambahan Anggaran dari APBD;		2b. Pemberdayaan posyandu di desa2 agar tumbuh dengan baik pada tahun 2025 telah dilakukan Upaya untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri telah melakukan Program Kegiatan dan hasil dari pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai berikut : **1. Transformasi ke Posyandu ILP (Siklus Hidup)** 1. **Layanan Integrasi:** Menyatukan posyandu programatik (kia, stunting, lansia) menjadi satu layanan terpadu untuk semua umur yang melayani Posyandu dengan siklus hidup 2. **Hasil** : Jumlah Posyandu di Kab Kediri tahun 2025 : 1716 Posyandu Yang melaksanakan Posyandu ILP (Siklus Hidup) : 1643 Posyandu (95,75 %) 3. **Kegiatan Yang sudah di lakukan untuk dapat menjadi Posyandu ILP (Siklus Hidup**)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			a. Pembentukan Tim Pembina Posyandu mulai dari Tk Kabupaten, Kecamatan sampai desa dengan pembentukan SK Tim Pembina Posyandu b. Advokasi Ke Penentu Kebijakan Desa untuk membentuk Posyandu ILP **2. Kegiatan Utama & Pemberdayaan Kesehatan** • **Pemantauan Pertumbuhan & Gizi:** Penimbangan, pengukuran tinggi badan, serta deteksi dini stunting pada balita. • **Pemberian Makanan Tambahan (PMT):** Fokus pada pencegahan stunting melalui pemberian PMT berbasis bahan lokal dan edukasi pengolahannya bagi kader. • **Layanan Imunisasi:** Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap dan tambahan (booster) untuk mencegah penyakit menular (polio, campak, hepatitis B). • **Pelayanan KIA & KB:** Pemeriksaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			kehamilan, nifas, serta pelayanan keluarga berencana. • **Posyandu Lansia:** Pemeriksaan kesehatan lansia (tensi, gula darah, berat badan) dan penyuluhan gizi. **3. Tindakan Pemberdayaan Kader & Masyarakat** • **Peningkatan Kapasitas Kader:** Pelatihan 25 Kompetensi Dasar Kader melalui LMS dengan jumlah peserta 150 Kader dari 30 Puskesmas Akses pelayanan di Puskesmas dan Rumah Sakit perlu di tingkatkan @ 5 kader • **Hasil Kompetensi Kader :** Telah di lakukan uji Kompetensi kader sebanyak 6828 Kader dengan hasil Kompetensi - Kader Purwa : 1714 - Kader Madya ; 1636 - Kader Utama : 1064 • **Kunjungan Rumah (Home Visit):** Kader melakukan kunjungan aktif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			ke rumah-rumah untuk mendata keluarga dan memantau kesehatan, terutama bagi balita yang tidak hadir di posyandu. • **Penggerakan Masyarakat:** Kader berperan sebagai penggerak masyarakat untuk hidup sehat dan datang ke posyandu. **4. Digitalisasi & Inovasi (Modernisasi Posyandu)** • **Aplikasi Pendataan (Contoh: ASYIK /Aplikasi Posyandu):** Penggunaan aplikasi untuk mempermudah pencatatan, pelaporan, dan pengajuan keluhan kesehatan oleh masyarakat. • **Revitalisasi Digital:** Penguatan peran kader melalui teknologi digital (kader digital) untuk memudahkan pemantauan kesehatan warga. **5. Penguatan Sarana & Kelembagaan** • **Dukungan Anggaran**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	c) Akses pelayanan di Puskesmas dan Rumah Sakit perlu di tingkatkan		**Desa:** Pembiayaan operasional posyandu dan PMT dari dana desa untuk menjamin keberlanjutan. 2c. Kemudahan akses masyarakat Kab Kediri terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit antara lain diupayakan dg cara sbb: 1) Pelayanan kesehatan yang bermutu dan tanpa kendala biaya diwujudkan dengan perluasan cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Sampai dengan Desember 2025, cakupan UHC (Universal Health Coverage) sebesar 98,44% dengan tingkat keaktifan peserta 79,24%. 2) Melaksanakan bimtek pemanfaatan system rujukan terintegrasi (SISRUTE) bagi RS, puskesmas dan klinik 3) Melaksanakan pendampingan dan Monitoring Penggunaan Rekam Medik Eleketronik bagi RS 4) Melaksanakan pendampingan update data aspak dan SDMKes untuk mengetahui kompetensi RS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			5) Memberikan akses yang mudah melalui nomor bebas pulsa 119 atau nomor wa 085 212 117 119 commad center PSC119 selama 24 jam non stop untuk pelayanan *pre hospital care.*

Kediri, 21 Januari 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI

dr. AHMAD KHOTIB, M.Kes
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197003242002121003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KESEHATAN
Jalan Pamenang Nomor 1-C, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 683756, Pos-el: dinkes@kedirikab.go.id
Laman: www.dinkes.kedirikab.go.id

Kepada:
Yth. Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri
di –
K E D I R I

SURAT PENGANTAR

Nomor : 000.8.6.3/1555/418.25/2026

No.	Jenis yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2025.	1 (satu) Bendel	Dikirim dengan hormat untuk Menindaklanjuti Surat Penyampaian Permintaan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Capaian Kinerja PerangkatP Daerah Triwulan IV Tahun 2025 Nomor 000.8.6.3/2/418.09/2026 tanggal 2 Januari 2026 Perihal Permintaan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2025.

Kediri, 20 Januari 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEDIRI

dr. AHMAD KHOTIB, M.Kes
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197003242002121003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KESEHATAN
Jalan Pamenang Nomor 1-C, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 683756, Pos-el: dinkes@kedirikab.go.id
Laman: www.dinkes.kedirikab.go.id

Nomor : 000.8.6.3/1556/418.25/2026
Sifat : Penting
Lampiran : Satu Eksemplar
Hal : Pernyataan Keabsahan Data Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : dr. AHMAD KHOTIB, M.Kes
NIP : 197003242002121003
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

Sehubungan dengan pelaksanaan kinerja pada Triwulan IV Tahun 2025 dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Data Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 yang disampaikan adalah benar;
2. Seluruh Data Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Capaian Kinerja telah didukung dengan bukti-bukti kinerja relevan;
3. Apabila dikemudian hari ditemukan terdapat kondisi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka kami bersedia untuk melakukan klarifikasi atas data yang sudah disampaikan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 20 Januari 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEDIRI

dr. AHMAD KHOTIB, M.Kes
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197003242002121003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (*Impact*), Program (*Outcome*), Kegiatan dan Sub Kegiatan (*Output*)	Formula/Rumus/Dasar Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025	Satuan	Target TW 4	Realisasi TW 4	Capaian Aksi	Normalisasi Capaian Aksi	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif/Solusi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8/7x100*	*10*	*11*	*12*
	Meningkatnya akses Pelayanan Kesehatan masyarakat	**Terlaksananya upaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat**	**Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan**	**Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan dibagi Jumlah penduduk di Kabupaten Kediri x 100%**	**persen**	**98**	**98,44**	**100,45**	**100,45**	Target sudah tercapai pada bulan Oktober (UHC : 99,06%) namun mengalami penurunan lagi yang disebabkan adanya penonaktifan kepesertaan PBI JK bulan Oktober, Nopember dan Desember total sebanyak 10.750 peserta	Untuk mempertahankan status capaian UHC *non cut off* tetap tercapai (98%, tingkat keaktifan peserta minimal 80%) dengan cara : 1. Memastikan kevalidan data peserta PBID melalui padan data secara berkala dengan Dispendukcapil 2. Optimalisasi kepesertaan segmen lain non PBID untuk mengurangi beban anggaran daerah
	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	**Terlaksananya upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat**	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama**	**Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang terakreditasi minimal utama dibagi Jumlah total fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dikali 100%**	**persen**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	Target sudah tercapai 100% yaitu 37 Puskesmas dan 2 RSU milik pemerintah telah terakreditasi minimal Utama	Pembinaan dan pemantauan mutu berkala di puskesmas dan RSUD
01.02.01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**Terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bisa dipenuhi dibagi jumlah total urusan penunjang pemerintahan kali 100%**	**persen**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	Kegiatan penunjang bisa terlaksanan dengan baik	
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksannya kegiatanPerencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berhasil disusun dibagi jumlah semua dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dalam 1 tahun dikali 100%**	**persen**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**		
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra 2025-2029, Renja 2026, Renja 2025, Perubahan renja 2025, RKA 2026, RKA Perubahan 2025	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Rentra, Renja)	dokumen	2	2	100,00	100,00		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan LKJIP 2024, Rakor Penyusunan LPPD kesehatan, Rakor SPM Kesehatan Triwulanan, Rakor LKPJ kesehatan, Monev capaian kinerja Triwulanan, Monev penganggaran triwulanan, Penyusunan RenAksi, Penyusunan Profil Kesehatan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun dalam 1 tahun	dokumen	4	4	100,00	100,00		
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan dibagi Total kegiatan adminitrasi umum dikali 100%**	**persen**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	Kegiatan penunjang terlaksana dengan baik	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan TPP ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya dalam 1 tahun	orang/bulan	1.856	1.928	103,88	103,88	Ada tambahan PPPK, Pembayaran gaji dan TPP ASN telah dibayar	
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran jasa tenaga alih daya dan tenaga administrasi kantor	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disusun dalam 1 tahun	dokumen	3	3	100,00	100,00	Dokumen pelaksanaan segera disusun dan diselesaikan setelah kegiatan berakhir.	
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan keuangan	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen/laporan penatausahaan yang disusun dalam 1 tahun	dokumen	3	3	100,00	100,00	Sudah dilaksanakan penatausahaan keuangan setiap bulan	
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rakor monev laporan keuangan dinkes dan dan puskesmas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan yang disusun dalam 1 tahun (Dinkes, 37 Puskesmas, 2 RSUD)	dokumen	40	40	100,00	100,00	Rakor monev laporan keuangan dinkes dan puskesmas telah dilaksanakan	
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rakor monev laporan keuangan dinkes dan puskesmas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun dalam 1 tahun (dinkes, 37 pusk, 2 RSUD)	1	111	111	100,00	100,00	Rakor monev laporan keuangan dinkes dan puskesmas telah dilaksanakan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase sarana penunjang pegawai yang tersedia**	**Jumlah sarana pegawai yang dilaksankan dalam 1 tahun dibagi jumlah sarana pegawai yang dibutuhkan**	**persen**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**		
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pembelian pakaian olahraga dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah pakaian dinas yang diadakan/ dibeli	paket	0	0	**#DIV/0!**		Tidak terlaksana karena efisiensi anggaran	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan dibagi Total kegiatan adminitrasi umum dikali 100%**	**persen**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**		
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan kompenen listrik dan penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dalam 1 tahun	paket	2	2	100,00	100,00	Pemenuhan kebutuhan komponen ala listrik dan pemeliharaan jaringan listrik telah selesai dilaksanakan.	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dalam 1 tahun	paket	3	3	100,00	100,00	Pemenuhan kebutuhan kursi kerja dan isi ulang tabung pemadam kebaran telah selesai dilaksanakan	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan alat dan bahan serta jasa kebutuhan rumah tangga kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan dalam 1 tahun	paket	11	7	63,64	63,64	Pengadaan/belanja barang disesuaikan dengan kebutuhan	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan bakar minyak; Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dalam 1 tahun	paket	14	14	100,00	100,00	Penyediaan alat tulis kantor, bahan bakar minyak telah dipenuhi	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan sesuai dengan item kebutuhan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan dalam 1 tahun	paket	7	5	71,43	71,43	Pengadaan/belanja barang disesuaikan dengan kebutuhan	
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan bahan bacaan surat kabar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dalam 1 tahun	dokumen	12	0	0,00	0,00	Tidak terlaksana karena efisiensi anggaran	
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman tamu dan rapat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	12	100,00	100,00	Dokumen pelaksanaan segera disusun dan diselesaikan setelah kegiatan berakhir.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah urusan penunjang pemerintah daerah yang dilaksanakan dalam 1 tahun dibagi jumlah total urusan penunjang pemerintah daerah**	**persen**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**		
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dalam 1 tahun	laporan	12	0	0,00	0	Belanja jasa disesuaikan dengan kebutuhan	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa langganan telepon, listrik dan internet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dalam 1 tahun	laporan	12	3	25,00	25,00	Belanja jasa disesuaikan dengan kebutuhan	
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan/servis peralatan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dalam 1 tahun	laporan	6	2	33,33	33,33	Belanja jasa disesuaikan dengan kebutuhan	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan makanan dan minuman rapat; fasilitasi perjalanan dinas kantor	Frekuensi kegiatan pelayanan umum kantor dalam 1 tahun (kali)	Jumlah bulan terpenuhi seluruh kegiatan pelayanan umum kantor	laporan	12	6	50,00	50,00	Belanja jasa disesuaikan dengan kebutuhan	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**persen**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**		
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Pembayaran pajak kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dalam 1 tahun	unit	10	10	100,00	100,00	Dokumen pelaksanaan segera disusun dan diselesaikan setelah kegiatan berakhir.	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya dalam 1 tahun	unit	10	10	100,00	100,00	Dokumen pelaksanaan segera disusun dan diselesaikan setelah kegiatan berakhir.	
1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	0	0	#DIV/0!		Tidak terlaksana karena efisiensi anggaran	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	10	10	100,00	100,00	Dokumen pelaksanaan segera disusun dan diselesaikan setelah kegiatan berakhir.	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan sederhana gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	**1**	**1**	100,00	100,00	Dokumen pelaksanaan segera disusun dan diselesaikan setelah kegiatan berakhir.	
01.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Terlaksananya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Persentase Kecamatan STBM**	**Jumlah kecamatan yang ber STBM dibagi Total kecamatan yang ada di Kabupaten dikali 100%**	**persen**	**8**	**3**	**37,50**	**37,50**	Belum tercapai, indikator penilaian semakin meningkat yaitu untuk Stop buang air besar sembarangan 100%, Cuci tangan pakai sabun sudah 100%, Pengelolaan Makanan dan minuman rumah tangga 70 %, Pengelolaan sampah rumah tangga 70%, Pengelolaan limbah cair rumah tangga 70%, jadi target capaian semakin meningkat dari tahun 2024 hanya 50% menjadi 70 %	advokasi dan mendorong SKPD dan desa untuk meningkatkan sarana prasarana dan pemicuan
			Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi	**Jumlah FKTP (puskesmas+klinik) terakreditasi dibagi jumlah seluruh puskesmas+klinik dikali 100%**	**persen**	**92**	**90,7**	**98,59**	**95,65**	Target belum tercapai. Terdapat 37 puskesmas dan 51 klinik pratama telah terakreditasi. Masih terdapat 9 klinik belum terakreditasi dengan penyebab : 6 klinik masih belum melaksanakan survei akreditasi dikarenakan pembiayaan dan terdapat penambahan 3 klinik baru yang belum menyiapkan dan mengusulkan akreditasi	1. Pemantauan mutu puskesmas dan klinik secara berkala 2. Mendorong dan mendampingi klinik yang belum terakreditasi untuk segera menyiapkan dan melaksanakan survei akreditasi
			Indeks Keluarga Sehat	**Jumlah keluarga dengan IKS >0,800 dibagi jumlah seluruh keluarga**	**persen**	**0**	**0,00**	**#DIV/0!**		Indikator Keluarga Sehat sudah tidak terdapat dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri	Data Keluarga Sehat yang telah ada akan digunakan sebagai salah satu bahan perencanaan kegiatan dan pengambilan kebijakan kesehatan selanjutnya.
			Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) terakreditasi	**Jumlah FKTL terakreditasi dibagi jumlah seluruh FKTL dikali 100%**	**persen**	**93,75**	**100**	**106,67**	**106,67**	Target telah tercapai	Pemantauan mutu berkala di RSUD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Persentase Nakestrad dan Hattra yang memiliki izin	**Jumlah Nakestrad dan Hatra yang memiliki ijin dibagi jumlah Nakestrad dan Hatra yang ada dikalikan 100 %**	**persen**	**23**	**62,9**	**273,48**	**110,00**	tercapai	tercapai
			AKI	**Jumlah Kematian Ibu pada kurun waktu tertentu dibagi lahir hidup pada tahun yang sama x 100.000 KH**	**per 100.000 KH**	**79,23**	**72,61**	**108,36**	**108,36**	AKI dibawah target nasional	
			AKB	**Jumlah Kematian Bayi pada kurun waktu tertentu dibagi lahir hidup pada tahun yang sama x 1000KH**	**per 1000 KH**	**6,70**	**4,03**	**139,85**	**110,00**	AKB dibawah target nasional	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya kegiatan penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP**	**Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan**	**Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan**	**persen**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**		
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan puskesmas	Terlaksananya jasa konsultansi perencanaan, jasa konstruksi, jasa konsultansi pengawasan	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun dalam 1 tahun	unit	3	3	100,00	100,00	Pembangunan Gedung Puskesmas Ngadi dan Pranggang, Rehablitasi dan Pembangunan Gedung Puskesmas Ngadi	
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Terlaksananya jasa konsultansi perencanaan, jasa konstruksi, jasa konsultansi pengawasan	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar dalam 1 tahun	unit	1	4	400,00	110,00	Pembangunan ruang pertemuan Puskesmas Silir, Paving dan Kanopi Adan-Adan, Genset (Adan-Adan dan Tarokan)	
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Terlaksananya jasa konsultansi perencanaan, jasa konstruksi, jasa konsultansi pengawasan	Jumlah sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi danPemeliharaan Oleh Puskesmas	unit	2	4	200,00	110,00	Rehablitasi dan pemeliharaan Puskesmas Pembantu Langenharjo, Pagung, Sidomulyo dan Jabon	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pembelian fotometer	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yangDisediakan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yangDisediakan	unit	8	8	100,00	100,00	Keperuntukan Puskesmas Pare, Bendo, Adan-Adan, Plosoklaten, Keling, Ngadiluwih, Purwoasri, Kandangan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.02.02.2.01.0023	Pengadaan obat, bahan habis pakai, BMHP, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	Terlaksananya pengadaan obat, bahan habis pakai, BMHP, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	Persentase Pengadaan obat dengan tingkat aman	Jumlah item obat yang terpenuhi dibanding jumlah item obat yang direncanakan pemenuhannya dikali 100%	persen	95	98,61	103,80	103,80		
			Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	paket	86	119	138,37	110,00		
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Terlaksananya pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik untuk 37 puskesmas dan Laboratorium Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas kesehatan yang terpelihara sesuai standar	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas kesehatan yang terpelihara sesuai standar	unit	150	305	203,33	110,00	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan permohanan pemeliharaan alat kesehatan dari Puskesmas/Labkesda (Servis report sama pengadaan jasa kalibrasi)	Memastikan kegiatan pemeliharaan alat kesehatan bisa terlaksana dengan baik sehingga pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda bisa berjalan optimal
1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Kesehatan Keluarga	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh TenagaKesehatan Puskesmas	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh TenagaKesehatan Puskesmas	keluarga	-	0	#VALUE!	0	Capaian IKS terakhir bulan September 2024 sebesar 0,35 dan setelah itu aplikasi PIS-PK tidak bisa lagi diakses	
1.02.02.2.01.0026	Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makmin ke puskesmas serta faskes lainnya	Terlaksananya kegiatan distribusi obat, Bahan Medis Habis Pakai, vaksin dan makanan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah distribusi Obat, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke fasilitas kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke fasilitas kesehatan	paket	37	37	100,00	100,00	Target sudah tercapai 100% yaitu pendistribusian obat,bmhp dan vaksin ke 37 puskesmas	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya program/kegiatan/subkegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Kabupaten**	**Cakupan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah (Cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap)**	**Presentase layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah (Cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap)**	**persen**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	Target tercapai	Pembinaan dan pemantauan mutu pelayanan baik di FKTP maupun FKRTL
			Persentase Puskesmas Dengan Kelulusan Akreditasi Minimal Utama	**Jumlah Puskesmas terakreditasi minimal Utama (Utama, Paripurna) dibagi jumlah seluruh puskesmas terakreditasi dikali 100%**	**persen**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	Target sudah tercapai 100% yaitu 37 Puskesmas telah terakreditasi dengan status paripurna	Pembinaan dan pemantauan mutu berkala di puskesmas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Persentase tenaga kesehatan tradisional yang dibina	**Jumlah tenaga kesehatan tradisional/nakestrad yang dibina di bagi jumlah nakestrad yang ada di kali 100 %**	**persen**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	tercapai	tercapai
			Persentase penyehat tradisional yang dibina	**Jumlah penyehat tradisional / hatra yang dibina di bagi jumlah hatra yang ada dikali 100 %**	**persen**	**33**	**63,30**	**191,82**	**110,00**	tercapai	tercapai
			Persentase desa yang terbentuk Asman TOGA	**Jumlah desa/kelurahan yang memiliki kelompok Asman Toga dibagi jumlah desa /keluarahan yang ada dikali 100 %**	**persen**	**28**	**29,30**	**104,64**	**104,64**	tercapai	tercapai
			Persentase puskesmas yang melaksanakan pembinaan yankestrad	**Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan yankestrad dibagi jumlah Puskesmas yang ada dikali 100 %**	**persen**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	tercapai	tercapai
			Persentase akses sanitasi layak	**Jumlah KK dengan akses sanitasi aman, sanitasi layak sendiri, dan sanitasi layak bersama dibagi jumlah KK diwilayah dan kurun waktu yang sama dikali 100%**	**persen**	**90**	**97,34**	**108,16**	**108,16**	Dari jumlah KK sebanyak 455.323 KK dan yang sudah memiliki akses sanitasi layak adalah sebesar 443.229 KK (97,34%)	Meningkatkan dari kondisi akses layak ke akses layak dan aman dengan pemicuan yang dilakukan oleh Puskesmas
			Jumlah tingkatan tatanan dalam kabupaten sehat	**Jumlah tingkatan tatanan dalam kabupaten sehat**	**Tatanan**	**9**	**9**	**100,00**	**100,00**	Sudah tercapai dan tahun 2025 mendapatkan penghargaan 'SWASTI SABA PADAPA" dari kementerian dalam negeri	Menambah lokus kegiatan ke kecamatan minimal untuk lokus di 2 kecamatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Cakupan ibu hamil dilayani sesuai standart (K4)	Jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal (K4) sesuai dengan standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah sasaran seluruh ibu hamil yang ada di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama dikali 100%.	persen	100	95,85	95,85	95,85	Belum tercapai target karena ada ibu hamil yang belum mendapatkan pelayanan sesuai standar dan ada ibu hamil yang mengalami abortus serta pindah domisili Tidak ditemukan ibu hamil baru	Lebih meningkatkan pelayanan sedini mungkin sejak kehamilan trimester 1
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	16.746	15.376	91,82	91,82		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Cakupan ibu bersalin dilayani sesuai standart	Jumlah ibu bersalin yang telah memperoleh pelayanan persalinan sesuai standart dibagi total sasaran ibu bersalin kali 100%	persen	100	94,13	94,13	94,13	Belum tercapai target karena masih ada ibu bersalin di rumah bukan di fasilitas kesehatan dan ada ibu yang mengalami abortus serta pindah domisili	Ibu bersalin terlayani di Faskes
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	16.043	15.101	94,13	94,13		
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Cakupan Bayi Baru Lahir dilayani sesuai standart (KN2)	Jumlah Bayi Baru Lahiryang telah memperoleh pelayanan KN2 dibagi sasaran bayi kali 100%	persen	100	92,93	92,93	92,93	Belum tercapai target ini berbanding lurus dengan persalinan dan ada bayi yang belum waktunya pemeriksaan	Meningkatkan mutu layanan pemeriksaan bayi
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	16.077	14.940	92,93	92,93		
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Cakupan Balita dilayani sesuai standart	Jumlah balita yang telah memperoleh pelayanan sesuai standart dibagi jumlah sasaran balita kali 100%	persen	100	93,13	93,13	93,13	Belum tercapai target karena ada balita yang pindah domisili dan tidak datang ke tempat pemeriksaan atau posyandu	Melakukan swipping balita
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	94.002	87.546	93,13	93,13		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai standart	Jumlah Anak Usia Pendidikan dasar yang telah memperoleh pelayanan sesuai standart dibagi sasaran anak kelas 1 sampai 9 dibagi sasaran kali 100%	persen	100	99,06	99,06	99,06		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	210.992	209.000	99,06	99,06		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksanya kegiatan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15--59 tahun di puskesmas yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun dibagi dengan junlah orang usia 15-59 tahun di wilayah kerja pkm dalam kurun waktu 1 tahun yg sama dikali 100%	persen	100	93,10	93,10	93,10		
			Persentase Desa Yang Melaksanakan Posbindu	Jumlah posbindu yang ada di desa wilayah puskesmas yang melaksanakan posbindu dibagi dengan jumlah seluruh posbindu di wilayah puskesmas dikali 100%	persen	100	100	100,00	100,00		
			Persentase Sekolah yang Melaksanakan KTR	Jumlah sekolah yang ada di wilayah puskesmas yang melaksanakan KTR dibagi jumlah sekolah di wilayah puskesmas dikali 100%	persen	100	78,3	78,30	78,30		
			Persentase Wanita Usia Subur yang melakukan deteksi dini penyakit Kanker payudara dan kanker leher rahim pada usia 30 sd 69 tahun	Jumlah Wanita usia 30 – 69 tahun yang dideteksi dini Kanker Payudara dan kanker leher rahim dalam 3 tahun terakhir dibagi Jumlah sasaran dari penduduk Wanita usia 30 – 69 tahun di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%.	persen	60	35,5	59,17	59,17	Kegiatan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim telah dilaksanakan, tetapi belum semua sasaran bersedia ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk berperan serta (Laporan Bulanan PTM dan Keswa Tahun 2025)	Aktif melakukan sosialisasi pentingnya deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim untuk pencegahan dan pengendalian kanker payudara dan kanker leher rahim, melibatkan organisasi masyarakat untuk berperan serta,
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah orang usia 15--59 tahun di puskesmas yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun dibagi dengan junlah orang usia 15-59 tahun di wilayah kerja pkm dalam kurun waktu 1 tahun	orang	1.081.201	1.006.990	93,14	93,14		
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Sesuai standart	Jumlah Usia Lanjut yang telah memperoleh pelayanan sesuai standart dibagi sasaran kali 100%	persen	100	100	100,00	100,00	Tercapai	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	223.156	223.156	100,00	100,00		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Terlaksanya kegiatan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi sesuai standar	Persentase penderita hipertensi dilayani sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan diagnosa dokter usia ≥ 15 tahun yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%.	persen	100	93,56	93,56	93,56	Kegiatan skrining telah dilaksanakan, tetapi belum semua sasaran yang terdiagnosa hipertensi mau ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk berobat (Laporan Bulanan PTM dan Keswa Tahun 2025)	Aktif melakukan sosialisasi pentingnya memeriksakan diri dan minum obat untuk pengendalian tekanan darah dan menghindari risiko komplikasi, melibatkan organisasi masyarakat untuk berperan serta, melakukan kunjungan rumah bagi pasien yang tidak berobat
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun x prevalensi penderita Hipertensi usia ≥ tahun berdasarkan diagnosa dokter di wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	107.661	100.727	93,56	93,56	Kegiatan skrining telah dilaksanakan, tetapi belum semua sasaran yang terdiagnosa hipertensi mau ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk berobat (Laporan Bulanan PTM dan Keswa Tahun 2025)	Aktif melakukan sosialisasi pentingnya memeriksakan diri dan minum obat untuk pengendalian tekanan darah dan menghindari risiko komplikasi, melibatkan organisasi masyarakat untuk berperan serta, melakukan kunjungan rumah bagi pasien yang tidak berobat
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	Terlaksanya kegiatan pelayanan kesehatan pada penderita diabetes sesuai standar	Persentase penderita DM dilayani sesuai standar	Jumlah penderita Diabetes Melitus usia ≥ 15 tahun di wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah estimasi berdasarkan diagnosa dokter penderita Diabetes Mellitus usia ≥ 15 tahun yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%.	persen	100	95,77	95,77	95,77	Kegiatan skrining telah dilaksanakan, tetapi belum semua sasaran yang terdiagnosa Diabetes Mellitus mau ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk berobat (Laporan Bulanan PTM dan Keswa Tahun 2025)	Aktif melakukan sosialisasi pentingnya memeriksakan diri dan minum obat untuk pengendalian gula darah dan menghindari risiko komplikasi, melibatkan organisasi masyarakat untuk berperan serta, melakukan kunjungan rumah bagi pasien yang tidak berobat
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah penderita Diabetes Mellitus usia ≥ 15 tahun x prevalensi penderita Diabetes Mellitus usia ≥ tahun berdasarkan diagnosa dokter di wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	36.336	34.799	95,77	95,77	Kegiatan skrining telah dilaksanakan, tetapi belum semua sasaran yang terdiagnosa Diabetes Mellitus mau ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk berobat (Laporan Bulanan PTM dan Keswa Tahun 2025)	Aktif melakukan sosialisasi pentingnya memeriksakan diri dan minum obat untuk pengendalian gula darah dan menghindari risiko komplikasi, melibatkan organisasi masyarakat untuk berperan serta, melakukan kunjungan rumah bagi pasien yang tidak berobat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Terlaksanya kegiatan pelayanan kesehatan pada orang dengan gannguan jiwa berat sesuai standar	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	(Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab./Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun) (Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab./Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama) kali 100%	persen	100	101,93	101,93	101,93		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	3.531	3.599	101,93	101,93		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah target orang terduga TBC yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100% (Jumlah orang terduga TBC yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota masing-masing)	persen	100	101,05	101,05	100,00		
			Persentase penemuan dan penanganan kasus TB	Jumlah kasus TBC yang ditemukan, diobati secara baku dan dilaporkan dibagi jumlah kasus TBC yang ditemukan dan diobati dikali 100%.	persen	65	74,91	115,25	110,00		
			Persentase keberhasilan pengobatan TB	Jumlah pasien TBC yang sembuh dan pengobatan lengkap dibagi jumlah semua kasus TBC yang diobati, dicatat dan dilaporkan dikali 100%	persen	90	88	97,78	97,78		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	orang	18.451	18645	101,05	101,05		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Skrining HIV dengan metode rapid, pemberian terapi arv bagi mreka yang terdeteksi positif	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	persen (progres)	100	111	111,00	110,00		
			Persentase Orang dengan HIV yang mendapatkan ARV	Presentase orang dengan HIV positif dalam kurun waktu satu tahun yang mendapatkan ARV	persen	90	72,80	80,89	80,89	masih cukup tinggi kasus lost to follow up pada pasien HIV	Bekerjasama dengan pendamping sebaya untuk melakukan tracking pada pasien lolos follow up untuk meningkatkan cakupan pengibatan ARV'
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang (progres)	31.570	31.361	99,34	99,34		
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB	1. Pembuatan dan Pemasangan Banner Pekan Imunisasi Dunia untuk 37 Puskesmas dan 1 Dinas Kesehatan 2. Pengujian sampel keracunan makanan 3. Rapat Penguatan penanggulangan KLB bagi petugas surveilans Puskesmas	Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi KLB	Jumlah pelayanan yang dilakukan pada kondisi KLB	persen	100	100	100,00	100,00	Setiap kasus yang berpotensi KLB telah ditindaklanjuti sedini mungkin dengan penyelidikan Epidemiologi dan pemeriksaan spesimen kasus dengan bekerjasama dengan RS, klinik, maupun puskesmas dalam menangkap sinyal kasus-kasus yang dicurigai berpotensi KLB sehingga bisa meminimalkan penyebaran penyakit	tetap mempertahankan kinerja yang telah dicapai dengan tetap menjaga komunikasi koordinasi dengan fasyankes agar data-data suspect bisa terlaporkan secara cepat dan tepat
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen	12	12	100,00	100,00	Dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan berpa umpan balik kinerja bulanan puskesmas yang dikirimkan setiap bulan	tetap mempertahankan kinerja yang ada yang rutin menyusun dokumen umpan balik setiap bulan
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan Atau Berpotensi Bencana		Jumlah laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar	Jumlah laporan bulanan Hasil Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis kesehatan akibat bencana/dan atau berpotensi bencana	laporan	12	12	100,00	100,00	Tercapai (laporan kejadian bencana/krisis kesehatan rutin dilaporkan setiap bulan dan jika ada kejadian bencana dibuat laporan cepat dalam waktu 24 jam)	Tercapai
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Cakupan Pemberian Vit A	Jumlah usia 6-59 bulan yang mendapatkan vit A dibagi sasaran kali 100%	persen	91	93,38	102,62	102,62	Program Pemberian Vitamin A telah mencapai target	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah balita sangat pendek ditambah pendek dibagi jumlah balita diukur kali 100%	persen	18,80	8,04	157,23	110,00	Prevalensi stunting di Kabupaten Kediri jauh dibawah target yang ditetapkan	
			Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	Jumlah Balita Gizi buruk ditambah gizi kurang dibagi jumlah balita diukur kali 100%	persen	9	4,78	146,89	110,00	Prevalensi wasting di Kabupaten Kediri jauh dibawah target yang ditetapkan	
			Prevalensi anemia pada ibu hamil	Jumlah ibu hamil anemia dibagi sasaran bumil kali 100%	persen	26	10,29	160,42	110,00	Capaian dibawah target	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	20	20	100,00	100,00	Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat sesuai target	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Pos UKK yang terbentuk	Jumlah tempat kerja informal yang telah dibentuk Pos UKK	unit	52	54	103,85	103,85	Dari 37 Puskesmas di Kabupaten Kediri ada 34 Puskesmas yang sudah membentuk pos UKK yaitu sejumlah 54 Pos UKK, ada 3 Puskesmas yang belum membentuk Pos UKK yaitu di Puskesmas Mojo, Sidorejo dan Kandangan	Mendorong Puskesmas untuk membentuk Pos UKK tentang apa pentingnya membentuk Pos UKK
			Persentase jumlah jamaah haji yang diukur kebugaran jasmaninya	Jumlah jamaah haji yang diukur kebugarannya dibagi dengan jumlah jaamah haji yang terdaftar	persen	100	100,00	100,00	100,00	Jumlah jamaah haji yang terdaftar tahun 2025 ada 1.099 jamaah dan sudah diukur kebugarannya sebanyak 100%	Mensosialisasikan ke jamaah haji pentingnya test kebugaran sebelum berangkat haji
			Persentase Tempat Kerja Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja	Jumlah perkantoran yang melaksanakan kesehatan kerja dibagi dengan jumlah perkantoran yang ada	persen	10	10,00	100,00	100,00	Jumlah perkantoran yang ada dikabupaten yaitu yang terdaftar SKPD 32 SKPD dan yang sudah dilakukan pengawasan sudah ada lebih dari 10% yang melaksanakan kesehatan kerja	Mensosialisasikan pentingnya K3 perkantoran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan olahraga baik internal maupun eksternal	buah	37	37	100,00	100,00	Jumlah puskesmas di Kabupaten Kediri ada 37 Puskesmas dan yang sudah melaksanakan upaya kesehatan olahraga yaitu secara internal yaitu melakukan rutin kesehatan olahraga, peregangan , test kebugaran dan secara external yaitu pembinaan kelompok olahraga dan sudah 37 Puskesmas (100%0	
			Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja baik secara internal maupun eksternal	buah	37	37	100,00	100,00	Sudah tercapai 100%	
			Persentase Kelompok Masyarakat Yang Melaksanakan Aktifitas Fisik	JUmlah kelompok olahraga masyarakat yang melaksanakan aktifitas fisik dibagi dengan jumlah kelompok olahraga masyarakat yang ada	persen	30	80	266,67	110,00	Jumlah kelompok olahraga yang terdaftar ada 474 kelompok olah raga dan yang sudah diukur ada 142 (80%)	Perlu pembinaan dan peningkatan pengukuran pada kelompok olahraga tersebut
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	1	1	100,00	100,00	Adanya dokumen pelaporan baik kesehatan kerja maupun olahraga dalam satu tahun terbentuk 1 laporan	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Persentase Tempat Pengelolaan pangan yang memenuhi syarat sesuai standar	Jumlah tempat pengelolaan pangan /TPP memenuhi syarat kesehatan dibagi jumlah TPP diwilayah dan kurun waktu yang sama kali 100%	persen	78	89,87	115,22	110,00	Dari jumlah TPP yang terdaftar 1.096 TPP dan sudah di inspeksi kesehatan lingkungan dan memenuhi syarat ada 985 (89,87%)	Masih banyak TPP sebagai penyedia makanan siap saji belum memenuhi syarat dan perlu adanya pelatihan penjamah pangan dan peningkatan perijinannya
			Persentase desa ODF	Jumlah desa/kelurahan stop BABS dibagi Jumlah desa/kelurahan diwilayah dan kurun waktu yang sama dikali 100%	persen	100	100	100,00	100,00	Sudah tercapai 100% untuk desa bebas buang air besar sembarangan	Meningkatkan kepilar selanjutnya yaitu pilar 3,4 dan 5
			Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa kualitas airnya	jumlah sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya yang memenuhi standart dibagi jumlah sarana air minum yang ada diwilayah dan waktu yang sama dikali 100%	persen	87	91,2	104,83	104,00	Dari jumlah Sarana Air Minum (SAM) 102 SAM dan dilakukan pengawasan serta pemeriksaan yang hasilnya secara bakteri yaitu bebas dari bakteri E. Coli adalah 93 SAM (91,2%) jadi target TW 4 untuk pemeriksaan di SAM sudah tercapai	Lebih meningkatkan ke pemeriksaan internal yang dilakukan oleh pengelola SAM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis	Jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis yang memenuhi standart	persen	100	100	100,00	100,00	Fasyankes yang mengelola limbahnya sudah 100%	Meningkatkan pelaporan dan dokumen pengelolaannya yaitu RINTEK dan PERTEK fasyankes yang masih belum banyak yang menyusun
			Persentase Tempat-tempat umum yang dilakukan pengawasan sesuai standar	Jumlah total TFU yang dilakukan pengawasan sesuai standart (IKL) dibagi jumlah TFU diwialayah dan kurun waktu yang sama dikali 100%	persen	90	90	100,00	100,00	Jumlah total TFU 1.356 TFU terdiri dari sekolah, puskesmas, pasar, stasiun, akomodasi, rekreasi dan olahraga yang mana sudah di IKL sejumlah 1.218 (90%), dan yang memenuhi syarat 1.026 (76%) dan TFU yang belum memenuhi syarat ada 207 TFU (15%)	Dari target ini masih perlu ditingkatkan karena tempat tempat umum ini harus memenuhi syarat yg mana sangat besar terjadinya penularan penyakit lewat TFU ini
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dalam 1 tahun	dokumen	1	1	100,00	100,00	Sudah tercapai dokumen pelaporan Kesling Kesjaor	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	3	3	100,00	100,00	Tercapai	Tercapai
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		Jumlah tenaga kesehatan tradisional yang dibina	Jumlah tenaga kesehatan tradisional/nakestrad yang dibina di wilayah Puskesmas pada tahun 2024	orang	6	7	116,67	100,00	Tercapai	Tercapai
			Jumlah penyehat tradisional yang dibina	Jumlah penyehat tradisional / hatra yang dibina di wilayah Puskesmas pada tahun 2024	orang	474	636	134,18	100,00	Tercapai	Tercapai
			Jumlah desa yang terbentuk Asman TOGA	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki kelompok Asman Toga pada tahun 2024	desa	82	101	123,17	100,00	Tercapai	Tercapai
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan pembinaan yankestrad	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan yankestrad pada tahun 2024	unit	37	37	100,00	100,00	Tercapai	Tercapai
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	dokumen	1	1	100,00	100,00	Tercapai	Tercapai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1. Terlaksananya Pembinaan calon jemaah haji 2. Terlaksananya pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji 3. Terlaksananya penyelidikan epidemiologi kasus PD3I	Presentase KLB yang ditanggulangi ≤ 24 jam	Jumlah KLB dibagi jumlah KLB yang ditanggulangi ≤ 24 jam dikali 100%	persen	100	100	100,00	100,00	Setiap kasus yang berpotensi KLB telah ditindaklanjuti sedini mungkin dengan penyelidikan Epidemiologi dan pemeriksaan spesimen kasus dengan bekerjasama dengan RS, klinik, maupun puskesmas dalam menangkap sinyal kasus-kasus yang dicurigai berpotensi KLB sehingga bisa meminimalkan penyebaran penyakit	tetap mempertahankan kinerja yang telah dicapai dengan tetap menjaga komunikasi koordinasi dengan fasyankes agar data-data suspect bisa terlaporkan secara cepat dan tepat
			Penemuan kasus AFP	Jumlah kasus AFP yang ditemukan dalam 1 tahun yang sama	kasus	14	25	178,57	110,00	Ada evaluasi/ umpan balik bulanan atas kinerja puskesmas terkait penemuan kasus AFP sehingga puskesmas dapat mengevaluasi dan memenuhi target yang ditetapkan dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan karena dukungan dari Faskes lanjutan (RS)	evaluasi bulanan/ umpan balik kinerja bulanan tetap rutin dilaksanakan
			Penemuan kasus suspect campak	Jumlah kasus suspect campak yang ditemukan dalam 1 tahun yang sama	kasus	64	138	215,63	110,00	Ada evaluasi/ umpan balik bulanan atas kinerja puskesmas terkait penemuan kasus suspect campak sehingga puskesmas dapat mengevaluasi dan memenuhi target yang ditetapkan dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan karena dukungan dari Faskes lanjutan (RS)	Evaluasi bulanan/ umpan balik kinerja bulanan tetap rutin dilaksanakan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	12	12	100,00	100,00	Dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan berpa umpan balik kinerja bulanan puskesmas yang dikirimkan setiap bulan	tetap mempertahankan kinerja yang ada yang rutin menyusun dokumen umpan balik setiap bulan
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	-	-	#VALUE!			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dilakukan Deteksi Dini Hepatitis B dengan metode rapid, Pemberian vaksin HBIg pada bayi dari ibu reaktif hbsag, melakukan tes rapid pada bayi yang mendapat HBIg pada usia 9-12 bulan, memberikan obat cacing (albendazole) pada anak usia 1-12 tahun	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	8	8	100,00	100,00		
			Persentase Penemuan Kusta Pada Anak	jumlah kasus anak yang ditemukan dibagi jumlah seluruh kasus kusta dikalikan 100%	persen	< 5	5	100,00	100,00		
			Persentase Cacat Pada Kasus Kusta Baru	jumlah kasus kusta dengan cacat II yang ditemukan dibagi jumlah seluruh kasus kusta dikalikan 100%	persen	< 5	5	100,00	100,00		
			Persentase Penderita Kusta RFT-MB	jumlah kasus MB padas 2 tahun sbelumnya yang menyelesaikan pengobatan dibagi jumlah kasus MB pada kohort tahun yang sama dikalikan 100%	persen	100	95,50	95,50	95,50		
			Persentase Penderita Kusta RDT-PB	jumlah kasus PB pada 1 tahun sbelumnya yang menyelesaikan pengobatan dibagi jumlah kasus MB pada kohort tahun yang sama dikalikan 100%	persen	100	0	0,00	0		
			Persentase Cakupan Tatalaksana Pneumonia Balita	Jumlah penderita Pnemonia balita yang ditangani dibagi target perkiraan balita dikali 100%. Target balita = 4,45 % x jml balita	persen	60%	48,03	80,05	80,05		
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana Diare sesuai standart	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana diare sesui standart dibagi jumlah puskesmas dikalikan 100%	persen	80	78,38	97,98	97,98		
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan advokasi dan / sosialisasi Pengendalian PISP	Jumlah puskesmas yang melaksanakan advokasi / sosialisasi pengendalian PISP dibagi julah puskesmas dikalikan 100%	persen	75	75	100,00	100,00		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Persentase Puskesmas yang mempunyai Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA)	Layanan kegiatan LROA secara terus menerus dalam 3 bulan dengan periode pelaporan per tribulan. Dalam 1 tribulan, laporan bulanan harus ada dan lengkap` Kalau dalam 1 tribulan hanya ada laporan 1 bulan, maka dianggap tidak ada LROA. Kalau dalam 1 tahun hanya lapor tribulan 4 saja, dianggap kinerja mencapai 25%. (Yang dihitung adalah jumlah layanan)	persen	90	90	100,00	100,00		
Persentase Kasus Diare pada semua umur ditangani sesuai standart	Jumlah penderita semua umur diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dibagi target dikali 100%. Target = (10% x 270/1000) x jumlah penduduk di wilayah kerja puskesmas pada kurun waktu tertentu	persen	80	63,13	78,91	78,91	Penderita melakukan pengobatan mandiri dan datang ke klinik sekitar	Meningkatan kerjasama dengan Jejaring Faskes
Persentase Kasus Diare pada Balita ditangani sesuai standart	Jumlah penderita balita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dibagi target dikali 100%. Target = (20% x 843/1000) x jumlah balita (sesuai data pusdatin) di wilayah kerja puskesmas pada kurun waktu tertentu Balita adalah anak usia 0-59 bulan.	persen	80	65,62	82,03	82,03	Penderita melakukan pengobatan mandiri dan datang ke klinik sekitar	Meningkatan kerjasama dengan Jejaring Faskes
Persentase Bumil dilakukan (DDHB) Deteksi Dini Hepatitis B	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pemeriksaan HBsAg dibagi jumlah proyeksi jumlah ibu hamil dikali 100%	persen (progres)	100	48	55,00	55,00	Masih rendahnya kunjungan ANC pada ibu hamil	Menaikkan kunjungan ANC ibu hamil dengan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya ANC terpadu pada ibu hamil
Persentase bayi lahir dari Ibu reaktif HBsAg mendapat HBIg < 24 jam	Jumlah bayi lahir dari ibu reaktif HBsAg mendapat HBIg < 24 jam dibagi jumlah bayi lahir dari ibu reaktif HBsAg dikali 100%	persen	100	100	100,00	100,00		
Persentase bayi usia 9-12 bulan yang mendapat HBIg di test HBsAg hasilnya Non Reaktif	Jumlah bayi usia 9-12 bulan yang mendapat HBIg di test HBsAg hasilnya Non Reaktif dibagi jumlah bayi usia 9-12 bulan yang mendapat HBIg di test HBsAg dikali 100%	persen (progre)	100	100	100,00	100,00		
Persentase kasus DBD ditangani sesuai standart	Jumlah kasus DBD yang ditangani sesuai standar Tatalaksana Pengobatan DBD dibagi dengan jumlah seluruh DBD yang terlaporkan di wilayah Puskesmas dikali 100%	persen	100	100	100,00	100,00		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Persentase Angka Bebas Jentik (ABJ)	Jumlah rumah bebas jentik dibagi jumlah rumah yang diperiksa jentiknya dikali 100 %	persen	80	83	103,75	103,75		
			Persentase anak usia 1-12 Tahun mendapatkan obat Cacing	Jumlah capaian anak usia 1-12 tahun mendapat obat cacing dibagi jumlah sasran anak usia 1-12 tahun mendapat obat cacing dikali 100%	persen	100	99	99,00	99,00	Terdapat anak yang pindah sekolah/pindah domisili sehingga dari yang awalnya masuk sasaran, menjadi tidak mendapat obat cacing	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya subkegiatan Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk dalam data base yang memiliki jaminan kesehatan	Jumlah penduduk terdaftar JKN dibagi jumlah seluruh penduduk dibagi 100%	persen	98	98,44	100,45	100,45	Target sudah tercapai pada bulan Oktober (UHC : 99,06%) namun mengalami penurunan lagi yang disebabkan adanya penonaktifan kepesertaan PBI JK bulan Oktober, Nopember dan Desember total sebanyak 10.750 peserta	Untuk mempertahankan status capaian UHC *non cut off* tetap tercapai (98%, tingkat keaktifan peserta minimal 80%) dengan cara : 1. Memastikan kevalidan data peserta PBID melalui padan data secara berkala dengan Dispendukcapil 2. Optimalisasi kepesertaan segmen lain non PBID untuk mengurangi beban anggaran daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	4	4	100,00	100,00	Target sudah tercapai 100%, hasil pengelolaan berupa rekap pembayaran iuran dan bantuan iuran telah terdokumentasi dengan baik	Validasi data berkala bersama BPJS Kesehatan
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1. Terlaksananya pengambilan dan pengiriman spesimen KLB ke laboratorium rujukan	Presentase pengambilan dan pengiriman spesimen ≤ 24 jam ke laboratorium pemeriksa	Jumlah spesimen yang diambil dibagi jumlah spesimen yang dikirim ke laboratorium pemeriksa dikali 100%	persen	100	100	100,00	100,00		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	paket	2	2	100,00	100,00		
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Jumlah Kecamatan sehat	Jumlah kecamatan yang melaksanakan Kecamatan sehat dibagi jumlah kecamatan pada kurun waktu yang sama	unit	26	26	100,00	100,00	Untuk kecamatan yg teradopsi dalam kecamatan sehat sudah 100% (26 Kecamatan)	Tahun 2026 rencana akan membuat pilot project di 2 kecamatan yaitu kecamatan Gurah dan Ngasem
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	jumlah dokumen 9 tatanan yang tersusun dalam satu tahun	dokumen	-	1	#VALUE!	#VALUE!	Terbentuknya dokumen capaian Kabupaten sehat tahun 2025	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya sub kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	dokumen	37	37	100,00	100,00	Target sudah tercapai 100% yaitu terdapat dokumen operasional pelayanan fasyankes lainnya	Pembinaan dan pemantauan mutu layanan di fasyankes lain
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1. Telaksananya pencetakan kartu imunisasi anak sekolah (BIAS) 2. Monitoring dan evaluasi program imunisasi	Jumlah desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	Jumlah Desa UCI dibagi jumlah Desa di wilayah Puskesmas dikali 100 %	unit	341	96	28,15	28,15		
			Presentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari: satu dosis Imunisasi Hepatitis B, satu dosis imunisasi BCG, empat dosis imunisasi Polio oral, satu dosis imunisasi IPV, tiga dosis imunisasi DPT-HB-Hib, dan satu dosis imunisasi Campak Rubella dalam kurun waktu satu tahun dibagi 95% jumlah bayi yang diperkirakan hidup usia 0-11 bulan (Surviving Infant) selama kurun waktu yang sama, dikali 100.	persen	95	111,68	117,56	110,00		
			Persentase anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan Campak dan Rubella	Jumlah anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan baduta (bayi usia di bawah 2 tahun) meliputi 1 dosis imunisasi DPT HB-HiB serta 1 dosis imunisasi Campak Rubela di satu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun, dibagi 90% jumlah anak usia 18-24 bulan (Surviving Infant tahun lalu) dalam kurun waktu yang sama, dikali 100	persen	95	114,53	120,56	110,00		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	laporan	12	12	100,00	100,00	pemberian umpan balik secara rutin setiap bulan ke puskesmas tentang capaian kinerja imunisasi bulanan dan kumulatif	konsisten dalam menyusun umpan balik setiap bulan ke puskesmas tentang capaian kinerja imunisasi bulanan dan kumulatif
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	1. Rapat penguatan kewaspadaan dini dan respon wabah 2. Rapat evaluasi program surveilans	Presentase pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Jumlah kelengkapan dan ketepatan laporan, serta verifikasi alert yang muncul setiap mingguberupa Buletin SKDR setiap minggu	persen	100	100	100,00	100,00	Pemantauan dan evaluasi mingguan dilakukan baik pada Rumah Sakit maupun Puskesmas sehingga data yang dialaporkan dapat tepat waktu dan lengkap	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	dokumen	12	12	100,00	100,00		
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah PSC yang ada dan beroperasional	unit	1	1	100,00	100,00	Tercapai (laporan harian dilaporkan secara rutin, tepat waktu dan jadwal piket dibuat rutin setiap awal bulan)	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan Pelayanan Malaria		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	orang	8	10	125,00	110,00		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah dokumen pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	dokumen	12	12	100,00	100,00	Tercapai	
1.02.02,2,03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Tingkat ketersediaan sistem informasi kesehatan**	**Jumlah Puskesmas yang melaksanakan sistem informasi kesehatan**	**unit**	**37**	**37**	**100,00**	**100,00**	37 Puskesmas menggunakan SIMPUS Teman Mas Abdi untuk aplikasi layanan pasien, dan 37 WEB puskesmas	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah LAN yang terpelihara dan puskesmas yang menggunakan simpus dan e-SPM	Jumlah LAN yang terpelihara dan puskesmas yang menggunakan simpus dan e-SPM	unit	38	38	100,00	100,00	37 Puskesmas dan Dinkes	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen	**1**	1	100,00	100,00		
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan**	**Jumlah Rumah Sakit dan Faskes Lainnya yang mempunyai izin Operasional**	**persen**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	Target tercapai 100% yaitu sebanyak 37 puskesmas, 60 klinik serta 11 RS memiliki ijin operasional yang masih berlaku	Pemantauan dan supervisi perijinan secara terpadu bersama OPD terkait (DPMPTSP, Dinas Perkim, Dinas PUPR dan DLH)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Persentase Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥ 89%)	**Jumlah Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥ 89%) dibagi jumlah seluruh puskesmas dikali 100%**	**persen**	**100**	**0**	**0,00**	**0**	Target belum tercapai, tidak ada puskesmas dengan tingkat kinerja BAIK (0%). Sebanyak 21 Pkm (56,76%) berkinerja CUKUP dan 16 Pkm (43,24%) berkinerja KURANG yang disebabkan : 1. adanya perubahan indikator PKP menyesuaikan dengan PMK No 19 Tahun tentang Penyelenggaraan Puskesmas sehingga banyak perubahan indikator yang belum tersosialisasikan dengan maksimal 2. input dan validasi data memerlukan waktu yang lama oleh karena perubahan indikator dan perubahan rumus yang diberikan Dinkes Provinsi	1. Pembinaan terpadu lintas program Dinkes 2. Sosialisasi indikator PKP 3. Validasi data per indikator PKP
			Persentase keluarga yang mendapat intervensi sesuai hasil survey KS	**Jumlah keluarga hasil survei KS yang diintervensi dibagi jumlah seluruh keluarga hasil KS dikali 100%**	**persen**	**-**	**-**	#VALUE!		Indikator Keluarga Sehat sudah tidak terdapat dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri	Data Keluarga Sehat yang telah ada akan digunakan sebagai salah satu bahan perencanaan kegiatan dan pengambilan kebijakan kesehatan selanjutnya.
			Persentase Klinik Pratama yg terakreditasi	**Jumlah klinik pratama yang sudah terakreditasi dibagi jumlah seluruh klinik pratama dikali 100%**	**persen**	**92**	**90,7**	**98,59**	**98,59**	Target belum tercapai. Terdapat 51 klinik pratama telah terakreditasi. Masih terdapat 9 klinik belum terakreditasi dengan penyebab : 6 klinik masih belum melaksanakan survei akreditasi dikarenakan pembiayaan dan terdapat penambahan 3 klinik baru yang belum menyiapkan dan mengusulkan akreditasi	1. Pemantauan mutu puskesmas dan klinik secara berkala 2. Mendorong dan mendampingi klinik yang belum terakreditasi untuk segera menyiapkan dan melaksanakan survei akreditasi
			Persentase RS yang terakreditasi paripurna	**Jumlah RS yang terakreditasi paripurna dibagi dengan jumlah seluruh RS dikali 100%**	**persen**	**90,9**	**90,9**	**100,00**	**100,00**	tercapai (dari 11 RS sebanyak 10 RS terakreditasi paripurna dan 1 RS terakreditasi utama)	melaksanakan pembinaan ke RS
			Persentase Klinik Utama yang terakreditasi	**Jumlah Klinik Utama yang terakreditasi dibagi dengan jumlah seluruh Klinik Utama yang ada dikali 100%**	**persen**	**80**	**100**	**125,00**	**110,00**	tercapai (4 klinik utama terakreditasi paripurna)	Tercapai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya sub kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥ 89%)	Jumlah Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥ 89%) dibagi jumlah seluruh puskesmas dikali 100%	unit	37	0	0,00	0,00	Target belum tercapai, tidak ada puskesmas dengan tingkat kinerja BAIK (0%). Sebanyak 22 Pkm (59,46%) berkinerja CUKUP dan 15 Pkm (40,54%) berkinerja KURANG yang disebabkan : 1. adanya perubahan indikator PKP menyesuaikan dengan PMK No 19 Tahun tentang Penyelenggaraan Puskesmas sehingga banyak perubahan indikator yang belum tersosialisasikan dengan maksimal 2. input dan validasi data memerlukan waktu yang lama oleh karena perubahan indikator dan perubahan rumus yang diberikan Dinkes Provinsi	1. Pembinaan terpadu lintas program Dinkes 2. Sosialisasi indikator PKP 3. Validasi data per indikator PKP
			Jumlah keluarga yang mendapat intervensi sesuai hasil survey KS	Jumlah keluarga hasil survei KS yang diintervensi dibagi jumlah seluruh keluarga hasil KS dikali 100%	keluarga	-	-	#VALUE!		Indikator Keluarga Sehat sudah tidak terdapat dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri	Data Keluarga Sehat yang telah ada akan digunakan sebagai salah satu bahan perencanaan kegiatan dan pengambilan kebijakan kesehatan selanjutnya.
			Jumlah Klinik Pratama yg terakreditasi	Jumlah klinik pratama yang sudah terakreditasi dibagi jumlah seluruh klinik pratama dikali 100%	unit	58	51	87,93	87,93	Target belum tercapai. Terdapat 51 klinik pratama telah terakreditasi. Masih terdapat 9 klinik belum terakreditasi dengan penyebab : 6 klinik masih belum melaksanakan survei akreditasi dikarenakan pembiayaan dan terdapat penambahan 3 klinik baru yang belum menyiapkan dan mengusulkan akreditasi	1. Pemantauan mutu klinik secara berkala 2. Mendorong dan mendampingi klinik yang belum terakreditasi untuk segera menyiapkan dan melaksanakan survei akreditasi
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	unit	100	139	139,00	110,00	Realisasi terhadap target sudah tercapai	1. Pemantauan mutu secara berkala 2. Sosialisasi dan pembinaan bagi fasyankes yang belum terregistrasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		Jumlah dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	dokumen	3	3	100,00	100,00	Tercapai di TW 1 dan TW 2 (ijin operasional FKTL habis pada TW 1 dan TW 2) dan perpanjangan ijin dilaksanakan sesuai habis masa berlaku SIO	
01.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Terlaksananya kegiatan program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manuasia Kesehatan**	**Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan**	**Jumlah tenaga kesehatan eksisting dan pemenuhan kompetensi nakes dibagi jumlah kebutuhan tenaga kesehatan dan kebutuhan pemenuhan kompetensi nakes**	**persen**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**		
01.02.03.2.01	**Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di kabupaten / kota**	**Terlaksananya kegiatan pemberian izin praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sesuai persyaratan**	**Jumlah ijin praktik yang diterbitkan setelah memenuhi persyaratan**	**Jumlah SIP/SIK tenaga kesehatan yang diterbitkan dibagi jumlah SIP/SIK yang diajukan**	**Lembar**	**1.200**	**1450**	**120,83**	**110,00**	Tercapai 100% kumulatif sampai dengan TW 4	Melakukan verifikasi berkas kelengkapan pengajuan untuk penerbitan SIP/SIK melalui Aplikasi KESATU terintegrasi dengan MPP (Mall Pelayanan Publik)
01.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui fasyankes	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan melalui aplikasi SISDMK	dokumen	1	1	100,00	100,00	Tercapai 100%, dokumen laporan hasil pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan dan tenaga medis disusun rutin setiap tribulan melalui update data SISDMK baik untuk Puskesmas, RS maupun Klinik.	Selain melakukan pembinaan dan pengawasan melalui aplikasi SISDMK. kegiatan pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui kunjungan ke fasyankes pada bulan September 2025 dan pengisin instrumen Binwas SDMK per Desember 2025. Dinkes melakukan konsultasi ke SDMK Dinkes Provinsi Jatim pada tanggal 15 Desember 2025 terkait Binwas SDMK yang akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Binwas Dinkes dan penyusunan standarisasi bukti dukung dokumen yang diupload untuk penilaian fasyankes setiap 6 bulan sekali
01.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya penyusunan kebutuhan SDMK dan analisa rencana pemenuhan di semua tingkat unit kerja milik pemerintah daerah**	**Tersedianya perencanaan SDM Kesehatan di Fasiliatas Kesehatan Pemerintah**	**Jumlah laporan perencanaan SDM Kesehatan di Faskes Pemerintah yang dilaporkan dibagi jumlah Faskes Pemerintah dikali 100 persen**	**persen**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	Tersedianya laporan kebutuhan peta jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di lingkup Dinas Kesehatan dan Puskesmas tahun 2025	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

01.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Penyusunan perhitungan kebutuhan SDMK pada masing-masing unit kerja pelayanan kesehatan milik pemerintah dan proses verifikasi daerah dan pusat	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen penyusunan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan di Faskes Pemerintah lingkup Kab. Kediri	dokumen	1	0	0,00	0,00	Aplikasi Renbut Kementerian Kesehatan untuk Tahun 2026 belum dibuka sampai dengan akhir Desember 2025, karena ada penyesuaian aplikasi Renbut terkait perubahan regulasi Pemenuhan SDMK di Puskesmas sesuai dengan Permenkes No 19 Tahun 2024	Berkoordinasi dengan Puskesmas dan RS untuk menyiapkan proyeksi kebutuhan SDMK Tahun 2026 sebelum Aplikasi Renbut Kemenkes dibuka untuk proses input data
01.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Monitoring dan evaluasi untuk jumlah, jenis, kategori SDMK di Seluruh fasilitas	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen deskripsi profil Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	1	1	100,00	100,00	Tersusunnya dokumen Profil SDMK Tahun 2025	
01.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDMK melalui kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi lainnya di tingkat daerah kabupaten dalam kurun waktu satu tahun**	**Persentase ASN Yang Dikembangkan Kompetensinya**	**Jumlah ASN bidang kesehatan yang mengikuti kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi lainnya dibagi jumlah ASN bidang kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan dikali 100 persen dalam kurun waktu satu tahun**	**persen**	**100**	**99,52**	**99,52**	**99,52**	Tercapai 99,52% dari target 100% , karena pada Pelatihan Pelayanan ANC dan Penggunaan USG Dasar Obstetri Terbatas melalui Blended Learning (Angkatan 7) dengan kuota 30 peserta, Dinkes Kab Kediri hanya memberangkatkan 29 peserta, dikarenakan semua Puskesmas sudah pernah memberangkatkan dokter dan ada dokter yang mengundurkan diri karena sakit.	Berkoordinasi dengan program terutama yang kegiatan pelatihannya diprioritaskan didanai dari DAK NF untuk melakukan *Training Need Assessment* (TNA) sehingga sesuai kebutuhan dan tepat sasaran untuk perencanaan peserta pelatihannya
01.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDMK melalui kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi lainnya di tingkat Daerah Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah ASN bidang kesehatan di lingkup DInas Kesehatan Yang Dikembangkan Kompetensinya pada kurun waktu satu tahun	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi teknis di lingkup Dinas Kesehatan dalam kurun waktu satu tahun	orang	60	209	348,33	110,00	Sudah tercapai 100% kumulatif sampai dengan TW 4	Melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan mutu dan pengembangan teknis SDMK di lingkung Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri termasuk salah satunya penyesuaian terhadap target indikator kinerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

01.02.04	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**		**Prosentase Pemberian Rekomendasi Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan UMOT**	**Jumlah surat rekomendasi yang dikeluarkan dibanding jumlah permohonan rekomendasi yang masuk dikali 100%**	**persen**	**75**	**76,25**	**101,67**	**101,67**		
			Prosentase Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Bersertifikat	**Jumlah produk makanan minuman tertentu yang bersertifikat P-IRT dibanding jumlah yang mengajukan izin P-IRT dikali 100%**	**persen**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**		
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, UMOT**	**Terlaksananya kegiatan penilaian kesesuaian apotek dan TO, Tk Alkes dan optikal dengan hasil Memenuhi Syarat**	**Jumlah rekomendasi Apotek, TO, Tk Alkes dan Optikal UMOT yang diterbitkan**	**Jumlah rekomendasi apotek, TO, TK. Alkes dan optikal, UMOT yang diterbitkan**	**sarana**	**20**	**61**	**305,00**	**110,00**	Adanya perubahan/ penyesuaian pada sistem OSS	
			Persentase Apotek,Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, UMOT yang dibina dan diawasi	**Jumlah apotek, TO, Tk. Alkes dan optikal, UMOT yang dibina dan diawasi dibanding jumlah apotek, TO, Tk. Alkes dan optikal, UMOT yang memiliki surat izin**	**persen**	**35**	**68,23**	**194,94**	**110,00**		
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), pembinaan dan pengawasan dilaksanakan ke sarana, kegiatan dalam gedung maupun daring	Jumlah rekomendasi Apotek, TO, toko alkes, dan optikal , UMOT yang memenuhi persyaratan	Jumlah rekomendasi Apotek, TO, toko alkes, dan optikal , UMOT yang memenuhi persyaratan	sarana	20	61	305,00	110,00	Adanya perubahan/ penyesuaian pada sistem OSS	
			Jumlah apotek, TO, toko alkes, dan optikal , UMOT yang dibina dan diawasi	Jumlah apotek, TO, toko alkes, dan optikal , UMOT yang dibina dan diawasi	sarana	53	228	430,19	110,00		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	dokumen	1	1	100,00	100,00		
1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**		**Presentase TPM yang ber SLHS**	**Jumlah TPM yang brSLHS dibagi jumlah total TPM dikali 100%**	**persen**	**80**	**1,19**	**1,49**	**1,49**	Capaian SLHS masih sangat kecil karena dalam perijinan sekarang sesuai dengan PMK no. 17 tahun 2025 bahwa SLHS sebagai PBUMKU harus ada perijinan dasar dulu yaitu SLF, PBG dan ijin lingkungan serta yang sekala industri ada SIINAs dan kebanyak usaha -usaha tersebut masih terkendala di perijinan dasar tersebut.	mengadvokasi pengusaha untuk segera mengurus perijinan dasar dulu
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lainJasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lainJasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lainJasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	dokumen	1	1	100,00	100,00	Terbentuknya dokumen pelaporan dalam satu (1) tahun 2025	
1.02.04.2,05	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**		**Persentase Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**								
1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Jumlah dokumenhasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan	Jumlah dokumenhasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	dokumen	1	1	100,00	100,00	Terbentuknya dokumen pelaporan dalam satu (1) tahun 2025	
			Jumlah stikerisasi pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Jumlah stikerisasi pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	buah	200	197	98,50	98,50	Dari jumlah TPP yang ada 1.096 TPP dan yang sudah ada labelnya masih ada 197 (0,18%)	advokasi dan peningkatan sosialisasi, pelatihan penjamah pangan pada makanan jajanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**		**Prosentase pemeriksaan produksi makanan minuman industri rumah tangga**	**Jumlah pemeriksaan produksi makanan minuman industri rumah tangga yang dibina dan diawasi dibanding jumlah pemeriksaan produksi makanan minuman industri rumah tangga yang bersertifikasi**	**persen**	**4,28**	**9,28**	**216,82**	**110,00**		
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		Persentase produsen industri rumah tangga yang dibina dan diawasi	Persentase produsen industri rumah tangga yang dibina dan diawasi dibanding produsen industri rumah tangga yang ditargetkan di tahun N	persen	100	83,33	83,33	83,33		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	IRTP	100	105	105,00	105,00		
01.02.05	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**		**Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)**	**jumlah UKBM Purnama+Mandiri /jumlah UKBM x100**	**persen**	**69**	**95,75**	**138,77**	**110,00**		
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksanakan kegiatan tim pokjanal tk. Kabupaten, kecamatan dan desa dalam satu tahun**	**Frekuensi kegiatan tim pokjanal tk. Kabupaten, kecamatan dan desa dalam satu tahun**	**Jumlah frekuensi Pertemuan tim pokjanal posyandu TK kabupaten dalam 1 tahun**	**kegiatan**	**2**	**2**	**100,00**	**100,00**		
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksanakan publikasi promosi kesehatan	Jumlah lintas sektor/ organisasi masyarakat/ organisasi profesi/ dunia usaha yang bermitra dengan UKBM	Jumlah organisasi yang melakukan mitra tentang UKBM dibagi jumlah organisasi	kegiatan	2	2	100,00	100,00		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dokumen	1	1	100,00	100,00		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Telraksanakan kegiatan publikasi kesehatan**	**Jumlah media KIE yang digunakan dalam satu tahun**	**Jumlah tema KIE yang ditayangkan dalam media**	**paket**	**1**	**1**	**100,00**	**100,00**		
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Teraksanakan kegiatan publikasi kesehatan	Jumlah tema KIE program prioritas yang dipromosikan melalui media	Jumlah Tema KIE yang di promosikan oleh media dalam satu tahun	dokumen	3	3	100,00	100,00		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih danSeha	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih danSeha	dokumen	**1**	1	100,00	100,00		
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Telaksanakannya kegiatan kader kesehatan dalam upaya usaha kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)**	**Tingkat partisipasi kesehatan masyarakat skala desa**	**Jumlah kader yang ikut dalam partisipasi kesehatan masyarakat**	**persen**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**		
			Cakupan promosi kesehatan tingkat desa	**Jumlah penyuluhan yang dilakukan oleh kader desa dalam satu tahun**	**persen**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**		
			Cakupan kelompok kesehatan masyarakat yang dibina	**Jumlah kelompok kesehatan masyarakat yang dibina selama 1 tahun**	**persen**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**		
			Persentase Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	**jumlah posyandu PURI dibagi jumlah seluruh posyandu yang ada dikalikan 100**	**persen**	**89**	**95,75**	**107,58**	**107,58**		
			Persentase poskesdes purnama mandiri (PURI)	**jumlah poskesdes PURI dibagi jumlah seluruh poskesdes yang ada dikalikan 100**	**persen**	**21**	**0**	**0,00**	**0,00**	pengukuran strata program poskesdes tidak dilaksanakan karena layanannya telah bergabung dengan posyandu siklus hidup	
			Persentase poskestren purnama mandiri (PURI)	**jumlah poskestren PURI dibagi jumlah seluruh poskestren yang ada dikalikan 100**	**persen**	**65**	**35,14**	**54,06**	**54,06**	strata poskestren belum mencapai target karena belum semua pondok pesantren (117) terdapat program pos kesehatan pesantren (37)	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Persentase saka Bhakti Husada (SBH) purnama Mandiri (PURI)	**jumlah posyandu SBH dibagi jumlah seluruh SBHyang ada dikalikan 100**	**persen**	**32**	**32**	**100,00**	**100,00**		
			Persentase desa-kelurahan siaga aktif	**jumlah desa yang melaksanakan desa siaga aktif dibagi jumlah seluruh desa yang ada dikalikan 100**	**persen**	21	**43,6**	**207,62**	**110,00**		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Terlaksananya bimbingan teknis UKBM	Frekuensi bimbingan teknis dan supervisi UKBM yang dilakukan selama satu tahun	Jumlah frekuensi bimbingan teknis UKBM di wilayah Kabupaten yang dilaksanakan	kegiatan	4	4	100,00	100,00		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM)	dokumen	1	1	100,00	100,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (10)									**94,53**		
Predikat Kinerja Organisasi (11)									**BAIK**		

Kediri, 20 Januari 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI

dr. AHMAD KHOTIB, M.Kes
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197003242002121003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2025

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI

KEDIRI
BERBUDAYA

Jl. Pamenang Nomor 1-C Sukorejo, Ngasem, Kediri, Jawa Timur 64182
Telp. 0354-683756 Email: dinkes@kedirikab.go.id - Website: dinkes.kedirikab.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).